

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Bengkulu

Mei 2026



TARI ANDUN



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI BENGKULU

MEI 2026

Tim Penyusun

TIM PENULIS

Muhammad Irfan Octama (Pengarah)

Fajar Setiawan

Addin Nisshaq Fathiani Diva

Meutia Puspa Putri Blante

Muhammad Rizqi Naufal Saragih

Dyah Retnaningrum

Agita Nurfazria

Dyah Utami Puji Lestari

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA

Jl. Jend. A. Yani No. 1, Kota Bengkulu – Indonesia

Telp.: 0736 – 21735/ Fax: 0736 – 21736

Publikasi LPP Bengkulu secara *online* dapat diperoleh di
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>





Halaman ini sengaja dikosongkan



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Mei 2026 dapat selesai disusun dan dipublikasikan kepada *stakeholders* Bank Indonesia. Publikasi ini diterbitkan secara triwulanan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai Perkembangan Ekonomi Makro Daerah; Perkembangan Inflasi Daerah; Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM; Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah; Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan; dan Prospek Perekonomian Daerah.

Sebagai fokus utama pembahasan laporan, dapat kami sampaikan bahwa perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik di tengah berlanjutnya dinamika perekonomian global maupun domestik. Aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga dengan dukungan konsumsi masyarakat yang kuat, peningkatan belanja pemerintah, serta berlanjutnya aktivitas investasi pada berbagai sektor ekonomi. Pada periode laporan, ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 4,72% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 4,79% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Tetap terjaganya konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum Bulan Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, disertai meningkatnya realisasi belanja pemerintah dan berlanjutnya pembangunan berbagai infrastruktur strategis, menjadi faktor utama yang menopang kinerja ekonomi Bengkulu pada periode laporan.

Perkembangan harga di Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tetap berada dalam kondisi yang terkendali. Inflasi tercatat sebesar 2,84% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,77% (yoy). Peningkatan inflasi terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri. Meskipun demikian, inflasi Bengkulu tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional, mencerminkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi yang terus diperkuat melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.



Kata Pengantar

Sementara itu, stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu tetap terjaga dengan tingkat risiko yang berada pada level yang tetap terkendali. Intermediasi perbankan menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap kuat, khususnya pada kredit investasi yang meningkat signifikan. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatatkan pertumbuhan yang positif pada berbagai instrumen simpanan. Kondisi tersebut menunjukkan optimisme pelaku ekonomi yang tetap terjaga serta dukungan sektor keuangan terhadap aktivitas ekonomi daerah yang terus berlangsung.

Pada sisi sistem pembayaran, transformasi digital di Provinsi Bengkulu terus mengalami penguatan. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, khususnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), baik dari sisi jumlah pengguna maupun *merchant*. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya adopsi ekosistem pembayaran digital di masyarakat yang pada gilirannya mendukung efisiensi transaksi, memperkuat inklusi keuangan, serta mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Bengkulu.

Kami menyadari bahwa cakupan serta kualitas data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran membangun dari pengguna/pembaca demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Besar harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan melindungi setiap langkah kita.

Bengkulu, 3 Juni 2026
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BENGKULU

ttd.

Wahyu Yuwana Hidayat



Daftar Isi

Tim Penyusun	II
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Tabel	VIII
Daftar Gambar	IX
Daftar Grafik	X
Ringkasan Eksekutif	XII
Tabel Indikator	XV
Daftar Istilah	85

Bab I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH	1
1.1 SISI PENGGUNAAN	3
1.2 SISI LAPANGAN USAHA	11
BOKS 1	19
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2026 Sebagai Momentum Penguatan Kepatuhan Pajak, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Dan Digitalisasi Transkasi Daerah di Provinsi Bengkulu	

Bab II

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	23
2.1 INFLASI TRIWULANAN	25
2.2 INFLASI TAHUNAN (YOY)	26
2.3 INFLASI BULANAN (MTM)	30
2.4 AKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI (TPID)	33
BOKS 2	37
Tingkatkan Akseptasi Transaksi Digital di Kawasan Wisata Dan Penguatan Melalui Digitalisasi Wisata Pantai Panjang	
BOKS 3	41
Prakiraan Inflasi 2026, Strategi Pengendalian Inflasi Daerah, dan Optimalisasi Peran Kdkmp Mendukung Ketahanan Pangan	



Bab III

PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	45
3.1 GAMBARAN UMUM	47
3.2 KORPORASI DAN RUMAH TANGGA	48
3.3 PERKEMBANGAN BANK UMUM	50
3.4 PERKEMBANGAN BANK SYARIAH	52
3.5 SEKTOR UMKM	54

Bab IV

SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH	57
4.1 SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH	59
4.2 SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI	60
4.3 KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) BERIZIN	64





Bab V

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 69

5.1 KETENAGAKERJAAN 71

5.2 KEMISKINAN 73

BOKS 4 63

Tingkatkan Akseptasi Transaksi Digital di Kawasan Wisata Dan Penguatan Melalui Digitalisasi Wisata Pantai Panjang

Bab VI

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 75

6.1 PROSPEK MAKROEKONOMI 77

6.2 PROSPEK INFLASI 80



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Penggunaan (% yoy)	3
Tabel 1.2	Andil Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Penggunaan (% yoy)	3
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Lapangan Usaha (% yoy)	11
Tabel 2.1	Perkembangan Inflasi Tahunan per Kelompok	25
Tabel 2.2	Komoditas Penyumbang Inflasi Triwulan III 2025	26
Tabel 2.3	Perkembangan Inflasi Bulanan	30
Tabel 4.1	Perkembangan Pembayaran Tunai	59
Tabel 5.1	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu	71
Tabel 5.2	Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama	71
Tabel 5.3	Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Utama	71
Tabel 5.4	Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendidikan	72
Tabel 5.5	Ketenagakerjaan Berdasarkan Jam Kerja	72
Tabel 5.6	Nilai Tukar Petani	73
Tabel 5.7	Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bengkulu 2022-2025	74



Daftar Gambar

Gambar B1.1	Launching Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	19
Gambar B2.1	Pelaksanaan <i>Kick Off</i> dan <i>Capacity Building</i> BLINC 3.0 di Provinsi Bengkulu	38
Gambar B2.2	Partisipasi Provinsi Bengkulu pada Sumatra Connect 2026	39
Gambar B4.1	<i>Road To</i> Kawasan Wisata Digital Pantai Panjang (<i>Workshop Smart Code Summit</i>)	65
Gambar B4.2	<i>High Level Meeting</i> Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Provinsi Bengkulu	66
Gambar B4.3	<i>High Level Meeting</i> TP2DD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026	67
Gambar B4.4	<i>High Level Meeting</i> TP2DD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2026	67
Gambar B4.5	<i>High Level Meeting</i> TP2DD se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026	68



Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pola Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu (% yoy)	4	Grafik 2.3	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki (% yoy)	27
Grafik 1.2	Proporsi Penggunaan Penghasilan	4	Grafik 2.4	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar RT (% yoy)	27
Grafik 1.3	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	5	Grafik 2.5	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT (%yoy)	28
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen	5	Grafik 2.6	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Kesehatan	28
Grafik 1.5	Pembelian Barang Tahan Lama	5	Grafik 2.7	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Transportasi (% yoy)	28
Grafik 1.6	Pola Historis Belanja Daerah	6	Grafik 2.8	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (% yoy)	29
Grafik 1.7	Kinerja Pendapatan Daerah	6	Grafik 2.9	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya (% yoy)	29
Grafik 1.8	Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6	Grafik 2.10	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)	29
Grafik 1.9	Pertumbuhan Kredit Investasi dan Modal Kerja	7	Grafik 2.11	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran (% yoy)	30
Grafik 1.10	Realisasi Pengadaan Semen	7	Grafik 2.12	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)	30
Grafik 1.11	Realisasi PMA	7	Grafik 3.1	Perkembangan Kredit Korporasi	48
Grafik 1.12	Realisasi PMDN	7	Grafik 3.2	Perkembangan NPL Korporasi	48
Grafik 1.13	Kondisi Konstruksi SKDU	8	Grafik 3.3	Kontribusi Pertumbuhan Konsumsi RT	49
Grafik 1.14	Perkembangan Volume Ekspor Batu bara Bengkulu	8	Grafik 3.4	Perkembangan DPK Rumah Tangga	49
Grafik 1.15	Tren Harga Komoditas Batu Bara	9	Grafik 3.5	Pangsa Jenis DPK Rumah Tangga	49
Grafik 1.16	Purchasing Managers Index Negara Mitra Dagang	9	Grafik 3.6	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	50
Grafik 1.17	Volume Ekspor Karet Bengkulu	10	Grafik 3.7	Perkembangan NPL Rumah Tangga	50
Grafik 1.18	Harga Karet Global	10	Grafik 3.8	Aset Bank Umum di Provinsi Bengkulu	50
Grafik 1.19	Harga Kopi Global	10	Grafik 3.9	Aset Bank Umum Berdasarkan Kepemilikan	50
Grafik 1.20	Nilai Tukar Petani	13	Grafik 3.10	Aset Bank Berdasarkan Sistem	51
Grafik 1.21	Perkembangan Kredit Pertanian	13	Grafik 3.11	Perkembangan Total DPK Bank Umum	51
Grafik 1.22	Perkembangan Kredit Perdagangan	14	Grafik 3.12	Pertumbuhan DPK Bank Umum	51
Grafik 1.23	Perkembangan Kredit Transportasi	14	Grafik 3.13	Penyaluran Kredit Bank Umum	51
Grafik 1.24	Perkembangan Bongkar Muat Barang Pelabuhan	15	Grafik 3.14	Pangsa Kredit Bank Umum Jenis Penggunaan	52
Grafik 1.25	SBT Perkembangan Kegiatan Usaha SKDU	15	Grafik 3.15	Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan	52
Grafik 1.26	Perkembangan Kredit Konstruksi	15	Grafik 3.16	NPL Bengkulu (Lokasi Proyek)	52
Grafik 1.27	Kredit LU Industri Pengolahan	16	Grafik 3.17	LDR Bengkulu (Lokasi Proyek)	52
Grafik 1.28	Harga CPO Global	16	Grafik 3.18	Distribusi Aset Bank Syariah	53
Grafik 1.29	Tren Harga Komoditas Batu Bara	17			
Grafik 1.30	Tren Harga Acuan Komoditas Batu Bara	17			
Grafik 2.1	Perkembangan Inflasi Nasional, Pulau Sumatera dan Provinsi Bengkulu (% yoy)	25			
Grafik 2.2	Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (% yoy)	26			



Daftar Grafik

Grafik 3.19	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	53	Grafik 4.14	Perkembangan Jumlah Volume Transaksi Kartu ATM/Debet	62
Grafik 3.20	Komponen DPK Bank Syariah	53	Grafik 4.15	Perkembangan Nominal Transaksi (Juta Rp) Kartu ATM/Debet	63
Grafik 3.21	NPF dan FDR Perbankan Syariah	53	Grafik 4.16	Perkembangan Jumlah Uang Elektronik Provinsi Bengkulu	63
Grafik 3.22	Pangsa Kredit UMKM	54	Grafik 4.17	Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Transaksi	63
Grafik 3.23	Penyaluran Kredit UMKM	54	Grafik 4.18	Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Transaksi	63
Grafik 3.24	Nominal Kredit UMKM Jenis Penggunaan	54	Grafik 4.19	Pertumbuhan Pengguna QRIS di Provinsi Bengkulu Triwulan I 2026	63
Grafik 3.25	Distribusi Penyaluran Kredit UMKM Lapangan Usaha	55	Grafik 4.20	Pertumbuhan Merchant QRIS di Provinsi Bengkulu Triwulan I 2026	64
Grafik 3.26	NPL Kredit UMKM Skala Usaha	55	Grafik 4.21	Perkembangan Transaksi Valas Bengkulu (Miliar Rp)	64
Grafik 3.27	NPL Kredit UMKM Jenis Penggunaan	55	Grafik 4.22	Jenis Mata Uang Pembelian Valas Triwulan I 2026	64
Grafik 4.1	Perkembangan Transaksi Tunai di Bengkulu Periode Triwulan I 2026	59	Grafik 4.23	Jenis Mata Uang Penjualan Valas Triwulan I 2026	64
Grafik 4.2	Perkembangan Outflow dan Konsumsi RT	59	Grafik 5.1	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian	72
Grafik 4.3	Aktivitas Penarikan Triwulan I 2026	59	Grafik 5.2	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu	74
Grafik 4.4	Aktivitas Penyetoran Triwulan IV 2025	60	Grafik 5.3	Perkembangan Gini Ratio Bengkulu & Nasional	74
Grafik 4.5	Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar di Bengkulu	60			
Grafik 4.6	Perkembangan Jumlah Lembar Temuan Uang Palsu	60			
Grafik 4.7	Perkembangan Jumlah Nominal SKNBI Bengkulu	61			
Grafik 4.8	Perkembangan Jumlah Lembar Warkat SKNBI Bengkulu	61			
Grafik 4.9	Perkembangan Jumlah Nominal RTGS Bengkulu	61			
Grafik 4.10	Perkembangan Jumlah Lembar RTGS Bengkulu	61			
Grafik 4.11	Perkembangan Jumlah Volume Transaksi Kartu Kredit Bengkulu	62			
Grafik 4.12	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit (Rp miliar) Bengkulu	62			
Grafik 4.13	Perkembangan Jumlah Kartu ATM/Debet Bengkulu	62			



Ringkasan Eksekutif

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 4,72% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,79% (yoy). Secara umum, pertumbuhan tersebut ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga (RT), konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kinerja tersebut sejalan dengan tetap terjaganya konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum Ramadhan dan HBKN Idulfitri, serta meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada periode berjalan seiring optimalisasi penyerapan anggaran pembangunan layanan publik melalui pembangunan infrastruktur menjelang HBKN Idulfitri. Kondisi ini turut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi daerah melalui penguatan belanja pemerintah.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat seiring kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp2,67 juta pada tahun 2025 menjadi Rp2,83 juta pada tahun 2026, serta meningkatnya pengeluaran untuk makanan dan minuman, transportasi, dan komunikasi, serta restoran dan hotel, khususnya pada momentum Bulan Ramadhan dan HBKN Idulfitri. Kinerja investasi menunjukkan perbaikan yang ditopang dengan meningkatnya aktivitas konstruksi dengan berlanjutnya sejumlah proyek strategis kementerian/lembaga, melalui pembangunan gedung, pembangunan fisik gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta preservasi jalan, yang secara keseluruhan turut menjaga keberlanjutan investasi fisik di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, konsumsi pemerintah meningkat signifikan didorong oleh realisasi belanja pegawai melalui pencairan gaji ke-14 dan THR, serta peningkatan transfer sosial pemerintah pusat dalam bentuk barang melalui program MBG.

Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari LU Pertanian , LU Perdagangan dan transportasi. Kinerja LU Pertanian didukung oleh peningkatan produktivitas pertanian pangan, kinerja perikanan, dan perkembangan Sub Lapangan Usaha Peternakan yang semakin membaik. Selain itu, pertumbuhan sektor ini turut diperkuat oleh program perluasan lahan sawah dan program bantuan alsintan kepada petani. Selain itu, meningkatnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pasca *replanting* juga mendorong peningkatan Sub Lapangan Usaha Perkebunan, di tengah perbaikan harga TBS kelapa sawit turut mendorong pendapatan petani, sejalan dengan penetapan harga TBS oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp3.463, meningkat dari kisaran sebelumnya sekitar Rp3.173/kg. Sementara, kinerja LU Industri Perdagangan didukung oleh peningkatan penjualan kendaraan baru, khususnya sepeda motor, yang tercermin dari meningkatnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tipe I, turut mendorong kinerja perdagangan otomotif, sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas konsumsi pada momentum Ramadhan dan HBKN Idulfitri, serta perbaikan pasokan dari sektor produksi daerah. Pada LU Transportasi, pertumbuhan ditopang oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan HBKN Idulfitri yang mendorong peningkatan volume penumpang angkutan darat, udara, laut, dan penyeberangan serta turut didukung oleh kebijakan tarif angkutan lebaran 2026 yang diberlakukan secara nasional untuk menjaga daya beli dan memperlancar mobilitas masyarakat.

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan sebesar 2,85% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 2,77% (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,43% (yoy) dengan komoditas pendorong utama daging ayam ras.

Komoditas daging ayam ras menjadi pendorong inflasi utama yang disebabkan oleh berlanjutnya tekanan biaya produksi, khususnya harga bibit/DOC dan pakan, di tengah keterbatasan kapasitas pasokan lokal Bengkulu. Struktur pasokan ayam ras Bengkulu yang masih memiliki keterkaitan dengan wilayah pemasok sekitar Sumatera bagian selatan menyebabkan harga di tingkat konsumen relatif sensitif terhadap kenaikan biaya hulu dan distribusi. Di sisi permintaan, momentum Ramadan dan Idulfitri 2026 mendorong peningkatan konsumsi protein



Ringkasan Eksekutif

hewani, sehingga memperkuat tekanan harga daging ayam ras di pasar tradisional. Kondisi tersebut menjadikan daging ayam ras sebagai komoditas pangan dengan andil inflasi tahunan terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di sisi lain, kontributor penahan inflasi terbesar di Provinsi Bengkulu berasal dari kelompok pendidikan, seiring penurunan biaya sekolah setelah terbitnya Surat Edaran Gubernur No. 00.4.4/801/Dikbud/2025 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu serta kepala SMA, SMK, dan SLB di seluruh provinsi, yang menginstruksikan satuan pendidikan untuk tidak memungut uang bangunan, uang seragam, uang buku tertentu, maupun iuran dalam bentuk apapun pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pada triwulan II 2026, tekanan inflasi Provinsi Bengkulu diperkirakan stabil dengan kecenderungan bias bawah dibandingkan triwulan I 2026. Inflasi diperkirakan didorong oleh peningkatan harga komoditas hortikultura yang telah melewati masa panen dan memasuki masa tanam. Lebih lanjut, inflasi diperkirakan berasal dari dorongan permintaan pada periode long weekend di bulan Mei. Dari sisi pangan, komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan hortikultura diperkirakan relatif stabil dengan normalisasi permintaan pasca periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri di bulan sebelumnya yang mendorong kenaikan harga. Di sisi lain, TPID Provinsi Bengkulu terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi dalam menjaga keterjangkauan harga melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan satgas inflasi untuk terus mengadakan sidak terutama pada pasar dan distributor untuk menjaga ketersediaan pasokan, melaksanakan GPM 5 Tepat (Sasaran, Lokasi, Waktu, Komoditas, dan Jumlah), operasi pasar, pasar murah, dan pasokan yang terjaga melalui realisasi KAD untuk dapat membantu pengendalian inflasi sesuai target $2,5 + 1\%$.

PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu pada periode triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga dari sisi rumah tangga, korporasi dan perbankan secara umum.

Intermediasi perbankan tetap terjaga dengan ditopang oleh pertumbuhan kredit yang positif. Peningkatan tingkat *Loan to Deposit Ratio* mencerminkan peningkatan rasio penyaluran kredit yang lebih besar dibandingkan tingkat penghimpunan dana. Namun demikian, kualitas kredit tetap terjaga dengan membaiknya rasio kredit bermasalah/*Non-Performing Loan/Funding*.

Kinerja penyaluran kredit pada triwulan laporan mengalami peningkatan didorong oleh pertumbuhan kredit investasi yang meningkat signifikan dan kredit konsumsi yang terus tumbuh meski sedikit melambat.

Kinerja penghimpunan dana tercatat positif sebagaimana ditunjukkan oleh posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat pada tabungan, deposito, dan giro dengan pertumbuhan yang menguat. Sejalan dengan hal tersebut, aset perbankan tercatat tetap positif meski sedikit melambat.

Kinerja perbankan syariah cenderung meningkat disertai dengan peningkatan pangsa perbankan syariah pada triwulan laporan. Disamping itu, penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya dengan NPL yang relatif stagnan dan tetap di bawah batas aman NPL.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Aktivitas transaksi tunai di Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tercatat mengalami net outflow. Transaksi nontunai SKNBI mengalami penurunan secara *year-on-year*, sedangkan APMK debit dan kredit, uang elektronik, dan QRIS menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perluasan ekosistem digital di Provinsi Bengkulu juga terakselarasi yang ditunjukkan oleh peningkatan pengguna dan volume QRIS maupun perluasan akuisisi *merchant*.



Ringkasan Eksekutif

Transaksi pembelian dan penjualan pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di triwulan I 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Lebih lanjut, valas yang paling banyak ditransaksikan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu berturut-turut adalah Dollar Amerika Serikat (USD), *Singapore Dollar* (SGD) dan Malaysian Ringgit (MYR) dari total mata uang yang diperjualbelikan.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang relatif terjaga. Hal tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada pada level tinggi serta indikator kemiskinan yang membaik. Namun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menahan perbaikan karena penurunannya lebih dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah angkatan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan penyerapan tenaga kerja belum optimal. TPT Provinsi Bengkulu tercatat sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) masih berada pada level yang tinggi meskipun mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2026, NTP Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 204,50.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2026 diperkirakan mampu tumbuh positif pada rentang 4,61 – 4,69% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi diperkirakan tetap ditopang oleh konsumsi RT seiring kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN secara bertahap, pembayaran THR pada momentum HBKN Ramadhan dan Idulfitri, ekspektasi pencairan gaji ke-13, serta berlanjutnya bantuan sosial. Konsumsi pemerintah diperkirakan terakselerasi, didorong oleh realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti MBG. Sementara itu, PMTB/investasi diperkirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan berlanjutnya aktivitas konstruksi, preservasi jalan, pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya realisasi PMDN. Di sisi lain, ekspor diperkirakan masih tertahan akibat terbatasnya produksi dan pengapalan komoditas utama, khususnya batu bara dan karet, meskipun perbaikan harga komoditas global berpotensi menahan perlambatan lebih dalam.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), akselerasi pertumbuhan ekonomi Bengkulu tahun 2026 bersumber dari kinerja LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Transportasi. Namun tertahan oleh kinerja LU Industri Pengolahan yang diperkirakan akan tumbuh terbatas.

Dari sisi tekanan harga, inflasi di Provinsi Bengkulu pada 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya namun masih dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Inflasi diperkirakan dipengaruhi oleh pola musiman konsumsi pada paruh kedua tahun dan risiko pasokan hortikultura selama fase tanam. Sementara itu, berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) diperkirakan mampu menjaga inflasi dalam sasaran nasional.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bengkulu tahun 2026 diperkirakan menurun dibandingkan 2025 namun tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Penurunan terutama dipengaruhi oleh pola musiman konsumsi pada paruh kedua tahun dan risiko pasokan hortikultura selama fase tanam. Sementara itu, berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) diperkirakan mampu menjaga inflasi dalam sasaran nasional.



Tabel Indikator

I. PDRB ADHK											
INDIKATOR	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	FY	I	II	III	IV	FY	I
PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB SEKTORAL	4,64	4,70	4,57	4,55	4,62	4,84	4,99	4,56	4,79	4,80	4,72
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	(0,40)	6,57	1,64	2,42	2,57	5,24	3,82	4,01	3,43	4,11	5,46
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	16,57	(14,05)	4,49	1,98	2,22	-0,85	-1,68	-1,44	-11,26	-4,16	-32,30
INDUSTRI PENGOLAHAN	4,76	1,83	-2,38	2,17	1,49	6,61	9,84	9,94	11,06	9,41	4,87
PENGADAAN LISTRIK, GAS	7,94	4,13	1,23	3,13	4,04	3,97	1,71	3,93	4,45	3,51	2,54
PENGADAAN AIR	1,71	6,36	8,02	8,24	6,09	-0,22	-0,15	-1,53	2,01	0,03	0,47
KONSTRUKSI	3,74	5,33	7,97	5,37	5,63	-1,43	5,10	3,90	4,74	3,15	2,54
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	1,89	3,59	3,09	4,54	3,32	3,82	3,89	2,46	2,88	3,25	4,08
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	1,26	3,66	7,52	3,70	3,97	3,79	3,67	3,89	6,43	4,47	6,67
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	9,06	9,21	9,66	9,63	9,39	9,00	12,52	10,59	14,05	11,6	19,73
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9,02	8,86	9,48	9,55	9,23	8,92	9,43	8,33	8,07	8,69	7,61
JASA KEUANGAN	5,20	4,74	9,57	2,23	5,46	4,00	3,28	6,89	24,44	9,45	14,31
REAL ESTATE	2,73	3,59	5,35	5,35	4,27	6,47	6,57	4,18	4,41	5,38	3,25
JASA PERUSAHAAN	6,18	7,65	9,33	9,6	8,21	4,41	8,84	7,62	9,89	7,74	6,89
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	18,14	5,85	6,21	4,66	8,41	2,91	1,98	2,18	-0,33	1,69	4,07
JASA PENDIDIKAN	8,86	3,22	5,81	8,09	6,42	8,76	8,05	7,29	5,14	7,24	6,89
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	9,03	8,95	9,40	8,90	9,07	9,53	7,20	3,65	9,23	7,36	7,71
JASA LAINNYA	9,07	9,01	9,61	9,74	9,37	9,13	12,97	8,76	11,07	10,52	10,30
PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB PENGGUNAAN	4,64	4,70	4,57	4,55	4,62	4,84	4,99	4,56	4,79	4,80	4,72
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	5,52	5,16	5,06	4,79	5,13	5,59	5,65	5,19	5,26	5,42	5,94
PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT	18,43	12,03	10,64	7,75	12,05	3,26	11,35	5,61	7,35	6,86	6,42
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	18,78	4,41	6,13	5,47	8,05	-0,68	-0,14	0,26	1,35	0,28	13,79
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	0,89	1,86	4,61	3,93	2,87	1,39	4,19	3,94	4,30	3,49	4,21
PERUBAHAN INVENTORI	(228,53)	(230,06)	(750,09)	-103,7	-117,06	-96,27	1,49	-93,89	416,32	708,70	111,12
EKSPOR BARANG DAN JASA	3,96	(8,65)	1,39	-0,16	-1,04	-0,25	-1,65	-1,72	-2,43	-1,53	-6,48
IMPOR BARANG DAN JASA	1,07	3,39	3,16	4,78	3,16	1,86	0,29	0,93	0,26	0,80	2,20
EKSPOR IMPOR NON MIGAS											
NILAI EKSPOR NONMIGAS (USD JUTA)	58,76	34,85	40,63	60,18	194,42	41,30	11,35	23,64	27,18	25,86	6,63
VOLUME EKSPOR NONMIGAS (JUTA KG)	834,97	479,19	607,41	926,83	2.848,41	652,95	158,95	405,	481,62	424,64	115,41
NILAI IMPOR NONMIGAS (USD JUTA)	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOLUME IMPOR NONMIGAS (JUTA KG)	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00



Tabel Indikator

II. INFLASI TAHUNAN						
KELOMPOK	INFLASI TAHUNAN TW I 2026 (%)			ANDIL INFLASI TAHUNAN TW I 2026 (%)		
	JAN	FEB	MAR	JAN	FEB	MAR
UMUM	2,61	3,88	2,85	2,61	3,88	2,85
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	1,61	3,81	4,34	0,54	1,27	1,43
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1,00	0,76	0,32	0,06	0,04	0,02
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	12,02	16,60	6,71	1,65	2,20	0,96
PERLENGKAPAN, PERALATAN, DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	-0,05	0,02	-0,29	~0	~0	-0,01
KESEHATAN	-0,28	~0	-0,64	-0,01	~0	-0,01
TRANSPORTASI	0,87	0,22	1,16	0,12	0,03	0,15
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN	0,07	0,22	0,23	~0	0,01	0,01
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	-0,37	0,36	0,55	-0,01	0,01	0,01
PENDIDIKAN	-9,55	-9,55	-9,55	-0,50	-0,50	-0,50
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	0,95	1,39	1,82	0,09	0,14	0,18
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	12,22	12,21	10,85	0,67	0,68	0,61

III. PERBANKAN											
LOKASI PROYEK (RP MILIAR)	2023		2024				2025				2025
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
DPK GOLONGAN	18.781	18.205	17.086	17.761	18.781	18.205	18.737	19.132	19.730	19.137	19.934
PERSEORANGAN	14.395	14.903	12.849	13.624	14.395	14.903	14.673	14.803	14.731	15.223	14.968
PEMERINTAH	1.858	666	1.932	1.901	1.858	666	1.403	1.686	2.105	823	1.597
KORPORASI	2.526	2.635	2.304	2.233	2.526	2.635	2.661	2.643	2.892	3.092	3.370
DPK JENIS	18.781	18.205	17.086	17.761	18.781	18.205	18.737	19.132	19.730	19.137	19.934
GIRO	3.174	2.326	3.241	3.130	3.174	2.326	2.816	2.842	3.249	2.285	3.358
TABUNGAN	12.035	12.592	10.455	11.235	12.035	12.592	12.500	12.668	12.806	13.249	13.023
DEPOSITO	3.571	3.287	3.390	3.395	3.571	3.287	3.421	3.622	3.674	3.602	3.553
DPK PERSEORANGAN	14.396	14.903	12.848	13.626	14.396	14.903	14.673	14.803	14.731	15.223	14.968
GIRO	305	249	308	310	305	249	202	198	163	157	155
TABUNGAN	11.465	12.060	9.961	10.701	11.465	12.060	11.797	11.948	11.949	12.453	12.228
DEPOSITO	2.626	2.594	2.579	2.614	2.626	2.594	2.674	2.657	2.621	2.612	2.585
DPK PEMERINTAH	1.858	666	1.486	1.901	1.858	666	1.403	1.686	2.105	822	1.597
GIRO	1.450	529	1.365	1.557	1.450	529	1.204	1.383	1.718	645	1.445
TABUNGAN	55	18	64	88	55	18	58	83	61	22	30
DEPOSITO	352	119	57	256	352	119	142	220	327	155	122
DPK KORPORASI	2.526	2.635	2.304	2.333	2.526	2.635	2.661	2.643	2.893	3.092	3.370
GIRO	1.419	1.548	1.317	1.262	1.419	1.548	1.411	1.261	1.369	1.483	1.758
TABUNGAN	515	513	428	446	515	513	645	637	797	774	766
DEPOSITO	592	574	559	525	592	574	605	745	727	835	846



Tabel Indikator

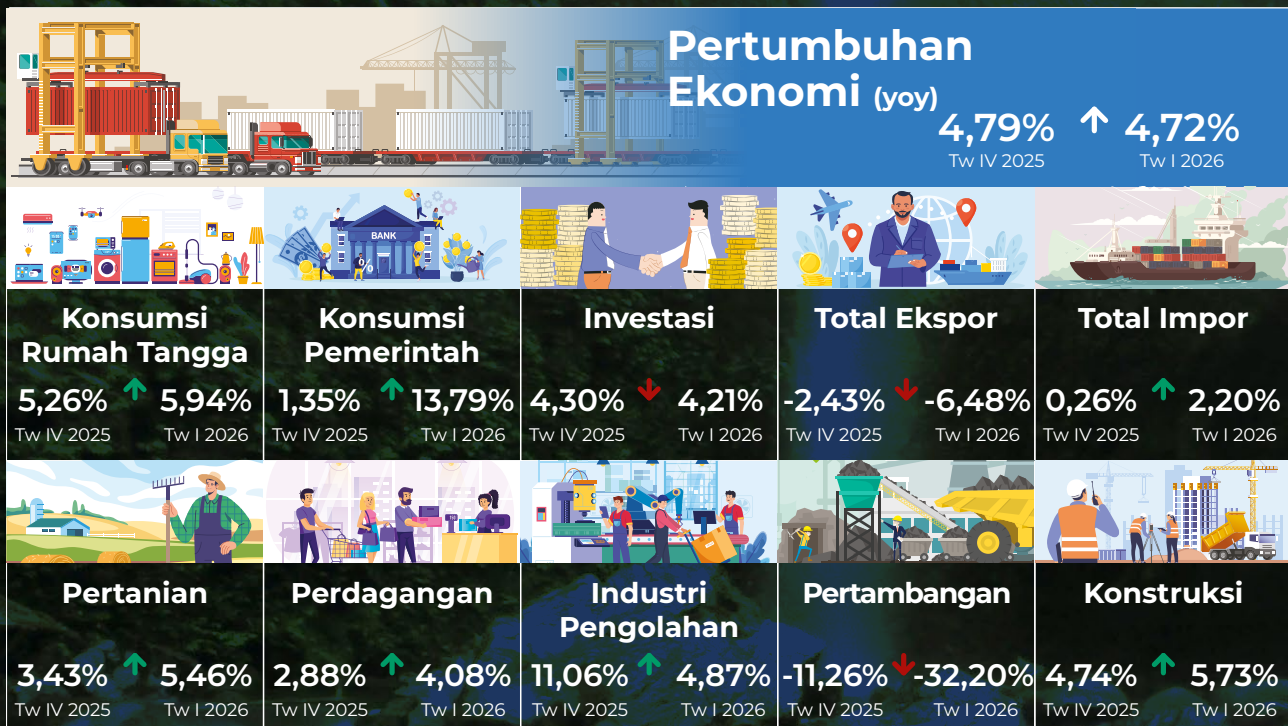
III. PERBANKAN											
LOKASI PROYEK (RP MILIAR)	2023		2024				2025				2025
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
KREDIT KORPORASI	7.122	6.954	6.600	6.422	7.122	6.954	7.135	7.169	7.480	7.563	10.022
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	1.618	1.511	1.534	1.536	1.618	1.511	1.668	1.753	1.822	1.756	2.549
PERIKANAN	31	28,64	21	21	21	19	19	20	17	17	17
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	136	398	596	413	532	616	584	364	548	513	432
INDUSTRI PENGOLAHAN	380	689	578	563	600	735	835	939	958	1.197	1.211
LISTRIK, GAS DAN AIR	1.698	1.689	1.509	1.524	1.394	1.452	1.408	1.533	1.399	1.381	3.341
KONSTRUKSI	351	322	128	180	235	325	207	247	274	232	158
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	830	898	886	895	905	949	1.067	1.082	1.098	1.120	1.067
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	339	301	303	291	334	115	106	105	102	132	151
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	130	104	95	136	363	220	223	198	203	185	185
PERANTARA KEUANGAN	233	35	61	45	41	45	40	38	35	33	27
REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	112	126	133	113	133	145	142	155	144	168	125
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
JASA PENDIDIKAN	47	45	52	49	57	57	72	76	81	66	60
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	35	31	48	66	70	97	76	63	77	80	77
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA	37	51	53	44	47	61	63	60	64	37	36
JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0
BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PENERIMA KREDIT BUKAN LAPANGAN USAHA	423	437	601	538	766	606	624	535	642	647	587
KREDIT RUMAH TANGGA	14.642	14.872	15.144	15.400	16.012	16.383	16.712	16.921	17.328	17.654	18.031
KPR/KPA	2.831	2.874	2.957	2.987	2.965	2.945	3.032	3.052	3.114	3.135	3.155
KKB	687	703	717	708	729	750	772	791	773	721	718
MULTIGUNA	6.185	6.346	6.448	6.567	6.775	7.033	7.122	7.268	7.375	7.609	7.883
LAINNYA	4.938	4.947	5.022	5.137	5.543	5.655	5.787	5.810	6.066	6.189	6.274
KREDIT UMKM	14.329	14.748	14.852	14.748	14.949	14.745	14.877	15.109	15.038	14.888	15.653
MIKRO	9.010	9.273	9.606	9.570	9.480	9.345	9.260	9.109	8.991	9.006	9.357
KECIL	4.155	4.276	4.050	4.076	4.305	4.298	4.701	4.934	5.091	5.054	4.653
MENENGAH	1.164	1.199	1.196	1.100	1.163	1.102	916	1.066	956	828	1.642
NPL (%)											
RUMAH TANGGA	1,42	1,37	1,30	2,92	1,14	1,11	1,18	1,33	1,43	1,35	1,35
KORPORASI	1,60	2,04	1,26	1,58	3,96	0,98	0,91	0,97	0,74	0,63	0,44
UMKM	2,67	2,88	2,67	2,73	3,82	2,10	2,17	2,13	2,10	1,98	1,98



BAB 1



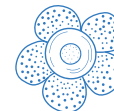
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 4,72% (yoy), meski sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,79% (yoy). Namun, pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tumbuh 5,13% (yoy), maupun nasional 5,61% (yoy). Pertumbuhan ditopang oleh kuatnya aktivitas ekonomi domestik, terutama dari sisi Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seiring meningkatnya produksi berbagai tanaman pangan, peternakan, dan perikanan laut. Sementara pada sisi kinerja pengeluaran, pertumbuhan utamanya bersumber dari Konsumsi RT pada momentum Bulan Ramadhan dan HBKN Idulfitri.

- Dari sisi pengeluaran, pada triwulan I 2026 mayoritas komponen pengeluaran utamanya konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah yang tumbuh positif kecuali komponen ekspor luar negeri yang menunjukkan kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya.
- Dari sisi lapangan usaha, pada triwulan I 2026 akselerasi pada Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Pertanian, Perdagangan serta Transportasi menopang pertumbuhan positif di tengah kinerja LU Pertambangan yang cenderung melambat pada periode pelaporan.





Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Penggunaan (% yoy)

PROVINSI: BENGKULU KOMPONEN PENGGUNAAN	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I
PDRB	4,64	4,70	4,57	4,55	4,62	4,84	4,99	4,56	4,79	4,80	4,72
KONSUMSI RUMAH TANGGA	5,52	5,16	5,06	4,79	5,13	5,59	5,65	5,19	5,26	5,42	5,94
KONSUMSI LNPRT	18,43	12,03	10,64	7,75	12,05	3,26	11,35	5,61	7,35	6,86	6,42
KONSUMSI PEMERINTAH	18,78	4,41	6,13	5,47	8,05	-0,68	-0,14	0,26	1,35	0,28	13,79
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	0,89	1,86	4,61	3,93	2,87	1,39	4,19	3,94	4,30	3,49	4,21
TOTAL EKSPOR	(228,53)	(230,06)	-739,45	-103,7	-117,06	-96,27	1,49	-93,89	416,32	708,70	111,12
TOTAL IMPOR	3,96	(8,65)	1,34	-0,16	-1,04	-0,25	-1,65	-1,72	-2,43	-1,53	-6,48
TOTAL IMPOR	1,07	3,39	3,16	4,76	3,16	1,86	0,29	0,94	0,26	0,80	2,20

Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.2 Andil Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Penggunaan (% yoy)

PROVINSI: BENGKULU KOMPONEN PENGGUNAAN	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I
PDRB	4,64	4,70	4,57	4,55	4,62	4,84	4,99	4,56	4,79	4,80	4,72
KONSUMSI RUMAH TANGGA	3,58	3,36	3,25	3,09	3,32	3,68	3,72	3,37	3,46	3,57	3,91
KONSUMSI LNPRT	0,50	0,31	0,29	0,22	0,33	0,10	0,34	0,17	0,22	0,21	0,19
KONSUMSI PEMERINTAH	2,96	0,83	1,06	1,21	1,50	-0,12	-0,02	0,04	0,23	0,05	2,34
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	0,39	0,76	2,02	1,72	1,23	0,56	1,70	1,72	1,74	1,41	1,71
PERUBAHAN INVENTORI	0	0	0	1,56	0,61	0,06	0,00	0,00	-0,42	-0,71	-0,11
TOTAL EKSPOR	1,34	-3,14	0,48	-0,06	-0,36	-0,08	-0,53	-0,54	-0,78	-0,49	2,07
TOTAL IMPOR	0,66	2,09	1,99	3,19	2,01	1,08	0,17	0,56	0,15	0,47	1,28

Sumber: BPS, diolah

1.1 SISI PENGGUNAAN

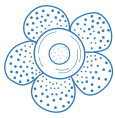
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 4,72% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,79% (yoy). Pertumbuhan ditopang oleh komponen konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) seiring kuatnya aktivitas ekonomi domestik pada momentum Ramadhan dan HBKN Idulfitri.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yakni sebesar 3,91%, pertumbuhan tersebut turut didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat seiring kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp2,67 juta pada tahun 2025 menjadi Rp2,83 juta pada tahun 2026, serta meningkatnya pengeluaran untuk makanan dan minuman, transportasi, dan komunikasi, serta restoran dan hotel, khususnya pada momentum Bulan Ramadhan dan HBKN Idulfitri (Grafik 1.2).

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan I 2026 meingkat signifikan, sejalan dengan realisasi belanja pegawai melalui pencairan gaji ke-14 dan THR bagi PNS, TNI, dan Polri serta meningkatnya transfer sosial pemerintah pusat dalam bentuk barang melalui progam Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun tertahan oleh penurunan realisasi dana desa dan terbatasnya belanja daerah akibat penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Daerah seiring pemotongan Transfer Dana ke Daerah (TKD).

Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/ Investasi pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh positif sebesar 4,21% (yoy), didukung oleh berlanjutnya aktivitas konstruksi serta pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Selain itu, kinerja investasi juga ditopang oleh adanya indikasi peningkatan minat investasi terhadap sejumlah proyek strategis daerah, khususnya pengembangan Kawasan Industri Pulau Baai yang mulai menarik perhatian pelaku usaha dari sektor CPO, pertambangan, dan industri pengolahan. Prospek pengembangan kawasan tersebut semakin diperkuat

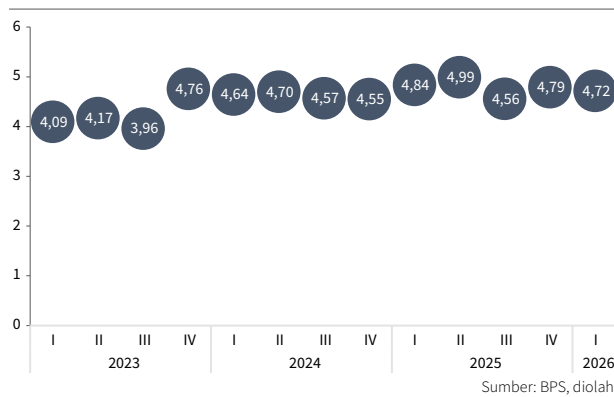




oleh dukungan penyediaan lahan dari PT Pelindo serta komitmen sejumlah pelaku usaha untuk memanfaatkan Pelabuhan Pulau Baai sebagai bagian dari rantai logistik dan aktivitas usaha. Namun, realisasi investasi masih belum optimal karena sebagian proyek masih berada dalam tahap penyiapan, antara lain penyelesaian studi kelayakan, pemenuhan aspek perizinan, serta proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Di sisi lain, kinerja ekspor tercatat berkontraksi lebih dalam sebesar 6,48% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya 2,43% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya volume ekspor komoditas utama, khususnya batubara (HS 27) dan karet (HS 40).

Pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 sebesar 4,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 4,79% (yoy). (Grafik 1.1). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen selain ekspor yang masih berkontraksi. Secara proporsi, konsumsi rumah tangga tetap menjadi komponen utama penyumbang pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 3,91% (yoy), disusul oleh konsumsi pemerintah dengan andil sebesar 2,34% (yoy).



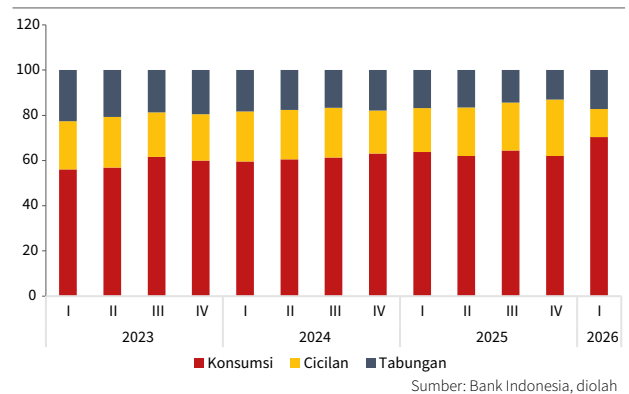
Grafik 1.1 Pola Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu (% yoy)

Konsumsi Rumah Tangga

Kinerja Konsumsi RT pada periode pelaporan mengalami akselerasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat pada momentum Ramadhan dan HBKN Idulfitri 1447 H, serta didukung oleh pencairan THR dan berbagai insentif lainnya yang turut memperkuat daya beli masyarakat.

Konsumsi rumah tangga pada periode laporan tumbuh sebesar 5,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,26% (yoy). Dengan tingkat pertumbuhan ini, konsumsi rumah tangga memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,91%. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, turut didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada Ramadhan dan HBKN Idulfitri.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei indeks konsumsi masyarakat, proporsi penggunaan penghasilan untuk konsumsi tercatat meningkat menjadi 70,34%, sementara porsi untuk cicilan pinjaman menurun menjadi 12,51%, dan porsi tabungan turut meningkat menjadi 17,15% (Grafik 1.2).

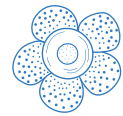


Grafik 1.2 Proporsi Penggunaan Penghasilan

Komposisi tersebut mengindikasikan bahwa daya beli dan kecenderungan konsumsi masyarakat meningkat, tercermin dari naiknya porsi penghasilan yang digunakan untuk konsumsi, sementara penurunan porsi cicilan menunjukkan beban kewajiban rumah tangga relatif lebih rendah, dan kenaikan porsi tabungan mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki ruang untuk menjaga ketahanan keuangan di tengah peningkatan aktivitas konsumsi.

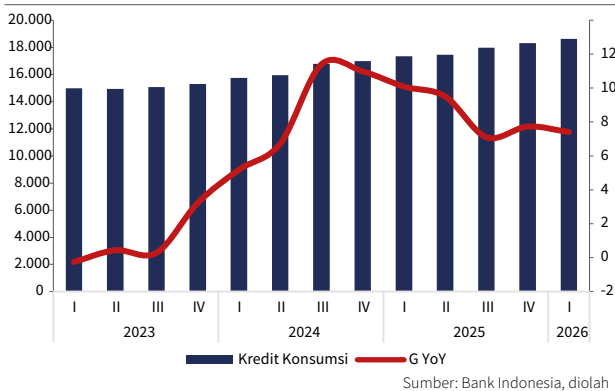
Pada triwulan I 2026, membaiknya harga komoditas kelapa sawit turut menopang pendapatan masyarakat, khususnya rumah tangga petani di Provinsi Bengkulu, sehingga berdampak positif terhadap kinerja konsumsi rumah tangga. Kondisi tersebut sejalan dengan masih kuatnya kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh positif sebesar 5,46% (yoy) dan tetap menjadi sektor utama dalam struktur ekonomi





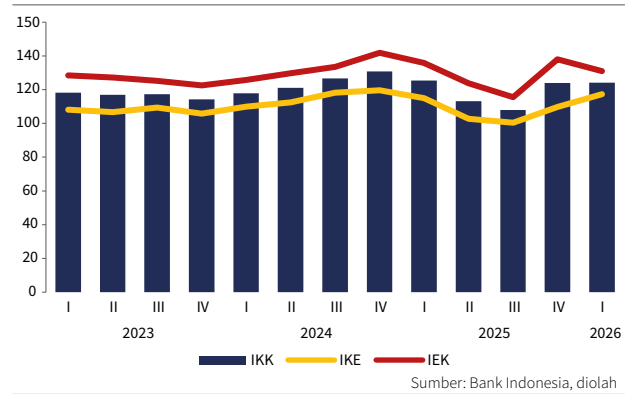
Bengkulu. Dukungan terhadap pendapatan petani juga tercermin dari penetapan harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu dibantu oleh Tim Penetapan Harga Pembelian sebesar Rp3.463 per kilogram pada April 2026, meningkat dari periode sebelumnya yang berada di kisaran Rp3.173 per kilogram. Penetapan harga yang lebih tinggi tersebut memberikan kepastian harga bagi petani, membantu menjaga stabilitas pendapatan, serta memperkuat kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Di sisi eksternal, perbaikan harga TBS turut dipengaruhi oleh tren kenaikan harga CPO global yang meningkat dari USD1.002,30 per metrik ton pada triwulan IV 2025 menjadi USD1.022,51 per metrik ton pada Februari 2026, sehingga memberikan sentimen positif terhadap prospek komoditas sawit di daerah.

Peningkatan porsi tabungan masyarakat menjadi 17,15% di tengah perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi rumah tangga mengindikasikan bahwa penguatan konsumsi pada periode pelaporan lebih banyak ditopang oleh peningkatan pendapatan dan likuiditas rumah tangga, antara lain dari pencairan THR, insentif, serta perbaikan pendapatan sektor pertanian/perkebunan, dan bukan berasal dari ekspansi pembiayaan konsumtif. Kondisi ini mencerminkan ketahanan keuangan rumah tangga yang terjaga, dengan kecenderungan masyarakat untuk tetap menyisihkan sebagian penghasilan sebagai tabungan meskipun aktivitas konsumsi meningkat. Di sisi lain, perlambatan kredit konsumsi juga dapat mengindikasikan sikap rumah tangga yang lebih selektif dan berhati-hati dalam menambah kewajiban, sehingga konsumsi tumbuh lebih sehat karena tidak disertai peningkatan beban utang secara berlebihan (Grafik 1.3).



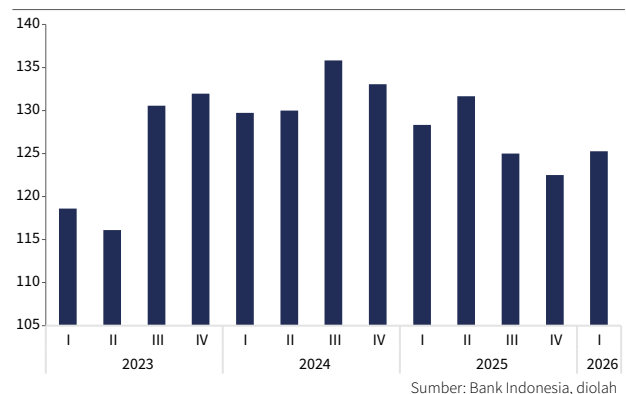
Grafik 1.3 Perkembangan Kredit Rumah Tangga

Lebih lanjut, persepsi konsumsi masyarakat pada triwulan I 2026 tercatat meningkat. Kondisi ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 124,12, Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE) sebesar 117,31; dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 130,92 atau berada di atas batas persepsi positif (100). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penguatan keyakinan konsumen yang berimplikasi pada peningkatan preferensi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, antara lain tercermin pada akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga (Grafik 1.4).



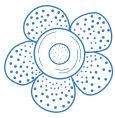
Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen

Lebih lanjut, perubahan struktur rumah tangga tersebut berdampak pada menguatnya pembelian barang tahan lama dengan indeks sebesar 135,83. Hal ini mengindikasikan bahwa keyakinan dan daya beli masyarakat relatif terjaga, sehingga rumah tangga tidak hanya meningkatkan konsumsi untuk kebutuhan harian, tetapi juga mulai merealisasikan pembelian barang bernilai lebih besar dan berjangka panjang, sejalan dengan membaiknya pendapatan serta likuiditas masyarakat pada periode pelaporan (Grafik 1.5).



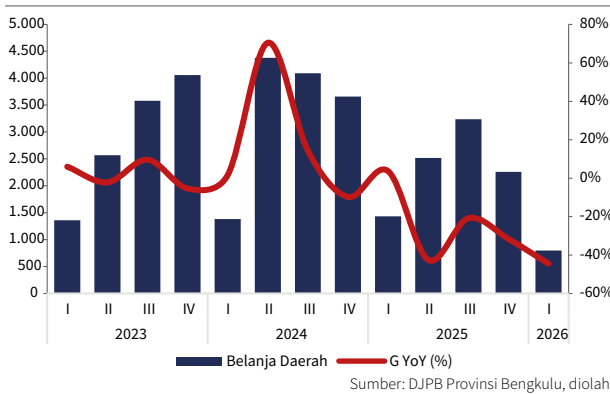
Grafik 1.5 Pembelian Barang Tahan Lama





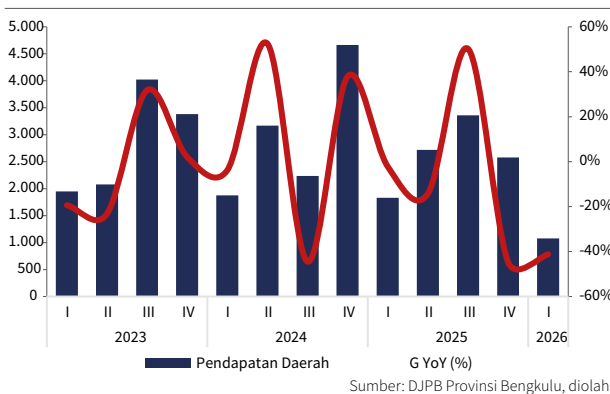
Konsumsi Pemerintah

Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2026 terakselerasi sebesar 13,79% (yoy). Kondisi ini didorong oleh realisasi belanja pegawai melalui pencairan gaji ke-14 dan THR, serta peningkatan transfer sosial pemerintah pusat dalam bentuk barang melalui program MBG. Berdasarkan realisasi APBD konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/kota pada triwulan I 2026, belanja daerah tercatat sebesar Rp1.607,70 miliar atau 44,51% dari target, tumbuh positif, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. (Grafik 1.6). Realisasi belanja daerah hingga 31 Maret 2026 masih didominasi oleh belanja operasional dan program prioritas, sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta kualitas layanan publik.



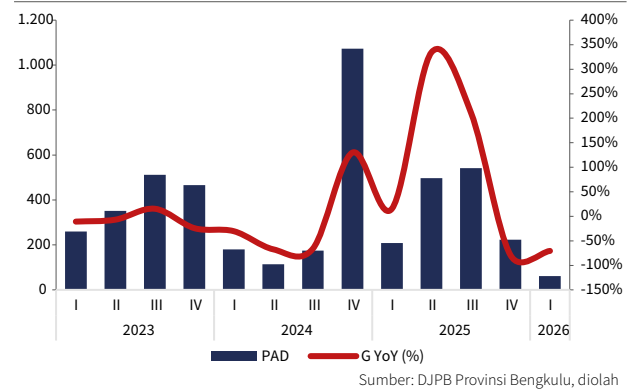
Grafik 1.6 Pola Historis Belanja Daerah

Sementara itu, pendapatan daerah berdasarkan APBD konsolidasi pada triwulan I 2026 tercatat mengalami kontraksi yang signifikan sebesar 41,20%, menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,18%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai sekitar Rp 1.077,83 miliar dari target APBD yang telah ditetapkan.



Grafik 1.7 Kinerja Pendapatan Daerah

Berdasarkan komponennya, realisasi pendapatan daerah dari aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp138,52 miliar atau 5,97% dari target. Pendapatan transfer turut menjadi kontributor utama pendapatan daerah mencapai Rp937,21 miliar atau 10,18% dari pagu.



Grafik 1.8 Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja APBD Konsolidasi Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I 2026 menunjukkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.077,83 miliar, sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp1.607,67 miliar. Akibatnya, posisi fiskal mengalami defisit anggaran sebesar Rp529,84 miliar per 31 Maret 2026.

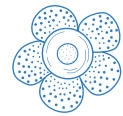
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/ Investasi yang mencerminkan kegiatan investasi pada triwulan I 2026 tumbuh meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

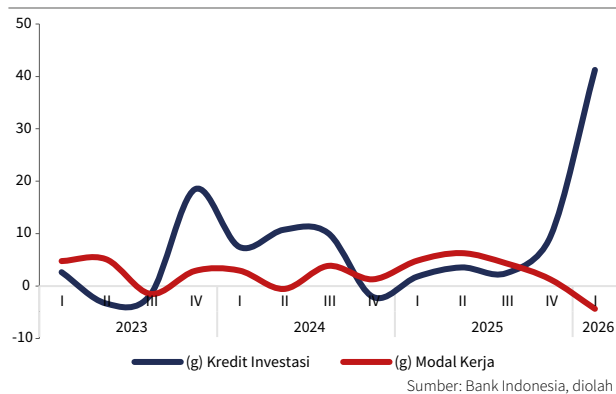
Pada triwulan I, komponen PMTB/investasi tumbuh positif sebesar 4,21% (yoy), meskipun sedikit melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,30%(yoy). Kinerja tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi yang ditopang oleh berlanjutnya sejumlah proyek strategis kementerian/lembaga, antara lain pembangunan gedung, pembangunan fisik gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta preservasi jalan, yang secara keseluruhan turut menjaga keberlanjutan investasi fisik di Provinsi Bengkulu

Dari sisi pembiayaan, kredit investasi pada triwulan I 2026 terakselerasi signifikan sebesar 41,24% (yoy), sejalan dengan masih berlanjutnya aktivitas investasi fisik dan meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Bengkulu. Hal ini juga searah dengan kinerja PMTB yang tetap tumbuh positif.



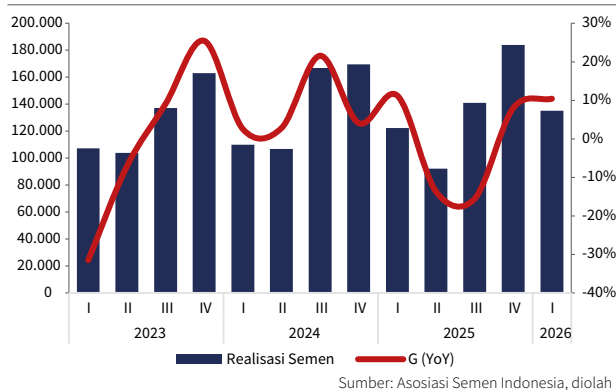


Di sisi lain, kredit modal kerja terkontraksi sebesar 4,34% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang masih tumbuh sebesar 1,27% (yoy) (Grafik 1.9). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya pergeseran kebutuhan pembiayaan pelaku usaha dari pembiayaan operasional jangka pendek menuju pembiayaan ekspansi jangka menengah-panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi dan kebutuhan persediaan belum meningkat secara merata di seluruh sektor, sehingga pelaku usaha masih cenderung berhati-hati dalam menambah pembiayaan operasional. Dengan demikian, perkembangan pembiayaan pada periode laporan mencerminkan proses pemulihan ekonomi Bengkulu yang terus berlangsung, tetapi masih bersifat selektif dan belum merata antar sektor usaha.



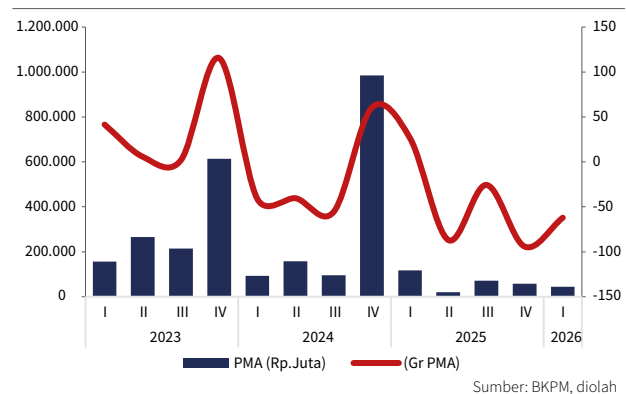
Grafik 1.9 Pertumbuhan Kredit Investasi dan Modal Kerja

Indikator realisasi pengadaan semen pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh lebih tinggi sebesar 10,42% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.10). Peningkatan tersebut mengindikasikan menguatnya aktivitas konstruksi dan realisasi investasi fisik di daerah, terutama pada proyek pembangunan gedung, infrastruktur, serta kegiatan konstruksi lainnya, sejalan dengan akselerasi kredit investasi pada periode yang sama.



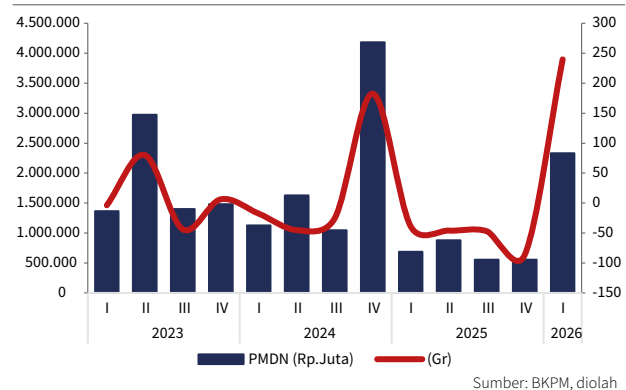
Grafik 1.10 Realisasi Pengadaan Semen

Namun, di sisi lain, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 masih terkontraksi sebesar 62,11% (yoy) dengan nilai mencapai USD2.680 juta, meskipun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 94,17% (yoy) dengan nilai USD 3.59 juta (Grafik 1.11). Penurunan ini turut menyebabkan belum optimalnya akselerasi investasi secara keseluruhan, khususnya dari sisi investasi eksternal, sehingga kinerja PMTB pada periode laporan masih cenderung tertahan meskipun tetap tumbuh positif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan investasi di Bengkulu masih lebih banyak ditopang oleh aktivitas konstruksi, pembiayaan investasi domestik, dan proyek pemerintah, sementara realisasi investasi asing masih terbatas seiring proses penyiapan proyek strategis, kepastian regulasi, serta kesiapan infrastruktur pendukung investasi.



Grafik 1.11 Realisasi PMA

Sementara, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 195,80% (yoy), sangat tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 40,90% (yoy) (Grafik 1.12).

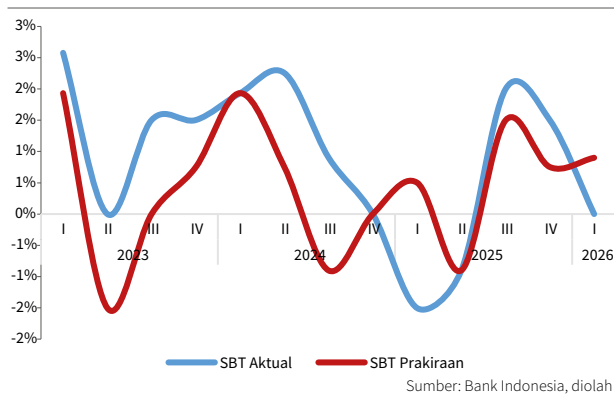


Grafik 1.12 Realisasi PMDN





Sementara itu, Hasil Survei Kegiatan Dana Usaha (SKDU), khususnya pada LU konstruksi, menunjukkan adanya pelemahan yang tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang berkontraksi sebesar 3,61%, berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif sebesar 1,50%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa peningkatan indikator investasi fisik belum sepenuhnya merata pada seluruh pelaku usaha konstruksi, sehingga aktivitas konstruksi pada periode laporan masih lebih banyak ditopang oleh proyek tertentu, khususnya proyek pemerintah dan infrastruktur, sementara kegiatan konstruksi swasta dan proyek baru masih cenderung terbatas.



Grafik 1.13 Kondisi Konstruksi SKDU

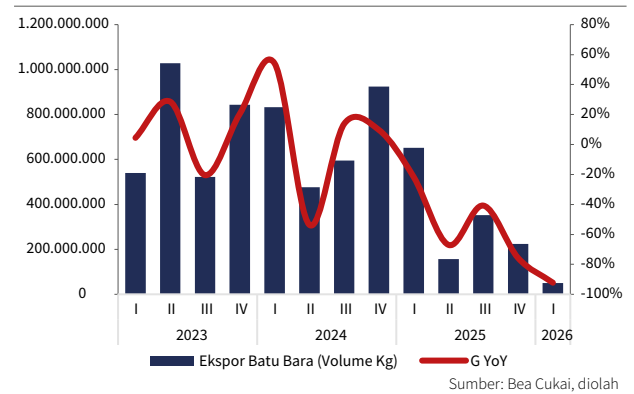
Kegiatan Ekspor-Impor

Kinerja komponen Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2025 melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dipengaruhi nilai ekspor komoditas utama ke luar negeri menurun.

Kinerja komponen ekspor barang dan jasa Bengkulu mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 6,48% (yoy) pada triwulan I 2026, atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,43% (yoy). Berdasarkan data Direktorat Jendral Bea dan Cukai, volume ekspor luar negeri Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 masih didominasi oleh komoditas batu bara dan karet sebagai komoditas utama ekspor daerah (Grafik 1.14).

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya volume ekspor komoditas utama, terutama batu bara dan karet, seiring masih terbatasnya aktivitas pengapalan serta proses penyesuaian persetujuan RKAB sektor

pertambangan di tengah kebijakan pemerintah pusat yang menata ulang target produksi batu bara nasional tahun 2026. Kondisi ini menyebabkan kinerja ekspor luar negeri Provinsi Bengkulu belum pulih optimal, tercermin dari nilai ekspor triwulan I 2026 yang masih berkontraksi secara tahunan, sehingga menahan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari sisi pengeluaran.

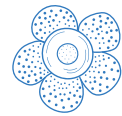


Grafik 1.14 Perkembangan Volume Ekspor Batu bara Bengkulu

cara volume, ekspor komoditas batubara pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 92,26% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 49,08% (yoy) (Grafik 1.15). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya produksi batu bara di Bengkulu akibat tertahannya operasional sejumlah pelaku usaha tambang seiring proses persetujuan dan penerbitan RKAB, di tengah kebijakan pemerintah pusat yang menata ulang target produksi batu bara nasional dari realisasi sekitar 790 juta ton pada 2025 menjadi kurang lebih 600 juta ton pada 2026. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya volume pengapalan batu bara, khususnya bagi perusahaan tambang swasta yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Bengkulu, sehingga operasional produksinya sangat bergantung pada persetujuan RKAB dan alokasi volume produksi, sehingga turut menekan kinerja ekspor luar negeri Provinsi Bengkulu pada periode laporan.

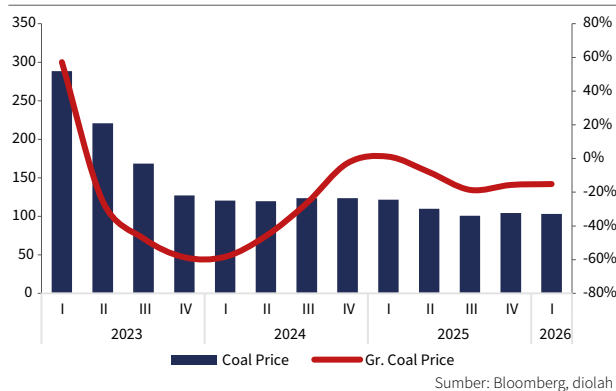
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kinerja ekspor batubara sebagai salah satu kontributor utama devisa daerah, tetapi juga menimbulkan efek terhadap rantai pasok, melemahnya nilai ekspor daerah, berkurangnya penerimaan daerah, serta berdampak pada penurunan permintaan kredit pada sektor-sektor terkait.





Sementara itu, dari sisi global, prospek perdagangan komoditas energi, termasuk batubara, pada triwulan I 2026 menghadapi tekanan akibat permintaan impor yang cenderung tertahan dari negara konsumen utama seperti Tiongkok dan India seiring peningkatan produksi domestik dan level persediaan yang memadai pada negara tersebut, di tengah harga batu bara global yang relatif meningkat akibat konflik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dan biaya pengapalan. Kondisi tersebut menyebabkan peluang perbaikan harga belum sepenuhnya tertransmisikan pada peningkatan volume ekspor Bengkulu, mengingat kinerja ekspor batu bara daerah masih tertahan oleh faktor domestik, terutama keterbatasan produksi dan pengapalan seiring proses persetujuan RKAB serta penyesuaian target produksi nasional.

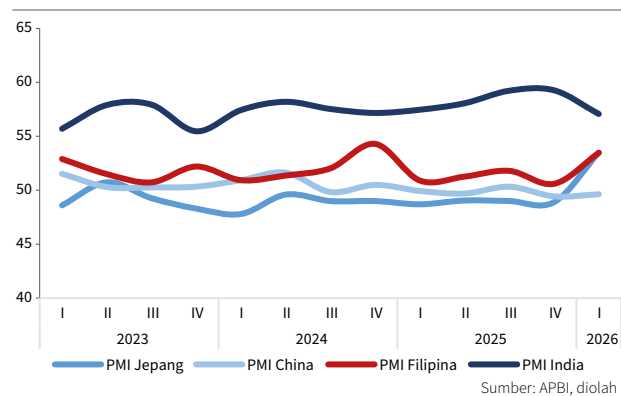
Harga batu bara global pada triwulan I tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan rata-rata mencapai USD 103,09/metrik ton, namun secara pertumbuhan, harga menunjukkan perbaikan seiring tren kenaikan pada akhir triwulan. Perbaikan tersebut sejalan dengan mulai menguatnya harga batu bara acuan global pada Februari–Maret 2026, di tengah meningkatnya risiko pasokan energi global serta ekspektasi penyesuaian produksi dari sejumlah negara eksportir.



Grafik 1.15 Tren Harga Komoditas Batu Bara

Ketidakpastian global turut memberikan tekanan terhadap arus investasi dan kinerja perdagangan internasional. Pada triwulan I 2026, PMI India tercatat sebesar 57,07, melandai dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 59,27, meskipun masih berada pada zona ekspansif. Sementara itu, PMI Filipina meningkat dari 50,60 menjadi 53,47 dan PMI Jepang kembali menguat dari 48,90 menjadi 53,50 (Grafik 1.16).

Kondisi negara tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur mitra dagang utama masih berada dalam fase ekspansif, namun dengan arah pemulihan yang beragam. PMI India yang tetap tinggi meskipun melandai menunjukkan bahwa permintaan industri masih kuat, tetapi mulai mengalami normalisasi. Sementara itu, peningkatan PMI Filipina dan Jepang hingga berada di zona ekspansif mencerminkan perbaikan aktivitas produksi dan permintaan manufaktur di kawasan. Secara keseluruhan, kondisi ini memberi sinyal bahwa prospek permintaan eksternal masih relatif terjaga, namun belum sepenuhnya solid dan merata, sehingga dampaknya terhadap kinerja ekspor Bengkulu, khususnya komoditas utama seperti batu bara dan karet, masih terbatas.

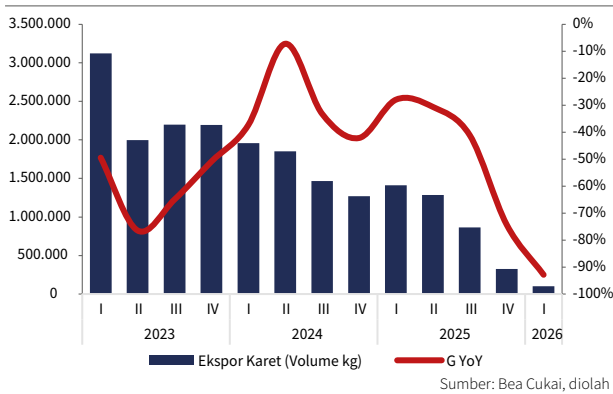


Grafik 1.16 Purchasing Managers Index Negara Mitra Dagang

Selanjutnya, ekspor komoditas karet masih menunjukkan tren penurunan dimana pada triwulan I 2026 berkontraksi lebih dalam sebesar 92,86% (yoy) (Grafik 1.17). Pelemahan ini sejalan dengan masih terbatasnya pasokan dan pengapalan karet dari daerah, tercermin dari nilai ekspor kelompok karet dan barang dari karet dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh produktivitas karet yang belum optimal, termasuk pada sentra produksi karet Bengkulu yang masih memerlukan pembenahan teknis dan peningkatan konsistensi produksi.

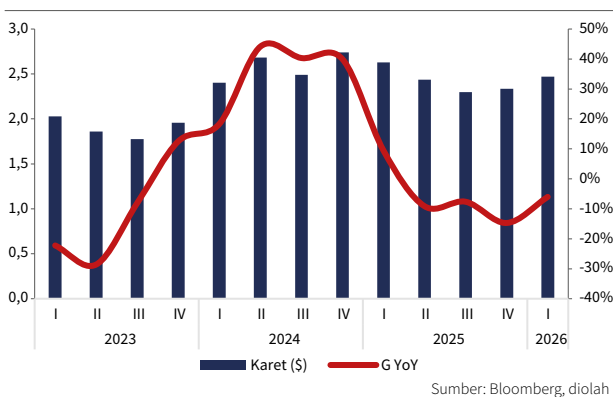
Di sisi eksternal, meskipun harga karet global relatif membaik akibat pasokan yang ketat, perbaikan harga belum sepenuhnya tertransmisikan pada peningkatan volume ekspor Bengkulu karena produksi karet nasional masih menghadapi tekanan struktural, termasuk beralihnya sebagian petani ke komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan seperti kelapa sawit.





Grafik 1.17 Volume Ekspor Karet Bengkulu

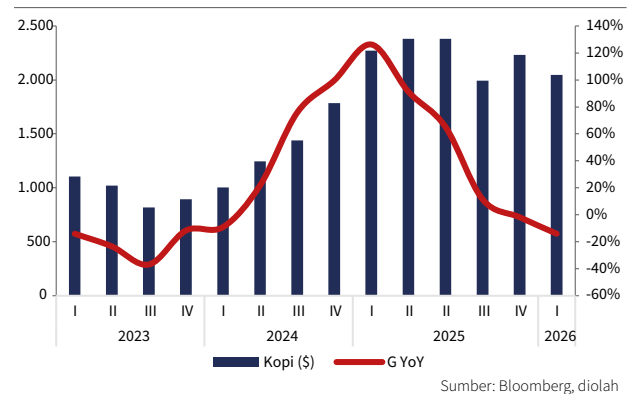
Harga karet dunia pada triwulan I 2026 adalah USD2,47 per kg atau meningkat 1,39% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih berkontraksi sebesar 8,72% (yoy) (Grafik 1.18). Lebih lanjut, perbaikan harga tersebut mengindikasikan mulai membaiknya sentimen pasar karet global, terutama dipengaruhi oleh pasokan yang relatif ketat akibat gangguan produksi di beberapa negara produsen utama, faktor cuaca, serta masih berlanjutnya defisit pasokan karet alam global. Namun demikian, perbaikan harga dunia belum sepenuhnya tertransmisikan terhadap kinerja ekspor karet Bengkulu, mengingat volume ekspor pada periode laporan masih berkontraksi dalam, sehingga tekanan ekspor lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan produksi dan pengapalan dari sisi domestik dibandingkan faktor harga global.



Grafik 1.18 Harga Karet Global

Di sisi lain, komoditas kopi menunjukkan penurunan harga dalam periode pelaporan. Harga komoditas kopi dunia pada triwulan I 2026 yang berkontraksi sebesar 14%

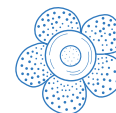
(yoy), terutama dipengaruhi oleh membaiknya prospek pasokan global seiring peningkatan produksi di negara produsen utama serta ekspektasi surplus pasokan kopi dunia. Kondisi tersebut menahan potensi kenaikan pendapatan dari sisi harga ekspor, termasuk bagi daerah sentra kopi seperti Provinsi Bengkulu yang merupakan produsen kopi terbesar ke-5 nasional dengan produksi sekitar 55 ribu ton atau 7,23% dari total produksi Indonesia pada 2023. Namun demikian, dampak penurunan harga global terhadap petani kopi Bengkulu diperkirakan relatif tertahan karena harga kopi lokal masih berada pada level yang cukup tinggi, khususnya robusta, meskipun tantangan kualitas, standardisasi, dan konsistensi pasokan masih menjadi faktor pembatas dalam mengoptimalkan nilai tambah dan daya saing kopi Bengkulu.



Grafik 1.19 Harga Kopi Global

Kinerja impor Bengkulu pada triwulan I 2026 tercatat meningkat dibandingkan triwulan IV 2025, dengan pertumbuhan sebesar 2,20% (yoy), lebih tinggi dari capaian pada periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,26% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga, yang mendorong kenaikan kebutuhan pasokan barang konsumsi dari luar wilayah Bengkulu. Namun, akselerasi impor masih tertahan oleh menurunnya kebutuhan barang modal, seperti peralatan, mesin, dan aset tetap lainnya, sejalan dengan belum optimalnya realisasi investasi pada sebagian proyek. Kondisi ini menyebabkan peningkatan impor, khususnya impor antarwilayah, masih relatif terbatas meskipun permintaan domestik tetap terjaga.





Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

PROVINSI: BENGKULU KOMPONEN PENGGUNAAN	2023	2024					2025					2026
	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I
PDRB	4,26	4,64	4,70	4,57	4,55	4,62	4,84	4,99	4,56	4,79	4,80	4,72
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2,06	(0,40)	6,57	1,64	2,42	2,57	5,24	3,82	4	3,43	4,11	5,46
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	7,85	16,57	(14,05)	4,49	1,98	2,22	-0,85	-1,68	-1,44	-11,26	-4,16	-32,20
INDUSTRI PENGOLAHAN	1,83	4,76	1,83	-2,38	2,17	1,49	6,61	9,84	9,94	11,06	9,41	4,87
PENGADAAN LISTRIK, GAS	3,96	7,94	4,13	1,23	3,13	4,04	3,97	1,71	3,93	4,45	3,51	2,54
PENGADAAN AIR	4,57	1,71	6,36	8,02	8,24	6,09	-0,22	-0,15	-1,53	2,01	0,03	0,47
KONSTRUKSI	5,04	3,74	5,33	7,97	5,37	5,63	-1,43	5,10	3,9	4,74	3,15	5,73
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	3,05	1,89	3,59	3,09	4,54	3,32	3,82	3,89	2,46	2,88	3,25	4,08
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	7,22	1,26	3,66	7,52	3,70	3,97	3,79	3,67	3,89	6,43	4,47	6,67
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	9,88	9,06	9,21	9,66	9,63	9,39	9,00	12,52	10,59	14,05	11,6	19,73
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9,61	9,02	8,86	9,48	9,55	9,23	8,92	9,43	8,33	8,07	8,69	7,61
JASA KEUANGAN	(5,09)	5,20	4,74	9,57	2,23	5,46	4,00	3,28	6,89	24,44	9,45	14,31
REAL ESTATE	5,26	2,73	3,59	5,35	5,35	4,27	6,47	6,57	4,18	4,41	5,38	3,25
JASA PERUSAHAAN	7,84	6,18	7,65	9,33	9,6	8,21	4,41	8,84	7,62	9,89	7,74	6,89
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	6,16	18,14	5,85	6,21	4,66	8,41	2,91	1,98	2,18	-0,33	1,69	4,07
JASA PENDIDIKAN	4,88	8,86	3,22	5,81	8,09	6,42	8,76	8,05	7,29	5,14	7,24	6,89
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	8,61	9,03	8,95	9,40	8,90	9,07	9,53	7,20	3,65	9,23	7,36	7,71
JASA LAINNYA	9,93	9,07	9,01	9,61	9,74	9,37	9,13	12,97	8,76	11,07	10,52	10,30

Sumber: BPS, diolah

1.2 SISI LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 tetap tumbuh positif sebesar 4,72% (yoy), meskipun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya.

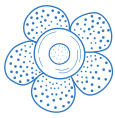
Pada triwulan I 2026, tercatat sebanyak 16 lapangan usaha (LU) di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan positif. Secara persentase, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi serta Jasa Lainnya. Sementara itu, dari sisi sumber pertumbuhan, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor utama, diikuti oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Transportasi dan Pergudangan.

Kinerja kuat pada ketiga lapangan usaha tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 ditopang oleh dua pola utama, yaitu akselerasi sektor jasa yang sensitif terhadap peningkatan mobilitas dan aktivitas konsumsi masyarakat, serta kuatnya kontribusi sektor-sektor utama yang memiliki pangsa besar dalam struktur ekonomi daerah. Tingginya pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta

Jasa Lainnya mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pada momentum Ramadhan dan HBKN Idulfitri. Sementara itu, dominannya sumber pertumbuhan dari LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan menunjukkan bahwa mesin utama perekonomian Bengkulu masih ditopang oleh sektor primer, aktivitas perdagangan domestik, dan mobilitas barang maupun masyarakat.

Sementara di sisi kinerja LU Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi yang lebih dalam, terutama dipengaruhi oleh penurunan volume produksi batu bara seiring tertahannya aktivitas operasional tambang akibat proses persetujuan dan penerbitan RKAB pada triwulan I 2026. Kondisi tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menata ulang kuota produksi batu bara nasional melalui revisi RKAB 2026, dari realisasi produksi sekitar 790 juta ton pada 2025 menjadi kurang lebih 600 juta ton pada 2026, sebagai upaya menjaga keseimbangan pasokan dan harga batu bara. Akibatnya, ruang produksi dan pengapalan batu bara di Bengkulu menjadi lebih terbatas, sehingga menekan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.





LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan seiring dengan masuknya musim panen raya untuk komoditas pertanian dan tanaman pangan.

Kondisi tersebut juga didorong oleh meningkatnya produktivitas pertanian pangan, kinerja perikanan, dan perkembangan Sub Lapangan Usaha Peternakan yang semakin membaik. Pertumbuhan cenderung tertahan oleh kinerja Sub Lapangan Usaha Kehutanan yang menurun, yang dipengaruhi oleh permintaan domestik kayu yang mengalami penurunan.

Secara siklus, untuk kinerja Sub Lapangan Usaha Tanaman Pangan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yang terjadi pada bulan Januari dan Maret 2026. Dorongan juga berasal dari program perluasan lahan sawah dan program bantuan alsintan kepada petani. Lebih lanjut, meningkatnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pasca *replanting* juga mendorong peningkatan Sub Lapangan Usaha Perkebunan.

Pada triwulan I 2026, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 5,46% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,43% (yoy).

Peningkatan produksi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan I 2026 didukung oleh kondisi cuaca yang relatif membaik dibandingkan triwulan sebelumnya, serta berlangsungnya periode panen pada awal tahun, tercermin dari potensi produksi padi Bengkulu Januari–Maret 2026 yang diperkirakan mencapai 73,53 ribu ton GKG dengan luas panen 14,25 ribu hektare. Kondisi tersebut turut menjaga kinerja sektor pertanian Bengkulu yang tetap tumbuh positif dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, pada subsektor perkebunan, perbaikan harga TBS kelapa sawit turut mendorong pendapatan petani, sejalan dengan penetapan harga TBS oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp3.463, meningkat dari kisaran sebelumnya sekitar Rp3.173/kg. Kenaikan harga TBS tersebut dipengaruhi oleh

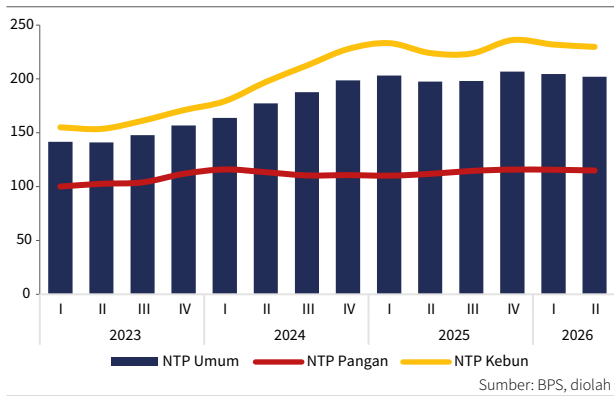
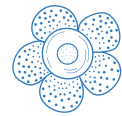
membaihnya harga CPO global, tercermin dari Harga Referensi CPO yang meningkat dari \$1.002,30 pada triwulan sebelumnya menjadi \$1.022,51 didorong oleh peningkatan permintaan menjelang Imlek dan Ramadan yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pasokan.

Selain itu, peningkatan produksi jagung turut didukung oleh implementasi program SaDeSaHe (Satu Desa Satu Hektare) yang mendorong pemanfaatan lahan produktif melalui penanaman jagung hibrida secara serentak di tingkat desa/kelurahan. Di Provinsi Bengkulu, program ini telah melibatkan sekitar 1.298 desa dengan total luasan tanam lebih dari 1.299 hektare, serta mulai menunjukkan hasil melalui kegiatan panen raya jagung di Kabupaten Bengkulu Utara pada awal 2026. Implementasi program tersebut tidak hanya mendorong peningkatan produksi jagung dan ketahanan pangan daerah, tetapi juga memperkuat sumber pendapatan masyarakat desa melalui optimalisasi lahan, diversifikasi komoditas, serta pengurangan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.

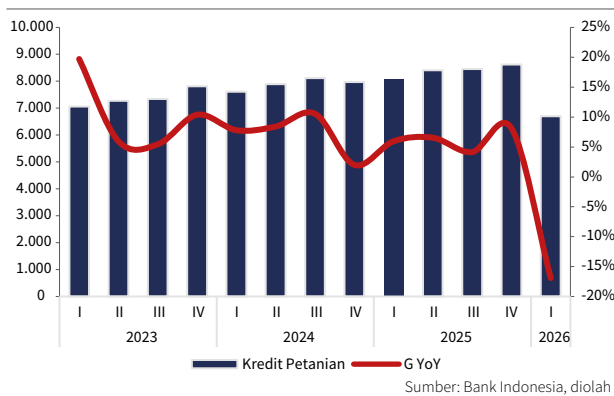
Berdasarkan rata-rata Nilai Tukar Pangan (NTP), perkembangan NTP Umum, NTP Pangan, dan NTP Kebun pada triwulan I 2026 tercatat sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun masih berada pada level yang relatif tinggi (Grafik 1.20). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada periode laporan lebih banyak ditopang oleh peningkatan volume produksi, luas panen, serta perbaikan aktivitas subsektor pertanian dan perkebunan, bukan semata-mata berasal dari kenaikan harga di tingkat petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa akselerasi LU Pertanian pada periode laporan tetap terjaga, meskipun masih dihadapkan pada tekanan indikator harga yang tercermin dari penurunan terbatas NTP Umum, NTP Pangan, dan NTP Kebun.

Selanjutnya, kinerja pertumbuhan kredit LU pertanian pada triwulan I 2025 berkontraksi sebesar 16,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,14% (yoy) (Grafik 1.20).





Grafik 1.20 Nilai Tukar Petani



Grafik 1.21 Perkembangan Kredit Pertanian

LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada triwulan I 2026 tercatat mengalami akselerasi dibandingkan triwulan IV 2025. LU Perdagangan tumbuh sebesar 4,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,88% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) pertanian serta masih tumbuhnya Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan yang turut meningkatkan aktivitas distribusi dan perdagangan barang. Selain itu, peningkatan penjualan kendaraan baru, khususnya sepeda motor, tercermin dari meningkatnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tipe I, turut mendorong kinerja perdagangan otomotif. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan domestik di Provinsi Bengkulu pada periode laporan relatif menguat,

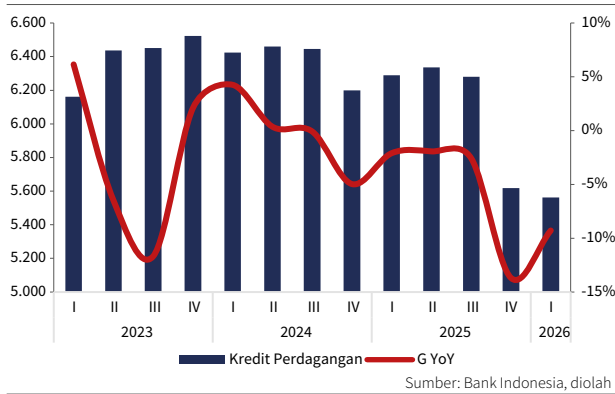
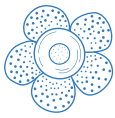
sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas konsumsi pada momentum Ramadhan dan HBKN Idulfitri, serta perbaikan pasokan dari sektor produksi daerah.

Akselerasi LU perdagangan juga turut didukung oleh perbaikan kinerja kredit perdagangan pada triwulan I 2026 yang meskipun masih berkontraksi, namun menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan kontraksi yang tidak sedalam periode sebelumnya, yaitu sebesar 9,28% (yoy) (Grafik 1.22). Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas pembiayaan sektor perdagangan mulai menunjukkan perbaikan secara terbatas, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan domestik pada periode Ramadhan dan HBKN Idulfitri, meskipun pelaku usaha masih cenderung berhati-hati dalam melakukan ekspansi pembiayaan.

Di sisi lain, pelemahan pada Lapangan Usaha (LU) pertambangan dan penggalian, khususnya komoditas batubara dan emas sejalan dengan menurunnya volume produksi komoditas utama serta terbatasnya aktivitas operasional di sektor tersebut. Pada komoditas batu bara, tekanan terutama dipengaruhi oleh proses persetujuan dan penerbitan RKAB 2026, di tengah kebijakan pemerintah pusat yang menata ulang target produksi batu bara nasional dari realisasi sekitar 790 juta ton pada 2025 menjadi kurang lebih 600 juta ton pada 2026. Kondisi tersebut menyebabkan ruang produksi dan pengapalan batu bara di Bengkulu menjadi lebih terbatas, khususnya bagi pelaku usaha yang operasionalnya sangat bergantung pada persetujuan RKAB dan alokasi volume produksi.

Sementara itu, aktivitas pertambangan mineral, termasuk emas, juga belum memberikan dorongan optimal seiring masih terbatasnya produksi dan kegiatan operasional. Perkembangan ini turut menahan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian Bengkulu, yang menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada triwulan I 2026.





Grafik 1.22 Perkembangan Kredit Perdagangan

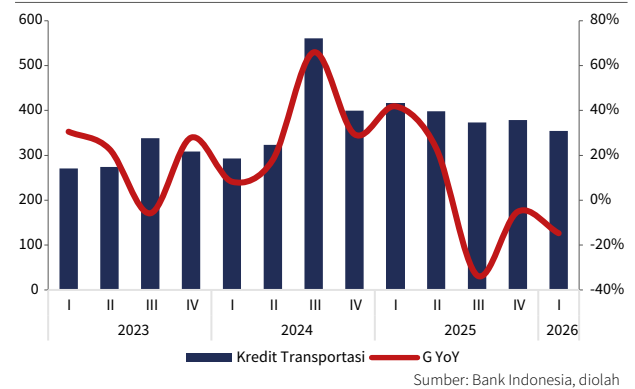
LU Transportasi dan Pergudangan

Pada triwulan I 2026, Lapangan Usaha (LU) Transportasi dan Pergudangan tumbuh menguat menjadi 6,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 6,43% (yoy), terutama ditopang oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode Ramadhan dan HBKN Idulfitri yang mendorong peningkatan volume penumpang angkutan darat, udara, laut, serta penyeberangan.

Hal ini juga didukung oleh kebijakan tarif angkutan Lebaran 2026 yang diberlakukan secara nasional untuk menjaga daya beli dan memperlancar mobilitas masyarakat, antara lain melalui diskon tiket kereta api 30% pada 14–29 Maret 2026, diskon angkutan laut 30% dari tarif dasar pada 11 Maret–5 April 2026, diskon angkutan penyeberangan hingga 100% atas tarif jasa kepelabuhanan pada 12–31 Maret 2026, serta penurunan tarif angkutan udara domestik kelas ekonomi sekitar 17–18% melalui kombinasi insentif PPN DTP 11%, diskon 50% PJP2U dan PJP4U, diskon avtur 10% di 37 bandara, penurunan *fuel surcharge*, serta perpanjangan jam operasional bandara dan layanan navigasi penerbangan. Kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan pergerakan masyarakat pada periode mudik dan balik Lebaran, termasuk di Provinsi Bengkulu melalui peningkatan aktivitas angkutan udara, laut, darat, serta penyeberangan, sehingga menopang penguatan LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan I 2026.

Kinerja kredit LU transportasi pada triwulan I 2026 berkontraksi lebih dalam sebesar 14,74% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,10% (yoy). Penurunan ini menunjukkan

bahwa penguatan LU Transportasi dan Pergudangan pada periode laporan belum diikuti oleh peningkatan pembiayaan perbankan, sehingga akselerasi kinerja sektor lebih banyak didorong oleh faktor musiman, terutama peningkatan mobilitas masyarakat selama Ramadhan dan HBKN Idulfitri, serta optimalisasi kapasitas usaha yang sudah ada (Grafik 1.23).

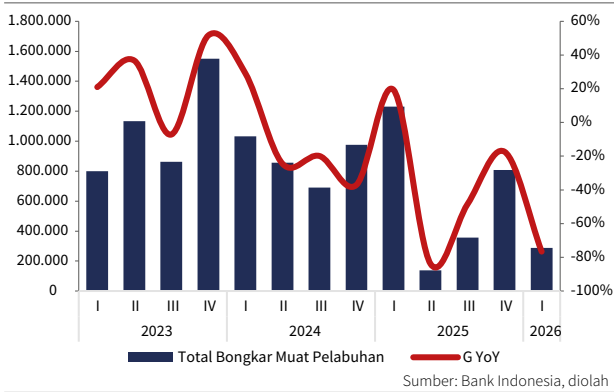
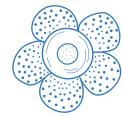


Grafik 1.23 Perkembangan Kredit Transportasi

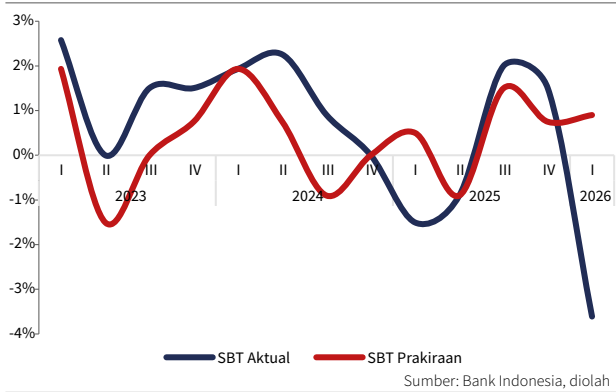
Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, volume bongkar muat jalur laut pada triwulan I 2026 berkontraksi sebesar 53,4% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 17,40% (yoy). Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan volume muat melalui Pelabuhan Pulau Baai, sejalan dengan melemahnya kinerja ekspor komoditas utama daerah, khususnya batu bara, akibat terbatasnya produksi dan aktivitas pengapalan pada awal tahun.

Di sisi lain, volume barang bongkar muat di bandara berkontraksi sebesar 76,60% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan masih terbatasnya aktivitas logistik udara di Provinsi Bengkulu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan mobilitas pada periode Ramadhan dan HBKN Idulfitri lebih banyak tercermin pada angkutan penumpang, bukan pada angkutan barang, mengingat stimulus tarif transportasi Lebaran 2026 secara nasional lebih diarahkan untuk mendorong perjalanan masyarakat melalui diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17–18%. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa arus barang antar daerah Bengkulu masih lebih banyak bertumpu pada moda darat dan laut, sementara pemanfaatan angkutan udara untuk logistik masih terbatas pada barang tertentu yang bernilai tinggi, mendesak, atau membutuhkan waktu pengiriman cepat.





Grafik 1.24 Perkembangan Bongkar Muat Barang Pelabuhan



Grafik 1.25 SBT Perkembangan Kegiatan Usaha SKDU

LU Konstruksi

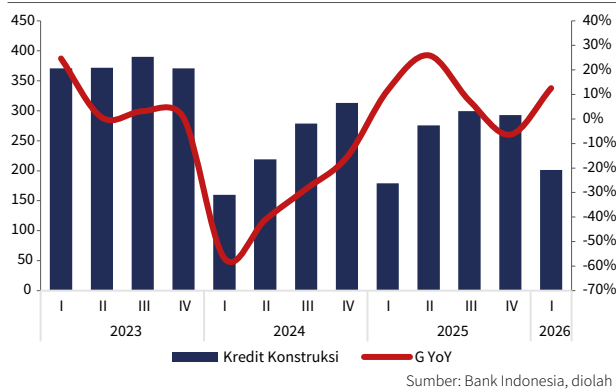
Pada triwulan I 2026, kinerja LU Konstruksi tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan I 2026, LU Konstruksi tumbuh sebesar 5,73% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konstruksi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,74% (yoy). Perbaikan kinerja tersebut sejalan dengan meningkatnya realisasi pengadaan semen serta penguatan kinerja PMTB/ Investasi. Selain itu, peningkatan LU Konstruksi juga didukung oleh berlanjutnya aktivitas pembangunan fisik di daerah, baik melalui proyek pemerintah maupun swasta, antara lain pembangunan gedung, preservasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, serta pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai menunjukkan progres di Bengkulu.

Namun, pertumbuhan LU Konstruksi masih tertahan oleh kinerja Saldo Bersih Tertimbang (SBT) aktual yang tercatat sebesar 3,61%, terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 1,50%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2026 belum sepenuhnya merata di seluruh pelaku usaha konstruksi, melainkan lebih banyak ditopang oleh proyek-proyek tertentu, terutama pembangunan fisik pemerintah, preservasi jalan, pembangunan gedung, serta progres gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Hal ini sejalan dengan realisasi semen dan PMTB yang menunjukkan perbaikan, serta hasil SKDU mencerminkan bahwa sebagian pelaku usaha konstruksi di Bengkulu masih menghadapi keterbatasan permintaan proyek baru, penyesuaian belanja, dan kehati-hatian dalam ekspansi usaha.

Selanjutnya, kinerja kredit pada LU konstruksi menguat pada periode pelaporan, yakni sebesar 12,56% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,37% (yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi di daerah, terutama pada pembangunan gedung, preservasi jalan, serta proyek infrastruktur lainnya, yang turut tercermin dari peningkatan realisasi pengadaan semen dan tetap positifnya kinerja PMTB/investasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan sektor konstruksi mulai meningkat untuk mendukung pengerjaan proyek fisik yang berlangsung pada triwulan I 2026 (Grafik 1.26).



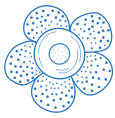
Grafik 1.26 Perkembangan Kredit Konstruksi

LU Industri Pengolahan

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada triwulan I 2025 mengalami deselerasi,

terutama dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas industri pengolahan berbasis kelapa sawit/CPO setelah periode sebelumnya tumbuh lebih tinggi. Meskipun harga CPO global relatif membaik, tercermin dari Harga Referensi CPO Maret 2026 yang meningkat menjadi \$1.022,51 dari \$1.002,30 pada triwulan sebelumnya, transmisi terhadap





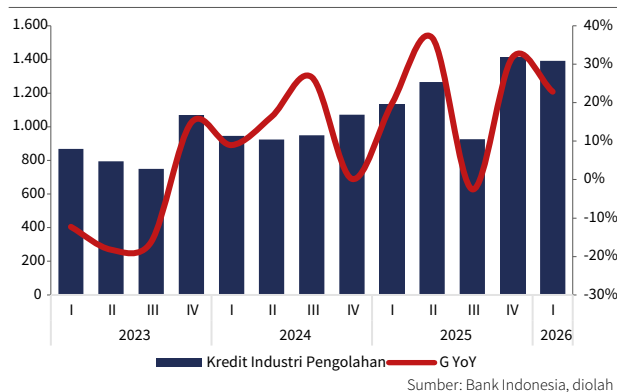
kinerja industri pengolahan di Bengkulu masih tertahan oleh keterbatasan pasokan TBS, fluktuasi harga bahan baku di tingkat petani, serta belum optimalnya utilisasi kapasitas pabrik kelapa sawit.

Di sisi lain, secara nasional kinerja industri sawit masih menunjukkan perbaikan, dengan produksi CPO Februari 2026 naik menjadi 5,015 juta ton dari 4,778 juta ton pada bulan sebelumnya, sehingga prospek industri pengolahan sawit tetap terjaga. Namun, di Bengkulu, penguatan tersebut belum sepenuhnya mendorong akselerasi LU Industri Pengolahan karena aktivitas pengolahan masih bergantung pada kesinambungan pasokan TBS, efisiensi logistik, dan kapasitas serapan pabrik di daerah.

Pada triwulan I 2026, kinerja LU industri pengolahan tumbuh sebesar 4,87% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,06% (yoy). Deselerasi tersebut terutama dipengaruhi oleh normalisasi kinerja industri pengolahan berbasis kelapa sawit/CPO setelah tumbuh tinggi pada periode sebelumnya, di tengah pasokan TBS yang belum sepenuhnya merata serta utilisasi kapasitas pabrik yang masih bervariasi antar pelaku usaha.

Namun, LU Industri Pengolahan masih tetap tumbuh positif, sejalan dengan perbaikan produktivitas CPO dan kapasitas produksi pabrik kelapa sawit di daerah seiring mulai beroperasinya dua pabrik CPO baru di Kabupaten Seluma. Selain itu, membaiknya harga CPO nasional yang tercermin dari kenaikan Harga Referensi CPO.

Selain itu, pada kredit LU industri pengolahan melandai di triwulan I 2026, yakni sebesar 22,86% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode sebesar 31,79% (yoy). (Grafik 1.27).



Grafik 1.27 Kredit LU Industri Pengolahan

Sementara, harga CPO global menunjukkan perbaikan meskipun masih terkontraksi sebesar 3,46% (yoy), membaik dibandingkan periode sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 8,91% (yoy) (Grafik 1.28).



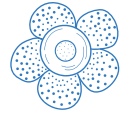
Grafik 1.28 Harga CPO Global

Harga CPO pada periode berjalan tercatat menguat, mencerminkan perbaikan permintaan minyak nabati global serta masih kuatnya prospek industri pengolahan berbasis kelapa sawit. Kenaikan tersebut juga didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku industri, termasuk untuk pangan dan biodiesel, di tengah pasokan yang relatif terbatas dari negara produsen utama, sehingga turut menopang harga TBS dan menjaga kinerja subsektor perkebunan serta industri pengolahan berbasis sawit di Provinsi Bengkulu.

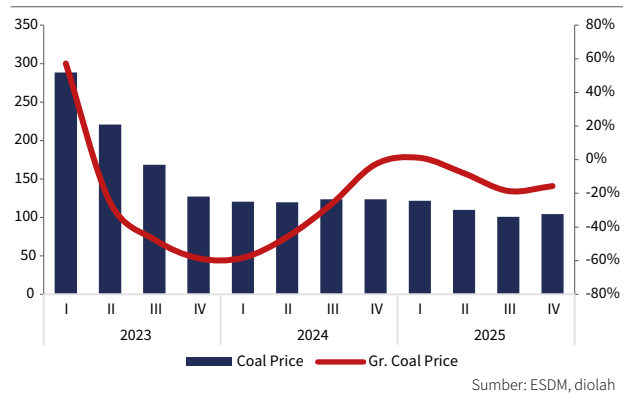
LU Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan pada periode triwulan I 2026. LU Pertambangan dan Penggalian terkontraksi lebih dalam sebesar 32,20% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh terkontraksi sebesar 11,26% (yoy). Pelemahan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan volume produksi batu bara sebagai komoditas utama pertambangan di Provinsi Bengkulu, seiring tertahannya aktivitas operasional akibat proses persetujuan dan penerbitan RKAB pada triwulan I. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian target produksi batu bara nasional oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada terbatasnya ruang produksi dan pengapalan batu bara di daerah. Akibatnya, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada periode laporan menjadi salah satu faktor penahan pertumbuhan ekonomi Bengkulu dari sisi lapangan usaha.

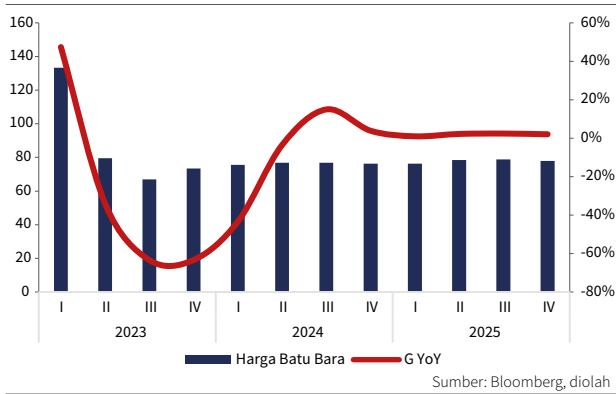




Rata-rata indeks harga batubara pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 106,11, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada level 112,02. Namun demikian, pergerakan harga batu bara sepanjang periode laporan masih menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan membaik pada akhir triwulan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sentimen harga batu bara global mulai menunjukkan perbaikan, meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian permintaan dari negara konsumen utama, tingginya persediaan, serta dinamika pasokan global. Dengan demikian, perbaikan harga belum sepenuhnya mampu mendorong kinerja LU Pertambangan dan Penggalian di Bengkulu, mengingat aktivitas produksi dan pengapalan batu bara masih tertahan oleh proses persetujuan RKAB dan penyesuaian target produksi nasional.



Grafik 1.30 Tren Harga Acuan Komoditas Batu Bara



Grafik 1.29 Tren Harga Komoditas Batu Bara





BOKS 1

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2026 Sebagai Momentum Penguatan Kepatuhan Pajak, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Digitalisasi Transaksi Daerah di Provinsi Bengkulu

Pemerintah Provinsi Bengkulu meluncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Apresiasi Emas bagi Wajib Pajak Patuh Tahun 2026 pada Jumat, 1 Mei 2026 di Balai Buntar Bengkulu. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Bengkulu, Bapak H. Helmi Hasan, S.E., dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Sekretaris Daerah, Kapolda, Kepala PT Jasa Raharja, unsur Forkopimda, Plt Kepala Unit IKSP, perbankan, serta para tamu undangan. Program yang berlaku hingga 31 Agustus 2026 ini menjadi instrumen pemerintah daerah untuk memberi ruang penyelesaian kewajiban PKB tanpa terbebani tunggakan dan/atau denda tertentu, sekaligus memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang selama ini patuh dan disiplin.

Kebijakan tersebut relevan sebagai instrumen optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat basis kendaraan terdaftar di Provinsi Bengkulu mencapai 1,27 juta unit pada 2024, dengan dominasi sepeda motor sebesar 85,9%. Respons awal masyarakat mulai terlihat dari 2.304 kendaraan yang memanfaatkan program

per 12 Mei 2026 pukul 20.30 WIB. Namun, apabila dibandingkan dengan estimasi tunggakan sekitar 913 ribu unit kendaraan, ruang akselerasi masih sangat besar sehingga program perlu diperkuat melalui sosialisasi berbasis wilayah, perluasan kanal layanan, pemanfaatan kanal digital, dan layanan jemput bola.

Program pemutihan PKB Bengkulu 2026 dilaksanakan melalui pemberian keringanan berupa pembebasan denda PKB, pembebasan tunggakan/pokok pajak tahun sebelumnya sesuai ketentuan, serta diskon 50% untuk mutasi atau balik nama kendaraan masuk. Kebijakan ini juga didukung perluasan kanal layanan melalui Samsat Induk, Samsat Desa, Samsat Keliling, Samsat Virtu, Samsat Mall Pelayanan Publik, serta aplikasi SIGNAL. Selain itu, Bapenda membuka layanan pada hari Sabtu pukul 08.00-14.00 WIB untuk memperluas akses masyarakat, khususnya wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

Dalam sambutannya, Gubernur Bengkulu menekankan bahwa pemutihan PKB merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Pajak yang dibayarkan masyarakat dipandang memiliki manfaat langsung bagi pembangunan daerah dan menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan Bengkulu. Selain itu, pemberian Apresiasi Emas kepada wajib pajak patuh diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat luas untuk semakin tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan.



Gambar B1.1 Launching Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

INDIKATOR	INFORMASI	KEBIJAKAN
Periode Program	1 Mei – 31 Agustus 2026	Program bersifat terbatas, sehingga perlu komunikasi intensif selama periode berjala
Kendaraan Terdaftar	1,27 juta unit	Basis kendaraan 2024 menjadi ruang utama peningkatan kepatuhan dan validasi data
Pengasa Sepeda Motor	85,9%	Sosialisasi perlu menjangkau rumah tangga/individu karena kendaraan roda dua mendominasi.
Estimasi Tunggakan	913 ribu unit	Menunjukkan ruang akselerasi kepesertaan masih besar.
Perkiraan Tunggakan/Tenda	Rp770 miliar/ Rp250 miliar	Menunjukkan beban historis wajib pajak dan potensi pemulihan basis penerimaan.
Respons Awal	2.304 kendaraan	Peserta program per 12 Mei 2026 pukul 20.30 WIB; masih tahap awal pelaksanaan.
Target PAD PKB-BBNKB	Rp400 miliar	Tambahan penerimaan program diperkirakan/ditargetkan sekitar Rp100 miliar.

Kegiatan launching tidak hanya berfungsi sebagai seremoni kebijakan, tetapi juga sebagai media pelayanan publik terpadu. Kegiatan turut diramalkan dengan servis kendaraan roda dua dan roda empat bekerja sama dengan pelaku industri otomotif, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peresmian penggunaan pembayaran digital QRIS bagi para pelaku usaha di kawasan Balai Buntar. Kehadiran layanan pendukung tersebut memperkuat pesan bahwa modernisasi layanan pajak daerah perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kenyamanan masyarakat dan penguatan ekosistem transaksi digital daerah.

Peluncuran program pemutihan PKB dan Apresiasi Emas perlu dilihat sebagai kombinasi antara relaksasi, edukasi, dan insentif kepatuhan. Di satu sisi, pembebasan denda dan tunggakan tertentu dapat menurunkan hambatan biaya bagi wajib pajak yang selama ini tidak aktif. Di sisi lain, pemberian apresiasi kepada wajib pajak patuh memberikan pesan yang lebih seimbang bahwa pemerintah daerah tidak hanya memberikan keringanan bagi penunggak, tetapi juga menghargai masyarakat yang telah memenuhi kewajiban secara disiplin. Pendekatan ini penting untuk menjaga keadilan persepsi dan memperkuat budaya kepatuhan pajak daerah.

Dari sisi fiskal, kebijakan pemutihan memiliki trade-off antara penerimaan jangka pendek dan perbaikan basis penerimaan jangka menengah. Penghapusan denda dan keringanan tunggakan berpotensi mengurangi penerimaan sanksi administrasi yang seharusnya diterima daerah. Namun, apabila program mampu

mengonversi wajib pajak pasif menjadi wajib pajak aktif, dampaknya dapat lebih besar karena pemerintah daerah memperoleh basis penerimaan yang lebih luas dan berkelanjutan pada periode berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tambahan penerimaan selama masa pemutihan, tetapi juga dari tingkat kepatuhan setelah program berakhir.

Respons awal sebanyak 2.304 kendaraan menunjukkan bahwa kebijakan telah mulai mendapatkan perhatian masyarakat, meskipun capaian tersebut masih relatif kecil dibandingkan estimasi kendaraan menunggak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hambatan kepatuhan tidak semata-mata berasal dari beban denda, tetapi juga dari keterbatasan informasi, jarak layanan, persepsi manfaat membayar pajak, serta kemampuan bayar masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi perlu menekankan manfaat langsung PKB bagi pembangunan daerah, pemeliharaan jalan, peningkatan layanan publik, dan tertib administrasi kendaraan.

Dominasi sepeda motor sebesar 85,9% menunjukkan bahwa target utama program berada pada segmen masyarakat luas, termasuk rumah tangga, pelaku usaha kecil, pekerja informal, serta pengguna kendaraan pribadi harian. Untuk segmen ini, layanan yang mudah, dekat, dan berbiaya rendah menjadi faktor kunci. Optimalisasi SIGNAL dan QRIS tetap penting sebagai bagian dari modernisasi layanan, namun perlu dilengkapi dengan layanan tatap muka dan jemput bola karena tidak seluruh wajib pajak memiliki literasi digital atau akses pembayaran nontunai yang memadai.



Secara spasial, pelaksanaan program perlu memprioritaskan wilayah dengan basis kendaraan terbesar, yaitu Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma. Kelima wilayah tersebut mencakup sekitar 75,0% dari total kendaraan terdaftar di Provinsi Bengkulu pada 2024, sehingga efektivitas sosialisasi dan layanan pada wilayah-wilayah tersebut akan sangat menentukan capaian program. Pendekatan berbasis wilayah dapat dilakukan melalui penguatan jadwal Samsat Keliling, aktivasi Samsat Desa, serta kerja sama komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan dan desa.

Peresmian penggunaan QRIS bagi pelaku usaha di kawasan Balai Buntar memberikan nilai tambah karena menghubungkan agenda pemutihan pajak dengan modernisasi transaksi daerah. Dalam konteks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, penggunaan kanal digital dapat membantu mempercepat pembayaran, mengurangi friksi transaksi tunai, dan memperluas akseptasi pembayaran nontunai di ruang ekonomi lokal. Namun, perlu dipastikan bahwa edukasi penggunaan kanal digital dilakukan secara praktis, terutama bagi pelaku usaha kecil dan wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan pembayaran digital.

Dari sisi administrasi kendaraan, insentif mutasi dan balik nama berpotensi memperbaiki akurasi data kepemilikan, domisili, dan status kendaraan. Perbaikan data menjadi penting karena basis data yang tidak mutakhir dapat menghambat penagihan pajak, menyulitkan perencanaan target penerimaan, serta mengurangi efektivitas kebijakan transportasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemutihan sebaiknya tidak hanya diarahkan pada penyelesaian tunggakan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum validasi data kendaraan melalui verifikasi dokumen, pemutakhiran alamat pemilik, dan integrasi data antarinstansi.

Risiko utama pelaksanaan program terletak pada efektivitas jangkauan, keberlanjutan kepatuhan, kapasitas layanan, kualitas data, dan potensi moral hazard. Apabila sosialisasi tidak menjangkau wilayah dengan basis tunggakan besar, capaian program

berpotensi terkonsentrasi pada wajib pajak yang sudah relatif mudah mengakses layanan. Selain itu, lonjakan peserta menjelang akhir periode dapat menimbulkan antrean dan menurunkan kualitas layanan apabila tidak diantisipasi melalui kalender layanan yang jelas, perluasan jam operasional, serta pembagian kanal layanan berdasarkan kebutuhan wajib pajak.

Risiko moral hazard juga perlu dicermati. Apabila program pemutihan dilakukan terlalu sering atau tidak diikuti penguatan penagihan pascaprogram, masyarakat dapat membentuk ekspektasi bahwa penundaan pembayaran pajak akan kembali memperoleh keringanan pada periode berikutnya. Karena itu, komunikasi kebijakan perlu menegaskan bahwa program bersifat terbatas, bersyarat, dan diikuti dengan pengawasan serta penegakan kepatuhan setelah masa pemutihan selesai.

Program Pemutihan PKB dan Apresiasi Emas bagi Wajib Pajak Patuh Tahun 2026 merupakan momentum untuk memperkuat penerimaan daerah, menertibkan administrasi kendaraan, dan membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih positif. Agar manfaatnya berkelanjutan, program perlu diarahkan tidak hanya sebagai relaksasi sementara, tetapi sebagai pintu masuk untuk memperluas basis wajib pajak aktif, memperbaiki kualitas data, dan memperkuat pengelolaan PAD secara lebih terukur. Dengan penguatan sosialisasi, perluasan layanan, digitalisasi pembayaran, dan monitoring berbasis data, program ini berpeluang menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah serta mendukung kapasitas fiskal Provinsi Bengkulu.





Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2



PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Triwulanan Provinsi Bengkulu (yoy)



2,84%
Tw I 2026

2,77%
Tw IV 2025

Inflasi Bulanan Provinsi Bengkulu (mtm)



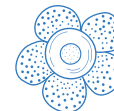
0,28% mtm
Mar

0,66% mtm
Feb

Indeks Harga Konsumen Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,84% (yoy). Besaran ini meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 2,77% (yoy). Inflasi pada triwulan I 2026 utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,43% (yoy). Komoditas pendorong utama daging ayam ras.

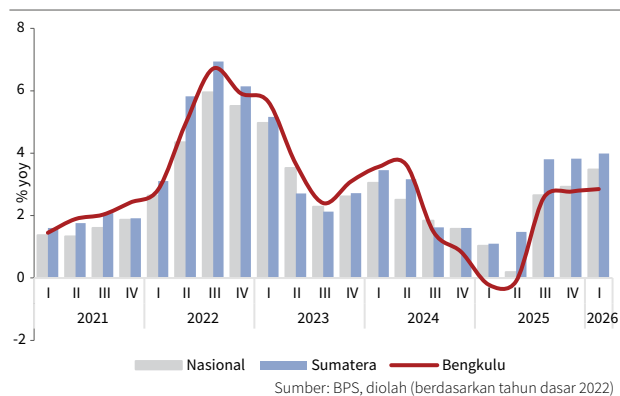
- Pada triwulan IV 2025, inflasi tercatat sebesar 2,77% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 2,57% (yoy). Penyebab inflasi pada triwulan ini dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau yang utamanya disumbang oleh komoditas cabai merah.
- Inflasi lebih tinggi pada triwulan IV 2025 didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau disebabkan base year effect, dimana pada periode yang sama di tahun sebelumnya harga cabai merah sangat rendah.
- Pada triwulan I 2026, Provinsi Bengkulu diperkirakan mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025. Hal ini didorong kenaikan permintaan terutama pangan bergejolak seiring HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang jatuh di bulan Maret atau akhir triwulan I 2026.





2.1 INFLASI TRIWULANAN

Realisasi inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 2,84% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tercatat inflasi sebesar 2,77% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi nasional dan regional Sumatera yang tercatat masing-masing sebesar 3,48% (yoy) dan 3,99% (yoy).



Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Nasional, Pulau Sumatera dan Provinsi Bengkulu (% yoy)
 Sumber: BPS, diolah (berdasarkan tahun dasar 2022)

Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 1,43% yoy); diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya (andil 0,96% yoy); kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (andil 0,61%); kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (andil 0,18% yoy); kelompok transportasi (andil 0,15% yoy); kelompok pakaian dan alas kaki (andil 0,02% yoy); kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (andil masing-masing 0,01%).

Di sisi lain, kelompok yang menahan inflasi lebih tinggi yaitu kelompok pendidikan (andil -0,50% yoy) dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (andil -0,03% yoy) (Tabel 3.1).

Penyebab dominan inflasi Provinsi Bengkulu adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan pendorong inflasi utama adalah komoditas daging ayam ras. Kenaikan harga daging ayam ras secara tahunan terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya tekanan biaya produksi, khususnya harga bibit/DOC dan pakan, di tengah keterbatasan kapasitas pasokan lokal Bengkulu.

Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan per Kelompok

KELOMPOK	INFLASI TAHUNAN TW I 2026 (% YOY)			ANDIL INFLASI TAHUNAN TW I 2026 (% YOY)		
	JAN	FEB	MAR	JAN	FEB	MAR
UMUM	2,61	3,88	2,85	2,61	3,88	2,85
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	1,61	3,81	4,34	0,54	1,27	1,43
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	1,00	0,76	0,32	0,06	0,04	0,02
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	12,02	16,60	6,71	1,65	2,20	0,96
PERLENGKAPAN, PERALATAN, DAN PEMELIHARAAN RUTIN RT	-0,05	0,02	-0,29	~0	~0	-0,01
KESEHATAN	-0,28	~0	-0,64	-0,01	~0	-0,01
TRANSPORTASI	0,87	0,22	1,16	0,12	0,03	0,15
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN	0,07	0,22	0,23	~0	0,01	0,01
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	-0,37	0,36	0,55	-0,01	0,01	0,01
PENDIDIKAN	-9,55	-9,55	-9,55	-0,50	-0,50	-0,50
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	0,95	1,39	1,82	0,09	0,14	0,18
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	12,22	12,21	10,85	0,67	0,68	0,61

Sumber: BPS, diolah (berdasarkan tahun dasar 2022)

Struktur pasokan ayam ras Bengkulu yang masih memiliki keterkaitan dengan wilayah pemasok sekitar Sumatera bagian selatan menyebabkan harga di tingkat konsumen relatif sensitif terhadap kenaikan biaya hulu dan distribusi. Di sisi permintaan, momentum Ramadan dan Idulfitri 2026 mendorong peningkatan konsumsi protein hewani, sehingga memperkuat tekanan harga daging ayam ras di pasar tradisional. Kondisi tersebut menjadikan daging ayam ras sebagai komoditas pangan dengan andil inflasi tahunan terbesar pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Lebih lanjut, inflasi turut didorong kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, terutama disumbangkan oleh komoditas emas perhiasan seiring tren kenaikan harga emas dunia yang berlanjut. Harga emas dunia akhir triwulan I 2026 tercatat USD4855.5 per troy ounce, meningkat sekitar 12,68% dibandingkan akhir triwulan IV 2025 senilai USD4309.2 per troy ounce. (Sumber: bloomberg).

Kontributor penahan inflasi terbesar di Provinsi Bengkulu berasal dari kelompok pendidikan, seiring penurunan biaya sekolah setelah terbitnya Surat Edaran Gubernur No. 00.4.4/801/Dikbud/2025 yang ditujukan kepada



**Tabel 2.2** Komoditas Penyumbang Inflasi Triwulan III 2025

INFLASI		DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
	(% YOY)		(% YOY)
JANUARI 2026			
Tarif Listrik	1,56	Sekolah Menengah Atas	-0,56
Emas Perhiasan	0,59	Cabai Merah	-0,42
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,14	Jengkol	-0,04
Daging Ayam Ras	0,13	Bensin	-0,04
Santan Segar	0,13	Kentang	-0,03
FEBRUARI 2026			
Tarif Listrik	2,11	Sekolah Menengah Atas	-0,57
Emas Perhiasan	0,65	Cabai Merah	-0,22
Daging Ayam Ras	0,48	Bensin	-0,12
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,13	Cabai Rawit	-0,04
Ikan Dencis	0,12	Kentang	-0,03
MARET 2026			
Tarif Listrik	0,84	Sekolah Menengah Atas	-0,56
Emas Perhiasan	0,59	Bensin	-0,07
Daging Ayam Ras	0,50	Cabai Merah	-0,07
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,15	Bawang Merah	-0,05
Ikan Dencis	0,11	Bawang Putih	-0,04

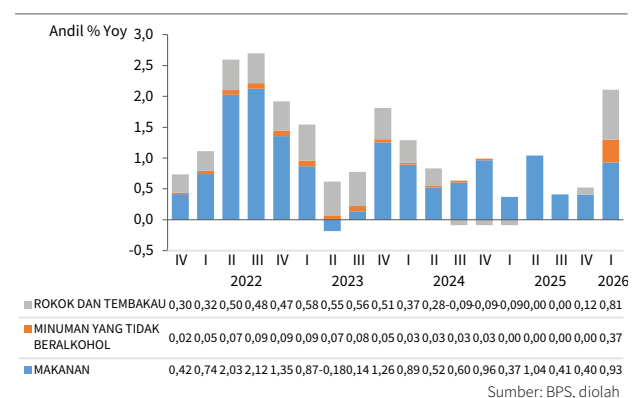
Sumber: BPS, diolah (berdasarkan tahun dasar 2022)

seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu serta kepala SMA, SMK, dan SLB di seluruh provinsi, yang menginstruksikan satuan pendidikan untuk tidak memungut uang bangunan, uang seragam, uang buku tertentu, maupun iuran dalam bentuk apapun pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Di sisi lain, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok kesehatan turut menahan inflasi dengan andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy).

2.2 INFLASI TAHUNAN (YOY)

Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan I 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 4,34% (yoy). Kondisi ini melandai dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang mengalami inflasi sebesar 7,05% (yoy). Seluruh sub kelompok mengalami inflasi, dimana sub kelompok makanan sebesar 4,58% (yoy), sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,18% (yoy) dan sub kelompok rokok dan tembakau yang tercatat mengalami inflasi sebesar 3,63% (yoy) pada periode triwulan laporan (*Grafik 2.2*).

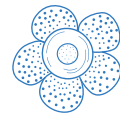
**Grafik 2.2**

Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (% yoy)

Sub kelompok makanan tercatat mengalami inflasi sebesar 4,58% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 8,86% (yoy). Inflasi pada kelompok ini masih didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi peningkatan permintaan pada periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri. Kenaikan daging ayam ras juga disebabkan kenaikan biaya produksi, terutama harga bibit/DOC dan pakan.

Di sisi lain, cabai merah dan bawang merah menahan inflasi lebih tinggi dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,07% (yoy) dan 0,05% (yoy). Penurunan harga

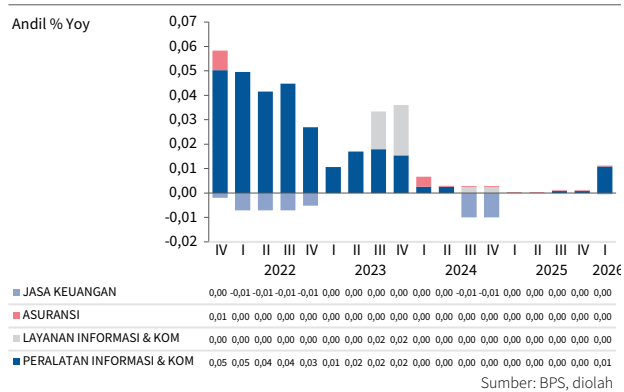




Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada periode laporan mengalami inflasi yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kelompok ini pada triwulan I 2026 mengalami inflasi sebesar 0,23% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tercatat inflasi sebesar 0,06% (yoy). Inflasi kelompok ini bersumber dari subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,08% (yoy) dan subkelompok jasa keuangan sebesar 0,49% (yoy). Sedangkan subkelompok layanan informasi dan komunikasi tidak mengalami perubahan.

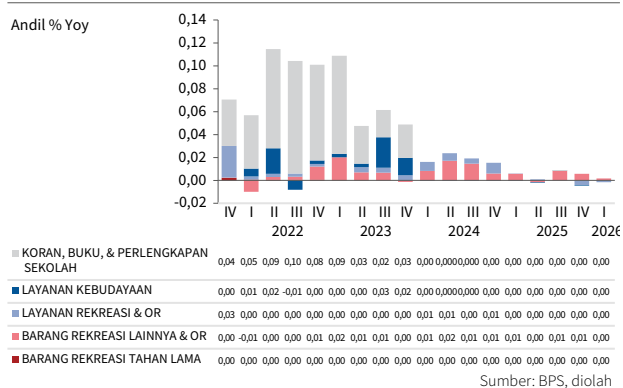


Grafik 2.8 Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (% yoy)

Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Inflasi kelompok rekreasi, olahraga dan budaya melandai dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tekanan inflasi kelompok ini pada periode laporan tercatat sebesar 0,55% (yoy). Realisasi ini melandai dibandingkan dengan triwulan IV 2025 sebesar 0,69% (yoy). Inflasi kelompok ini didorong oleh sub kelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga dan sub kelompok layanan kebudayaan. Di sisi lain, sub kelompok yang mengalami deflasi yakni subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah. Lebih lanjut, terdapat tidak mengalami perubahan pada periode laporan yakni subkelompok layanan rekreasi dan olahraga.

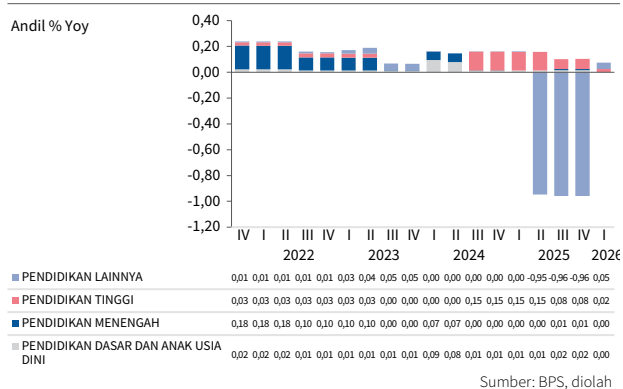


Grafik 2.9 Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya (% yoy)

Inflasi Kelompok Pendidikan

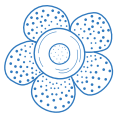
Tekanan inflasi kelompok pendidikan pada triwulan IV 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Realisasi deflasi kelompok pendidikan pada triwulan I 2026 tercatat sebesar -9,55% (yoy), tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -9,55% (yoy). Subkelompok yang mengalami deflasi pada periode ini adalah subkelompok pendidikan menengah. Sedangkan subkelompok yang mengalami inflasi yakni subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini, subkelompok pendidikan tinggi, dan subkelompok pendidikan lainnya. Deflasi signifikan pada periode ini dipengaruhi oleh Surat Edaran Gubernur No. 00.4.4/801/Dikbud/2025 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, serta kepala SMA, SMK, dan SLB di seluruh provinsi, dimana sekolah diminta untuk tidak memungut uang bangunan, uang seragam dan uang buku tertentu serta iuran dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).



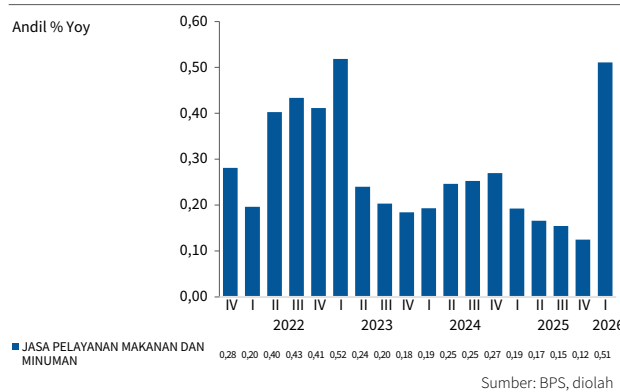
Grafik 2.10 Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)





Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran

Inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran meningkat dibandingkan triwulan IV 2025. Inflasi tercatat sebesar 1,82% (yoy), meningkat dibandingkan 1,47% (yoy) pada triwulan IV 2025. Komoditas yang dominan memberikan dorongan inflasi adalah nasi dengan lauk, bakso siap santap, sayur olahan, ketupat/lontong sayur, gulai, kue kering berminyak, soto, kopi siap saji, dan sop.



Grafik 2.11 Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)

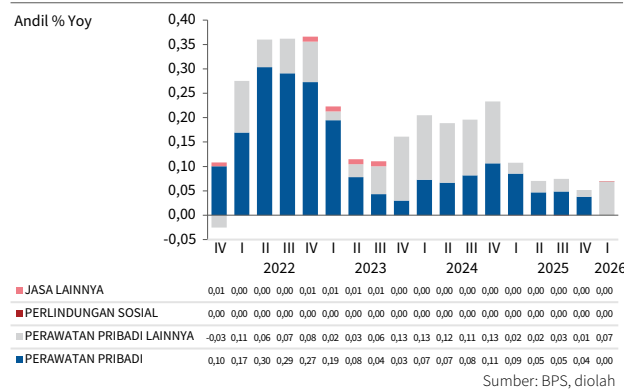
Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi tercatat sebesar 10,85% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8,52% (yoy). Tekanan inflasi pada periode laporan utamanya pada sub kelompok perawatan pribadi, utamanya didorong komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,59% (yoy). Adapun hal ini seiring permintaan emas sebagai safe haven di tengah ketidakpastian global. Pada akhir triwulan I 2026 tercatat Rp2.645.966/gram, meningkat 5,80% dibandingkan akhir triwulan IV 2025 senilai Rp2.501.000/gram (Sumber: www.harga-emas.org).

Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Bulanan

JAN 2026	INFLASI (MTM)	FEB 2026	INFLASI (MTM)	MAR 2026	INFLASI (MTM)	APR 2026	INFLASI (MTM)
	-0,75%		0,66%		0,28%		0,35%
KOMODITAS DEFLATOR	(ANDIL % MTM)	KOMODITAS INFLATOR	(ANDIL % MTM)	KOMODITAS INFLATOR	(ANDIL % MTM)	KOMODITAS DEFLATOR	(ANDIL % MTM)
CABAI MERAH	-0,76	CABAI MERAH	0,24	DAGING AYAM RAS	0,10	ANGKUTAN UDARA	0,12
DAGING AYAM RAS	-0,14	DAGING AYAM RAS	0,11	JENGKOL	0,05	BAWANG MERAH	0,06
BAWANG MERAH	-0,07	EMAS PERHIASAN	0,09	BENSIN	0,05	MINYAK GORENG	0,06

Sumber: BPS, diolah



Grafik 2.12 Perkembangan Andil Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)

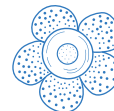
2.3 INFLASI BULANAN (MTM)

Inflasi Bulan Januari Melandai

Pasokan Cabai Merah yang Membaik Sebabkan Deflasi Periode Januari 2026. IHK Provinsi Bengkulu pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,75% (mtm), melandai dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,43% (mtm). Angka realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar -0,40% (mtm), dan realisasi tersebut lebih rendah dari inflasi nasional sebesar -0,15% (mtm).

Secara tahunan, pada Januari 2026 Provinsi Bengkulu tercatat mengalami inflasi sebesar 2,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 3,55% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dari pola historis 3 (tiga) tahun terakhir yakni inflasi sebesar 1,84% (yoy). Adapun inflasi tahunan (yoy) dimaksud didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,65% (yoy) dengan komoditas dominan pendorong inflasi yaitu tarif listrik sebesar 1,56% (yoy). Hal ini disebabkan base-year effect, dimana pada periode yang sama di tahun 2025, pemerintah memberikan diskon sebesar 50% pada pelanggan PLN dengan daya <1.300 VA. Di sisi lain, biaya Sekolah Menengah Atas menahan inflasi yang lebih tinggi





dipengaruhi oleh penerapan kebijakan bagi sekolah untuk tidak melakukan pembebanan biaya dan iuran terkait proses pembelajaran dan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Berdasarkan kelompoknya, deflasi pada bulan Januari 2026 terutama disebabkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar -0,88% (mtm). Komoditas yang menjadi penyebab utama deflasi yakni cabai merah dengan andil sebesar -0,76% (mtm) dipengaruhi normalisasi permintaan pasca kenaikan di periode HBKN Nataru. Lebih lanjut, penurunan harga signifikan dipengaruhi panen pasokan cabai merah di daerah sentra yakni Rejang Lebong, Kepahiang dan Seluma. Distribusi pasokan juga membaik seiring cuaca yang bersahabat. Di samping itu, kelompok transportasi turut mempengaruhi deflasi dengan andil (mtm) sebesar -0,04%. Komoditas yang dominan menyumbang andil deflasi pada kelompok ini yakni bensin sebesar -0,04% (mtm) dan angkutan udara sebesar -0,02% (mtm). Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yakni Pertamina, Pertamina Turbo, Dexcelite dan Pertamina Dex pada bulan Januari 2026. Di sisi lain, deflasi lebih dalam ditahan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,16% (mtm) dengan komoditas penahan utama yakni emas perhiasan dengan andil sebesar 0,12% (mtm) dipengaruhi kenaikan harga komoditas emas dunia yang didorong peningkatan permintaan aset safe haven ditengah ketidakpastian global dan konflik geopolitik.

Inflasi Meningkat pada Bulan Februari

Cabai Merah dan Daging Ayam Ras Dorong Inflasi Periode Februari 2026. IHK Provinsi Bengkulu pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,66% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,75% (mtm). Angka realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 0,29% (mtm), dan realisasi tersebut lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,68% (mtm).

Secara tahunan, pada Februari 2026 Provinsi Bengkulu tercatat mengalami inflasi sebesar 3,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat

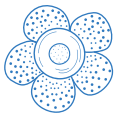
inflasi sebesar 4,76% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dari pola historis 3 (tiga) tahun terakhir yakni inflasi sebesar 2,10% (yoy). Adapun inflasi tahunan (yoy) dimaksud didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 2,20% (yoy) dengan komoditas dominan pendorong inflasi yaitu tarif listrik sebesar 2,11% (yoy). Hal ini disebabkan base-year effect, dimana pada periode yang sama di tahun 2025, pemerintah memberikan diskon sebesar 50% pada pelanggan PLN dengan daya <1.300 VA. Di sisi lain, biaya Sekolah Menengah Atas menahan inflasi yang lebih tinggi dipengaruhi oleh penerapan kebijakan bagi sekolah untuk tidak melakukan pembebanan biaya dan iuran terkait proses pembelajaran dan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan Februari 2026 terutama disebabkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,66% (mtm). Komoditas yang menjadi penyebab utama inflasi yakni cabai merah dengan andil sebesar 0,24% (mtm) dipengaruhi berlalunya masa panen yang sudah terjadi di akhir tahun 2025. Kenaikan inflasi juga didorong oleh daging ayam ras dengan andil 0,11% (mtm). Di samping itu, inflasi turut didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,08% (mtm) dengan komoditas penahan utama yakni emas perhiasan dengan andil sebesar 0,09% (mtm) dipengaruhi kenaikan harga komoditas emas dunia yang didorong peningkatan permintaan aset safe haven ditengah ketidakpastian global dan konflik geopolitik kelompok transportasi turut mempengaruhi deflasi dengan andil (mtm) sebesar -0,04%. Di sisi lain, kelompok yang menahan inflasi lebih tinggi pada periode ini yakni transportasi dengan andil sebesar -0,02% (mtm) dengan sumbangan andil terdalam dari komoditas bensin sebesar -0,05% (mtm). Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yakni Pertamina, Pertamina Turbo, Dexcelite dan Pertamina Dex pada bulan Februari 2026.

Inflasi Melandai Pada Bulan Maret

Kenaikan Permintaan Daging Ayam Ras Saat HBKN Dorong Inflasi Periode Maret 2026. IHK Provinsi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi





sebesar 0,28% (mtm), melandai dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,66% (mtm). Angka realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 0,59% (mtm), dan realisasi tersebut lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,41% (mtm).

Secara tahunan, pada Maret 2026 Provinsi Bengkulu tercatat mengalami inflasi sebesar 2,85% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 3,48% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dari pola historis 3 (tiga) tahun terakhir yakni inflasi sebesar 2,06% (yoy). Adapun inflasi tahunan (yoy) dimaksud didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,61% dengan komoditas pendorong utama adalah emas perhiasan (andil 0,59% yoy). Lebih lanjut, inflasi turut didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,96% (yoy) dengan komoditas dominan pendorong inflasi yaitu tarif listrik sebesar 0,84% (yoy). Hal ini disebabkan *base-year effect*, dimana pemerintah memberikan diskon sebesar 50% pada pelanggan PLN dengan daya <1.300 VA dan masih terdapat efek diskon pembayaran pascabayar Februari di bulan Maret 2025. Di sisi lain, biaya Sekolah Menengah Atas masih menjadi penahan inflasi yang lebih tinggi dipengaruhi oleh penerapan kebijakan bagi sekolah untuk tidak melakukan pembebanan biaya dan iuran terkait proses pembelajaran dan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan Maret 2026 terutama disebabkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,18% (mtm). Komoditas yang menjadi penyebab utama inflasi yakni daging ayam ras dengan andil sebesar 0,10% (mtm) didorong peningkatan permintaan pada periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri. Kenaikan inflasi juga didorong oleh komoditas jengkol dengan andil 0,05% (mtm). Di samping itu, inflasi turut didorong oleh kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,07% (mtm) dengan sumbangan andil terbesar dari komoditas bensin sebesar 0,05% (mtm). Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi

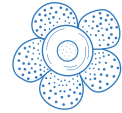
yakni Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex pada bulan Maret 2026. Di sisi lain, kelompok yang menahan inflasi lebih tinggi yakni kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar -0,02% (mtm) dengan komoditas penahan yakni emas perhiasan dan popok bayi dengan andil masing-masing sebesar -0,01% (mtm) dipengaruhi fluktuasi harga komoditas emas dunia yang dipengaruhi kenaikan/penurunan permintaan emas sebagai aset ditengah ketidakpastian global dan konflik geopolitik.

Kondisi Inflasi bulan April

Kenaikan Tarif Angkutan Udara Dorong Inflasi April 2026. IHK Provinsi Bengkulu pada April 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,35% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,28% (mtm). Angka realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata historis inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 0,60% (mtm), dan realisasi tersebut lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,13% (mtm).

Secara tahunan, pada April 2026 Provinsi Bengkulu tercatat mengalami inflasi sebesar 1,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang tercatat inflasi sebesar 2,42% (yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dari pola historis 3 (tiga) tahun terakhir yakni inflasi sebesar 2,15% (yoy). Adapun inflasi tahunan (yoy) dimaksud didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 1,08% (yoy) dengan komoditas pendorong utama adalah daging ayam ras (andil 0,46% yoy). Lebih lanjut, inflasi tahunan turut didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,49% (yoy) dengan komoditas pendorong utama adalah emas perhiasan (andil 0,44% yoy). Di sisi lain, kelompok yang menahan inflasi tahunan lebih tinggi yakni kelompok pendidikan (andil -0,49% yoy) dengan komoditas penahan utama yakni biaya Sekolah Menengah Atas (andil -0,55% yoy) yang menjadi penahan inflasi yang lebih tinggi dipengaruhi oleh penerapan kebijakan bagi sekolah untuk tidak melakukan pembebanan biaya dan iuran terkait proses pembelajaran dan penerimaan peserta didik baru (PPDB).





Berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan April 2026 terutama disebabkan oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil sebesar 0,14% (mtm) dan kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,02% (mtm). Komoditas yang menjadi penyebab utama inflasi yakni angkutan udara dengan andil sebesar 0,12% (mtm) yang dipengaruhi kenaikan avtur disebabkan kenaikan harga minyak dunia. Lebih lanjut, keputusan Pemerintah untuk menyesuaikan tarif fuel surcharge (FS) sebesar 38% sebagai respons atas kenaikan harga avtur global turut mendorong kenaikan harga tiket pesawat sebesar 9-13%. Di sisi lain, kelompok yang menahan inflasi lebih tinggi yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar -0,05% (mtm). Komoditas penahan utama diantaranya daging ayam ras dengan andil -0,18% (mtm) dan cabai merah dengan andil sebesar -0,16% (mtm) disebabkan peningkatan produksi yang mendorong melimpahnya ketersediaan, serta kelancaran distribusi yang mengakselerasi peningkatan pasokan dari luar daerah.

Dengan mencermati perkembangan inflasi pada periode laporan dan pergerakan beberapa indikator harga berbagai komoditas, IHK Bengkulu diperkirakan mengalami inflasi pada Triwulan II 2026. IHK bulan Juni 2026 diperkirakan berada pada kisaran 2,70 – 3,20% (yoy). Inflasi diperkirakan didorong oleh peningkatan harga komoditas hortikultura yang telah melewati masa panen dan memasuki masa tanam. Lebih lanjut, inflasi diperkirakan berasal dari dorongan permintaan pada periode long weekend di bulan Mei. Dari sisi pangan, komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan hortikultura diperkirakan relatif stabil dengan normalisasi permintaan pasca periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri di bulan sebelumnya yang mendorong kenaikan harga. Di sisi lain, bahan bakar rumah tangga diperkirakan dapat menjadi risiko kenaikan inflasi disebabkan kelangkaan yang terjadi di Provinsi Bengkulu. TPID Provinsi Bengkulu terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi dalam menjaga keterjangkauan harga melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan satgas inflasi untuk terus mengadakan sidak terutama pada pasar dan distributor untuk menjaga ketersediaan pasokan, melaksanakan GPM 5 Tepat (Sasaran, Lokasi,

Waktu, Komoditas, dan Jumlah), operasi pasar, pasar murah, dan pasokan yang terjaga melalui realisasi KAD. Upaya komunikasi efektif Edukasi Belanja Bijak terus didorong untuk dapat menjaga ekspektasi konsumen dalam menahan inflasi yang lebih tinggi.

2.4 AKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI (TPID)

TPID Provinsi Bengkulu senantiasa mengupayakan beberapa langkah preventif dalam rangka menjaga laju tekanan inflasi agar tetap rendah dan stabil.

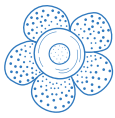
Untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), upaya pengendalian inflasi disusun berdasarkan *roadmap* periode 2025-2027 dengan prioritas strategi pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi yang didukung ekosistem yang lebih kondusif dan ketersediaan data yang akurat dalam kerangka 4K.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan pada triwulan I 2026, meliputi:

1) Ketersediaan Pasokan

- a. (28/01) FGD dengan Kepala Regional SPPG Provinsi Bengkulu yang membahas mengenai rencana pemberian MBG pada Bulan Ramadhan dengan diversifikasi makanan yang dapat menjadi pemicu inflasi di ramadhan.
- b. (05/02) Pelaksanaan Sidak Pasar oleh TPID Kab. Bengkulu Tengah, TPID Kab. Lebong, TPID Kab. Bengkulu Selatan, dan TPID Kab. Bengkulu Utara untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga menjelang HBKN Ramadhan dan Idulfitri.
- c. (11/03) Pelaksanaan Sidak Pasar oleh TPID Kab. Kaur, TPID Kab. Bengkulu Tengah, TPID TPID Kab. Lebong untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga menjelang HBKN Idulfitri, terutama Gas LPG 3 kilogram.
- d. (16/03) Launching simbolis Komitmen Penyaluran Program SPHP Jagung Provinsi Bengkulu oleh Badan Pangan Nasional melalui Bulog Provinsi Bengkulu kepada Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan (PINSAR) Provinsi Bengkulu.

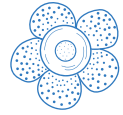




2) Keterjangkauan Harga

- a. (28/01) Rencana pelaksanaan “PASRAH MEMBARA” (Pasar Murah Membantu Rakyat) yang dilakukan oleh TPID Provinsi Bengkulu setiap hari Senin dan Selasa menjelang Ramadhan 2025 untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, dimana Pasar Murah dilaksanakan di daerah yang dekat dengan pasar sehingga dapat menjangkau masyarakat yang akan berbelanja di Pasar.
- b. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis di Kota Bengkulu.
- c. (02-03/02) Pelaksanaan “PASRAH MEMBARA” atau Pasar Murah Membantu Rakyat Menjelang Ramadhan 1447 H di Halaman Gedung Balai Buntar dengan tujuan melakukan pengendalian inflasi dan menjaga ekspektasi masyarakat menjelang HBKN Ramadhan.
- d. (04/02) Pemkot Bengkulu menyiapkan operasi pasar murah di 9 kecamatan (Teluk Segara, Muara Bangkahulu, Sungai Serut, Ratu Agung, Ratu Samban, Singaran Pati, Selebar, Kampung Melayu, dan Gading Cempaka) sebagai langkah antisipasi kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan; pelaksanaan direncanakan pada minggu pertama Ramadhan.
- e. (05/02) Pelaksanaan Sidak Pasar oleh TPID Kab. Bengkulu Tengah, TPID Kab. Lebong, TPID Kab. Bengkulu Selatan, dan TPID Kab. Bengkulu Utara untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga menjelang HBKN Ramadhan dan Idulfitri.
- f. (05/02) Pelaksanaan Pasar Murah Eragro (Ecer Rasa Grosir) oleh TPID Kab. Bengkulu Selatan yang bersinergi dengan Majelis Taklim Merah Putih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan awareness para ibu untuk dapat berbelanja dengan bijak sesuai kebutuhan.
- g. (06/02) Pelaksanaan “PASRAH MEMBARA” Pasar Murah Membantu Rakyat bersama Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan di Kab. Seluma bersamaan dengan Safari menjelang Ramadhan.
- h. (09-10/02) Pelaksanaan “PASRAH MEMBARA” atau Pasar Murah Membantu Rakyat Menjelang Ramadhan 1447 H di Halaman Kantor Lurah Kampung Bali dengan tujuan melakukan pengendalian inflasi dan menjaga ekspektasi masyarakat menjelang HBKN Ramadhan.
- i. (11/02) Pemkab Mukomuko bersama Kejari Mukomuko menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilisasi harga bahan pokok menjelang Ramadhan, sebagai bentuk kolaborasi pemda–aparatur penegak hukum dalam pengendalian inflasi pangan.
- j. (15/02) Pemkab Bengkulu Utara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai intervensi pasar untuk menjaga pasokan dan harga bahan pokok jelang Ramadhan, sekaligus menjaga daya beli dan menahan inflasi daerah.
- k. (18/02) Bapanas bersama Satgas Saber Pangan Bengkulu melakukan pemantauan dan pengawasan di Pasar Minggu Kota Bengkulu dan Pasar Rakyat Kabupaten Lebong, termasuk percepatan distribusi Minyakita dan penguatan pengawasan rantai pasok. Hal ini dirangkaikan dengan GPM di Pasar Muara Aman, Lebong.
- l. Setiap Selasa dan Kamis — Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis di Kota Bengkulu.
- m. (01-02/03) Pelaksanaan “PASRAH MEMBARA” atau Pasar Murah Membantu Rakyat yang dirangkaikan dengan Safari Ramadhan Gubernur Bengkulu di Halaman Masjid Jamik Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dan di Kantor Sekretariat PKK Provinsi Bengkulu.
- n. (02/03) Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Mahabba di Kampung Ramadhan Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
- o. (03/03) Pelaksanaan Pasar Murah di Halaman Gedung UINFAS yang dirangkaikan dengan bazar dan edukasi CBP Rupiah.
- p. (03-04/03) Pelaksanaan Pasar Murah menjelang Idulfitri oleh Kabupaten Kaur bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kab. Kaur.
- q. (09/03) Pelaksanaan Pasar Murah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadhan Gubernur Bengkulu dan HUT Kab Bengkulu Selatan.





- r. (11/03) Pelaksanaan Sidak Pasar oleh TPID Kab. Kaur, TPID Kab. Bengkulu Tengah, TPID TPID Kab. Lebong untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga menjelang HBKN Idulfitri, terutama Gas LPG 3 kilogram.
- s. (01-05/03 dan 9-12/03) Pelaksanaan “PASRAH MEMBARA” atau Pasar Murah Membantu Rakyat yang dirangkaikan dengan Safari Ramadhan Gubernur Bengkulu di 10 Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu.

3) Kelancaran Distribusi

- a. (18/02) Bapanas bersama Satgas Saber Pangan Bengkulu melakukan pemantauan dan pengawasan di Pasar Minggu Kota Bengkulu dan Pasar Rakyat Kabupaten Lebong, termasuk percepatan distribusi Minyakita dan penguatan pengawasan rantai pasok. Hal ini dirangkaikan dengan GPM di Pasar Muara Aman, Lebong.
- b. (16/03) Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) G2G Komoditas Inflasi antara Kab. Seluma dan Kab. Kepahiang.
- c. (16/03) Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) B2B Petani Cabai Merah Kab. Seluma dan Distributor Kota Bengkulu.
- d. (16/03) *Launching* simbolis Komitmen Penyaluran Program SPHP Jagung Provinsi Bengkulu oleh Badan Pangan Nasional melalui Bulog Provinsi Bengkulu kepada Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan (PINSAR) Provinsi Bengkulu.

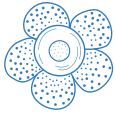
4) Komunikasi Efektif

- a. (19/01) Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan TPID Provinsi Bengkulu 2025 dan Rencana Kegiatan TPID Provinsi Bengkulu 2026.
- b. (26/01) Capacity Building TPID se-Provinsi Bengkulu dengan Narasumber Bapak Moch Edy Yusuf (Asisten Deputi Kemenko Perekonomian – Wakil Sekretariat TPIP) dan Prof M. Handry Imansyah (Guru Besar Univ Lambung Mangkurat – *External Reviewer* TPID Bank Indonesia) yang membahas mengenai Evaluasi Kinerja TPID se-Provinsi Bengkulu di 2025 dan Penguatan desain

pelaporan *one page summary* untuk dapat meningkatkan nilai laporan dalam TPID awards.

- c. (27/01) Capacity Building TPID se-Provinsi Bengkulu berupa presentasi dari seluruh TPID se-Provinsi Bengkulu dan pemberian saran dan evaluasi terhadap draft OPS Program Unggulan TPID dengan reviewer Bapak Josua Pasaribu (Analisis Kemenko Perekonomian – Wakil Sekretariat TPIP) dan Prof M. Handry Imansyah (Guru Besar Univ Lambung Mangkurat – *External Reviewer* TPID Bank Indonesia).
- d. (28/01) FGD dengan Kepala Regional SPPG Provinsi Bengkulu yang membahas mengenai rencana pemberian MBG pada Bulan Ramadhan dengan diversifikasi makanan yang dapat menjadi pemicu inflasi di ramadhan.
- e. Setiap Minggu — TPID se-Provinsi Bengkulu rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi melalui Zoom yang dipimpin oleh Kemendagri.
- f. (02-03/02) Pelaksanaan “PASRAH MEMBARA” atau Pasar Murah Membantu Rakyat Menjelang Ramadhan 1447 H di Halaman Gedung Balai Buntar dengan tujuan melakukan pengendalian inflasi dan menjaga ekspektasi masyarakat menjelang HBKN Ramadhan.
- g. (05/02) Pelaksanaan Pasar Murah Eragro (Ecer Rasa Grosir) oleh TPID Kab. Bengkulu Selatan yang bersinergi dengan Majelis Taklim Merah Putih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* para ibu untuk dapat berbelanja dengan bijak sesuai kebutuhan.
- h. (09-10/02) Pelaksanaan “PASRAH MEMBARA” atau Pasar Murah Membantu Rakyat Menjelang Ramadhan 1447 H di Halaman Kantor Lurah Kampung Bali dengan tujuan melakukan pengendalian inflasi dan menjaga ekspektasi masyarakat menjelang HBKN Ramadhan.
- i. Setiap minggu — TPID se-Provinsi Bengkulu rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi melalui Zoom yang dipimpin oleh Kemendagri.
- j. (03/03) Pelaksanaan Pasar Murah di Halaman Gedung UINFAS yang dirangkaikan dengan bazar dan edukasi CBP Rupiah.





- k. (03/03) Pelaksanaan *High Level Meeting* HBKN Ramadhan dan Idulfitri TPID Kab Lebong yang dipimpin oleh Bupati Kab Lebong, H. Azhari.
- l. (04/03) Pelaksanaan *High Level Meeting* HBKN Ramadhan dan Idulfitri TPID Kab Kepahiang yang dipimpin oleh Bupati Kab Kepahiang, H. Zurdi Nata.
- m. (16/03) Pelaksanaan *High Level Meeting* HBKN Ramadhan dan Idulfitri TPID Prov Bengkulu yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian.
- n. (16/03) Penandatanganan Seruan Bersama Belanja Bijak Ramadhan antara Kementerian Agama, MUI, Gubernur Bengkulu, dan Kepala KPwBI Provinsi Bengkulu.
- o. Setiap minggu — TPID se-Provinsi Bengkulu rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi melalui Zoom yang dipimpin oleh Kemendagri.



BOKS 2

Penguatan Kesiapan Proyek Investasi dan Promosi Potensi Daerah Melalui Blinc 3.0 dan Sumatra Connect 2026

Dalam upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong peningkatan kapasitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai tambah. Selain berkontribusi terhadap pembentukan modal, investasi juga berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan industri, hilirisasi komoditas unggulan, dan penguatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi Bengkulu, berbagai potensi yang dimiliki pada sektor perkebunan, perikanan, energi, industri pengolahan, hingga sektor jasa memberikan ruang yang luas bagi pengembangan investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, penguatan investasi memerlukan dukungan proyek investasi yang semakin berkualitas dan siap ditawarkan kepada investor. Berbagai potensi unggulan daerah juga perlu terus diperkenalkan melalui promosi yang terintegrasi agar mampu menjangkau investor, pelaku usaha, maupun mitra strategis yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Daerah terus mendorong penguatan ekosistem investasi daerah melalui berbagai inisiatif, antara lain melalui penyelenggaraan kegiatan **Bencoolen Investment Challenge (BLINC) 3.0** dan partisipasi dalam forum pariwisata se-Sumatra, **Sumatra Connect 2026**.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan proyek investasi daerah, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyelenggarakan kegiatan **Kick Off dan Capacity Building Bencoolen Investment Challenge (BLINC) 3.0** pada 15 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu,

pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian PPN/Bappenas, dan PwC Indonesia. Mengusung tema “Penguatan Kesiapan Proyek Investasi Daerah untuk Menjangkau Peluang Investasi Global”, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kualitas proyek investasi daerah sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun proyek yang semakin siap untuk ditawarkan kepada investor. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen penguatan koordinasi dan pelaporan investasi daerah dengan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan investasi di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh penguatan terkait penyusunan proyek investasi menggunakan pendekatan **5 Case Model (5CM)** yang mencakup aspek strategis, ekonomi, komersial, finansial, dan manajerial. Pendekatan tersebut memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam menyusun proyek investasi sehingga mampu menggambarkan manfaat, kelayakan, serta strategi implementasi proyek secara lebih terstruktur. Selain itu, peserta juga memperoleh wawasan mengenai perkembangan investasi global, strategi peningkatan *bankability* proyek, serta pentingnya *investor engagement* dalam mendukung keberhasilan promosi investasi daerah.

Berbagai materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya pengembangan proyek investasi yang mampu menciptakan nilai tambah dan mendukung transformasi ekonomi daerah. Dalam hal ini, proyek investasi tidak hanya dipandang sebagai peluang usaha, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan



sektor unggulan, memperkuat rantai nilai ekonomi, serta meningkatkan produktivitas daerah. Oleh karena itu, penguatan kesiapan proyek menjadi salah satu langkah penting agar berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Bengkulu dapat berkembang menjadi peluang investasi yang semakin menarik dan berkelanjutan.

Pelaksanaan BLINC 3.0 menunjukkan semakin beragamnya proyek investasi yang berkembang di Provinsi Bengkulu. Berbagai proyek yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota mencakup sektor hilirisasi komoditas perkebunan, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, energi terbarukan, pengembangan kawasan industri, hingga sektor pariwisata. Keberagaman tersebut mencerminkan luasnya peluang pengembangan ekonomi yang dimiliki Bengkulu sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek investasi yang dapat mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan. Melalui tahapan inkubasi, kurasi, dan *site visit investment roadshow* yang akan dilaksanakan selanjutnya, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat semakin matang dan siap untuk dipromosikan kepada investor.



Sumber : Bank Indonesia

Gambar B2.1 Pelaksanaan Kick Off dan Capacity Building BLINC 3.0 di Provinsi Bengkulu

Di samping penguatan kesiapan proyek investasi melalui BLINC 3.0, berbagai upaya juga terus dilakukan untuk

memperluas eksposur potensi unggulan Bengkulu kepada pasar yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, promosi daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkenalkan berbagai keunggulan yang dimiliki Bengkulu sekaligus membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat regional maupun nasional.

Upaya tersebut tercermin melalui partisipasi Provinsi Bengkulu pada **Sumatra Connect 2026**, sebuah forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata, asosiasi pariwisata, pelaku industri, dan serta *international travel agencies* guna mendorong pengembangan dan promosi pariwisata Sumatra. Mengusung konsep One Island Journey, forum ini mendorong penguatan kolaborasi antarprovinsi melalui pengembangan destinasi dan pengalaman wisata yang saling terhubung sehingga mampu meningkatkan daya tarik kawasan Sumatra secara keseluruhan.

Berbagai diskusi dalam *Sumatra Connect 2026* menyoroti pentingnya penguatan konektivitas antardaerah, integrasi paket wisata lintas provinsi, peningkatan kualitas amenities dan sumber daya manusia, sinkronisasi calendar of events, serta kolaborasi promosi sebagai langkah untuk memperkuat positioning Sumatra sebagai destinasi wisata terpadu. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak lagi dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah, melainkan melalui sinergi yang mampu menghadirkan pengalaman wisata yang lebih beragam dan terintegrasi.

Pada kesempatan tersebut, Provinsi Bengkulu mempromosikan konsep "*The Hidden Gem of Sumatra West Coast*" yang menempatkan Bengkulu sebagai destinasi yang memadukan kekayaan alam, sejarah, budaya, dan konservasi dalam satu pengalaman perjalanan. Bengkulu sebagai gerbang pesisir barat Sumatra menawarkan bentang pantai, kawasan pegunungan, perkebunan, desa wisata, serta warisan sejarah yang memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan bangsa Indonesia. Destinasi yang diperkenalkan antara lain Benteng Marlborough sebagai salah satu benteng peninggalan Inggris terbesar di Asia,



Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah Fatmawati, Pantai Panjang, serta wisata konservasi *Rafflesia Arnoldii* yang menjadi salah satu ikon keanekaragaman hayati Bengkulu. Selain itu, turut diperkenalkan potensi wisata berbasis masyarakat, konservasi gajah Seblat, kawasan Lebong Tandai, Desa Air Sempiang, hingga lanskap Gunung Kaba dan perkebunan teh Kabawetan sebagai bagian dari kekayaan pengalaman wisata yang dimiliki Bengkulu.

Kekayaan kuliner dan budaya lokal juga menjadi bagian penting dalam promosi tersebut. Berbagai kuliner khas seperti pendap, lempuk durian, hidangan laut, dan kopi Bengkulu diperkenalkan sebagai representasi cita rasa lokal. Batik Besurek turut diangkat sebagai salah satu identitas budaya Bengkulu yang merefleksikan jejak sejarah perdagangan dan interaksi budaya yang berkembang di wilayah pesisir barat Sumatra. Melalui konsep tersebut, Bengkulu dipromosikan tidak hanya sebagai destinasi wisata alam dan sejarah, tetapi juga sebagai daerah yang menawarkan pengalaman perjalanan yang autentik dan beragam, mulai dari wisata *heritage*, budaya, konservasi, hingga wisata berbasis komunitas.

Komitmen penguatan kolaborasi regional juga diwujudkan melalui penyusunan paket wisata terintegrasi *Southern Sumatra Wonder Trail* yang melibatkan Provinsi Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Paket ini dirancang sebagai pengalaman perjalanan lintas provinsi yang memadukan wisata sejarah dan budaya, wisata alam, wisata bahari, kuliner, serta pengalaman berbasis *wellness tourism* dan *slow travel* di wilayah Sumatra bagian selatan.

Melalui partisipasi dalam Sumatra Connect 2026, Provinsi Bengkulu tidak hanya memperoleh ruang untuk memperkenalkan destinasi wisata unggulan, tetapi juga memperluas jejaring kolaborasi dan meningkatkan visibilitas berbagai potensi daerah kepada pasar yang lebih luas. Ke depan, sinergi promosi dan kolaborasi antarwilayah diharapkan dapat semakin memperkuat eksposur Bengkulu sekaligus mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan aktivitas pariwisata.



Sumber : Bank Indonesia

Gambar B2.2 Partisipasi Provinsi Bengkulu pada Sumatra Connect 2026



BOKS 3

Prakiraan Inflasi 2026, Strategi Pengendalian Inflasi Daerah, dan Optimalisasi Peran KDKMP Mendukung Ketahanan Pangan



High Level Meeting TPID & Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik dari Kemendagri

Pengendalian inflasi daerah merupakan agenda strategis yang membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, BUMN pangan, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Di Provinsi Bengkulu, penguatan koordinasi tersebut terus dilakukan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik dalam bentuk rapat koordinasi rutin, sidak pasar, Gerakan Pangan Murah, maupun High Level Meeting (HLM) TPID yang melibatkan pimpinan daerah.

Pada Triwulan I 2026, pelaksanaan HLM TPID di Provinsi Bengkulu semakin diarahkan untuk memperkuat kesiapan daerah menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri. Periode tersebut secara historis memiliki risiko tekanan inflasi yang lebih tinggi, terutama pada komoditas



pangan strategis dan jasa transportasi. Oleh karena itu, HLM TPID menjadi momentum untuk menyatukan langkah antardaerah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi publik. Beberapa agenda strategis yang menjadi perhatian antara lain pemantauan harga dan stok pangan, kesiapan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, penguatan kerja sama antardaerah, serta penyampaian imbauan belanja bijak kepada masyarakat.

Pelaksanaan HLM TPID HBKN Ramadan dan Idulfitri di beberapa kabupaten/kota serta tingkat provinsi menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga. Di tingkat daerah, HLM TPID menjadi forum untuk mengidentifikasi komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan LPG 3 kilogram. Dari forum tersebut, pemerintah daerah bersama TPID dapat menyusun langkah tindak lanjut yang lebih konkret, antara lain pelaksanaan sidak pasar, percepatan distribusi komoditas strategis, perluasan

Gerakan Pangan Murah, serta penguatan koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha.

Salah satu capaian penting dalam penguatan koordinasi pengendalian inflasi di Bengkulu adalah pelaksanaan HLM TPID Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Bengkulu. Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi tingkat provinsi untuk memastikan seluruh TPID kabupaten/kota memiliki pemahaman dan arah kebijakan yang sama dalam menghadapi tekanan harga selama HBKN. Dalam forum tersebut, pengendalian inflasi tidak hanya dipahami sebagai respons atas kenaikan harga, tetapi juga sebagai upaya antisipatif melalui pemetaan risiko, penguatan data harga dan pasokan, serta percepatan implementasi program stabilisasi harga di lapangan.

Selain menjadi ruang koordinasi, HLM TPID juga menjadi media penguatan komitmen lintas pemangku kepentingan. Hal tersebut tercermin melalui penandatanganan Seruan Bersama Belanja Bijak Ramadan antara Kementerian Agama, MUI, Gubernur Bengkulu, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Seruan ini menjadi bagian dari strategi komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat agar tetap rasional dalam berbelanja, tidak melakukan pembelian berlebihan, serta mendukung stabilitas harga selama periode permintaan tinggi. Upaya komunikasi seperti ini menjadi penting karena perilaku konsumsi masyarakat dapat memengaruhi dinamika harga, terutama pada komoditas pangan yang pasokannya terbatas.

Dari sisi kelancaran distribusi, HLM TPID juga mendorong penguatan kerja sama antardaerah sebagai upaya memastikan pasokan komoditas strategis tetap terjaga. Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) G2G komoditas inflasi antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kepahiang serta KAD B2B antara petani cabai merah Kabupaten Seluma dan distributor Kota Bengkulu menjadi langkah konkret untuk memperpendek rantai pasok dan memperkuat kepastian suplai. Langkah tersebut penting mengingat tekanan inflasi Bengkulu kerap dipengaruhi oleh komoditas hortikultura yang

sangat sensitif terhadap cuaca, masa panen, dan hambatan distribusi.

Penguatan pengendalian inflasi juga dilakukan melalui dukungan pada sisi pasokan. Launching simbolis komitmen penyaluran Program SPHP Jagung Provinsi Bengkulu oleh Badan Pangan Nasional melalui Bulog Provinsi Bengkulu kepada PINSAR Provinsi Bengkulu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap stabilisasi harga pakan dan keberlanjutan pasokan protein hewani. Langkah ini relevan mengingat harga daging ayam ras dan telur ayam ras memiliki keterkaitan erat dengan biaya pakan. Dengan dukungan pasokan jagung yang lebih terjaga, tekanan biaya produksi pada sektor perunggasan diharapkan dapat lebih terkendali dan tidak sepenuhnya diteruskan ke harga konsumen.

Berbagai langkah tersebut turut memperkuat kinerja pengendalian inflasi daerah dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Provinsi Bengkulu memperoleh penghargaan pengendalian inflasi terbaik dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi daerah dalam menjaga stabilitas harga. Penghargaan ini mencerminkan semakin kuatnya kualitas koordinasi TPID, efektivitas pelaksanaan program pengendalian inflasi, serta komitmen pemerintah daerah dalam merespons tekanan harga secara cepat dan terukur.

Penghargaan tersebut juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi oleh ketepatan sasaran, keberlanjutan program, dan kuatnya tindak lanjut di lapangan. Gerakan Pangan Murah, sidak pasar, pasar murah menjelang HBKN, penguatan KAD, serta komunikasi belanja bijak perlu terus diarahkan agar semakin berbasis data dan menjawab sumber tekanan inflasi yang nyata. Dengan demikian, program pengendalian inflasi dapat memberi dampak langsung terhadap keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat.

Ke depan, HLM TPID perlu terus diperkuat sebagai forum strategis untuk membaca risiko inflasi secara lebih dini dan merumuskan langkah kebijakan yang responsif.



BOKS 3

Prakiraan Inflasi 2026, Strategi Pengendalian Inflasi Daerah, dan Optimalisasi Peran KDKMP Mendukung Ketahanan Pangan

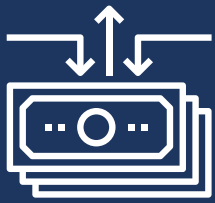
Penguatan data harga harian, pemetaan stok dan distribusi, pemanfaatan jejaring KAD, serta optimalisasi peran perangkat daerah menjadi agenda penting agar intervensi TPID semakin presisi. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, Bapanas, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus dijaga agar inflasi Bengkulu tetap terkendali dalam rentang sasaran.

Secara keseluruhan, pelaksanaan HLM TPID dan diraihnya penghargaan pengendalian inflasi terbaik dari Kemendagri menunjukkan bahwa koordinasi pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu semakin solid dan adaptif. Capaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat strategi 4K secara berkelanjutan, menjaga stabilitas harga pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung perekonomian daerah yang lebih inklusif dan berdaya tahansinergi TPID, ketepatan implementasi strategi 4K, serta optimalisasi peran KDKMP yang lebih fungsional dan terintegrasi menjadi kunci untuk menjaga inflasi tetap terkendali, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

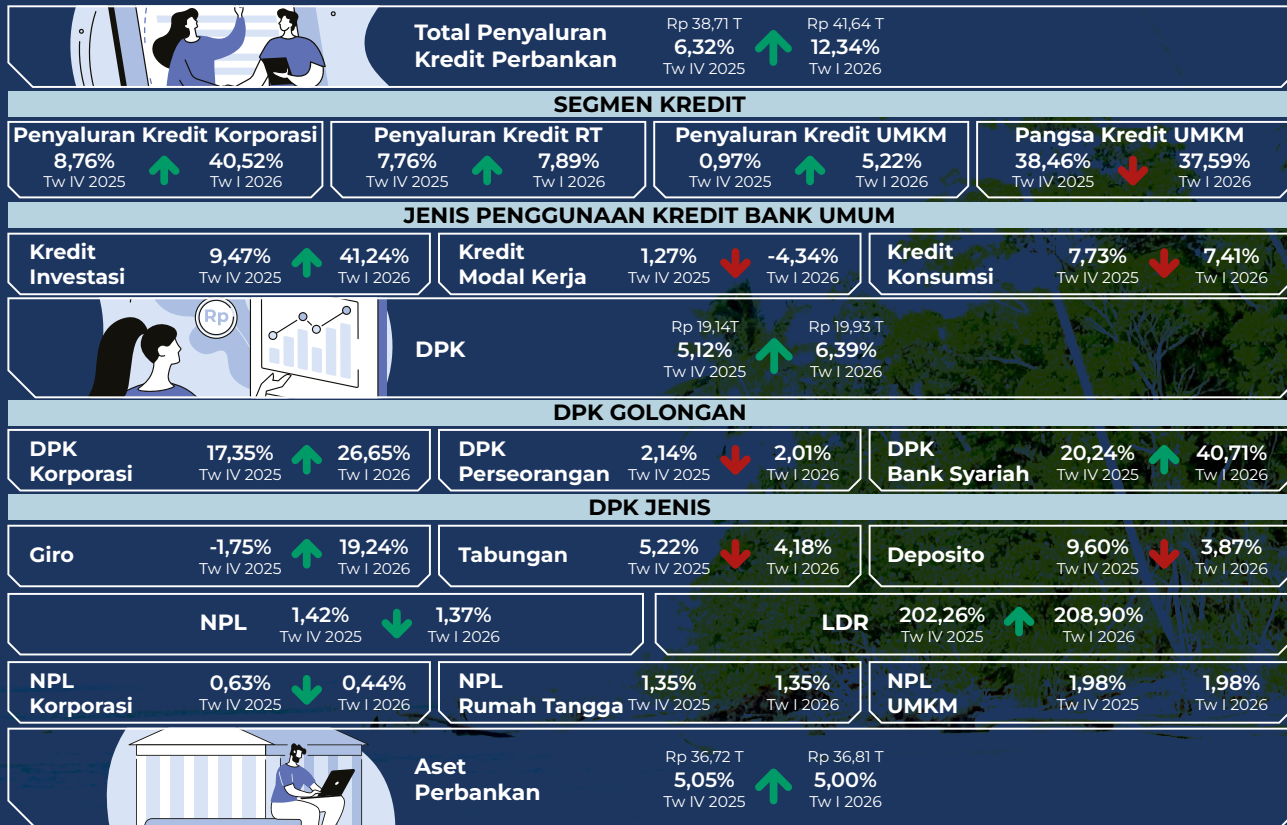




BAB 3



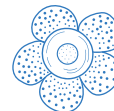
PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM



Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu pada periode triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga dari sisi rumah tangga, korporasi dan perbankan secara umum.

- Intermediasi perbankan tetap terjaga dengan ditopang oleh pertumbuhan kredit yang positif. Peningkatan tingkat *Loan to Deposit Ratio* mencerminkan peningkatan rasio penyaluran kredit yang lebih besar dibandingkan tingkat penghimpunan dana. Namun demikian, kualitas kredit tetap terjaga dengan membaiknya rasio kredit bermasalah/*Non-Performing Loan/Funding*.
- Kinerja penyaluran kredit pada triwulan laporan mengalami peningkatan didorong oleh pertumbuhan kredit investasi yang meningkat signifikan dan kredit konsumsi yang terus tumbuh meski sedikit melambat.
- Kinerja penghimpunan dana tercatat positif sebagaimana ditunjukkan oleh posisi DPK yang meningkat pada tabungan, deposito, dan giro dengan pertumbuhan yang menguat. Sejalan dengan hal tersebut, aset perbankan tercatat tetap positif meski sedikit melambat.
- Kinerja perbankan syariah cenderung meningkat disertai dengan peningkatan pangsa perbankan syariah pada triwulan laporan.
- Pada triwulan I 2026, penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya dengan NPL yang relatif stagnan dan tetap di bawah batas aman NPL.





3.1 GAMBARAN UMUM

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tetap terpelihara dari sisi rumah tangga.

Kinerja fungsi intermediasi perbankan pada segmen rumah tangga masih berlangsung dengan baik, tercermin dari penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 7,89% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut masih ditopang oleh perkembangan kredit multiguna dengan laju pertumbuhan sebesar 10,70% (yoy) pada periode laporan, menguat dibandingkan dengan triwulan IV 2025. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan permintaan terhadap pembiayaan berbagai kebutuhan rumah tangga. Dari sisi DPK, simpanan rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 2,01% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,14% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan kecenderungan rumah tangga untuk tetap menjaga tingkat likuiditasnya. Adapun tingkat risiko kredit cenderung stabil pada periode laporan, ditunjukkan oleh tingkat *non-performing loan* yang berada di level 1,35%, sama dengan kondisi pada triwulan sebelumnya.

Kondisi penyaluran kredit korporasi di Provinsi Bengkulu tumbuh menguat signifikan pada triwulan laporan, dengan tingkat risiko kredit yang membaik.

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 40,52% (yoy), menguat signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 8,76% (yoy). Akselerasi ini terutama didorong oleh pertumbuhan kredit investasi yang meningkat tajam sebesar 81,50% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 4,08% (yoy). Namun demikian, peningkatan tersebut sedikit tertahan oleh kinerja kredit modal kerja yang mengalami kontraksi sebesar -1,71% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,57% (yoy). Lebih lanjut, kualitas kredit korporasi terpantau membaik, tercermin dari rasio NPL yang menurun menjadi 0,44%, dan tetap berada di bawah ambang batas aman sebesar 5%. **Terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Bengkulu tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap positif dan penyaluran kredit 2025 menunjukkan pertumbuhan.** Dana pihak ketiga yang dikelola oleh

perbankan pada triwulan I 2026 ialah sebesar Rp19,93 triliun dengan pertumbuhan 6,39% (yoy) atau sedikit menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,12% (yoy). Perbankan Provinsi Bengkulu masih bertumpu pada sektor rumah tangga untuk ketersediaan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pangsa 75,09% dari keseluruhan DPK. Penyaluran kredit Perbankan juga tumbuh positif dengan laju pertumbuhan yang sedikit menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit pada periode laporan tercatat sebesar Rp41,64 triliun atau tumbuh sebesar 12,34% (yoy). Peningkatan ini utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit investasi dan kredit konsumsi yang menguat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni masing-masing tercatat sebesar 41,24% (yoy) dan 7,41% (yoy). Pertumbuhan kredit modal kerja tercatat menurun sebesar dan -4,34% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit konsumsi memiliki pangsa kredit terbesar yang mencakup 44,72% dari total penyaluran kredit.

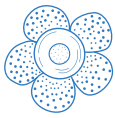
Besarnya pangsa kredit konsumsi juga sejalan dengan disgregasi ekonomi Provinsi Bengkulu yang mayoritas disumbangkan oleh pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Risiko kredit konsumsi pada triwulan berjalan tetap terkendali dengan NPL di bawah batas aman 5%.

Kinerja intermediasi perbankan secara umum di Provinsi Bengkulu masih terjaga pada triwulan I 2026.

Intermediasi perbankan secara umum yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio (LDR)* pada triwulan laporan yang tercatat sebesar 208,90% atau meningkat dari triwulan IV 2025 yang sebesar 202,26%. Peningkatan tingkat LDR dipicu tingkat penyaluran kredit yang lebih besar dibandingkan tingkat penghimpunan dana. Adapun nilai LDR di atas 100% menunjukkan bahwa penyaluran kredit di Provinsi Bengkulu dipenuhi oleh perbankan luar Provinsi Bengkulu. Sementara itu, tingkat *non-performing loan* menurun di level 1,37%, mengindikasikan kualitas kredit yang lebih baik pada periode laporan.

Kinerja perbankan syariah di Provinsi Bengkulu relatif meningkat pada triwulan I 2026 yang disertai peningkatan pangsa perbankan syariah dan peningkatan kualitas pembiayaan.





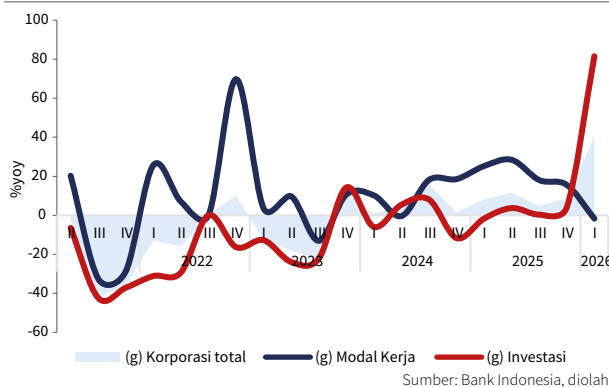
syariah di Provinsi Bengkulu berada pada kisaran 11,31%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,86%, dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada kisaran 7,69%. Lebih lanjut, peningkatan kualitas pembiayaan tercermin dari penurunan *level Non-Performing Financing* (NPF) pada triwulan I 2026 yang sebesar 1,21% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1,5% (yoy).

Aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan masih terjaga. Pada triwulan laporan pangsa kredit UMKM sebesar 37,59% dari total kredit, atau cenderung menurun dari triwulan sebelumnya yaitu 38,46% dari total kredit. Hal ini disertai risiko kredit UMKM yang masih relatif stagnan di angka 1,98%, tetap berada di bawah batas aman NPL 5%.

3.2 KORPORASI DAN RUMAH TANGGA

Eksposur Perbankan Terhadap Korporasi

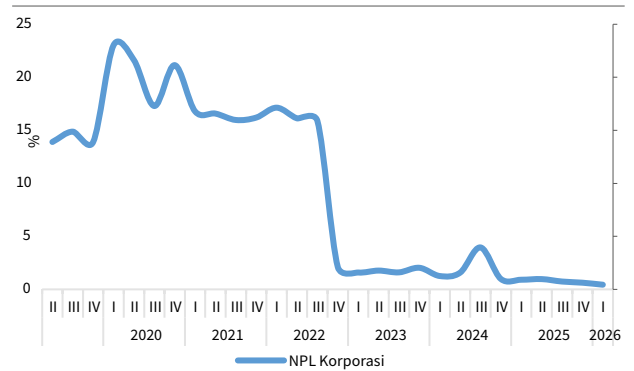
Secara umum, penyaluran kredit dari segmen korporasi pada triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Penyaluran kredit korporasi tercatat tumbuh meningkat menguat sebesar 40,52% (yoy), setelah pada periode sebelumnya mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 8,76% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan kredit korporasi ini terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kredit investasi dari 4,08% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 81,50% (yoy) pada triwulan I 2026. Kondisi ini sedikit tertahan dengan melambatnya pertumbuhan kredit modal kerja yang sebelumnya tumbuh sebesar 15,57% (yoy) pada triwulan IV 2025 terkoreksi menjadi -1,71% (yoy) pada triwulan I 2026. (Grafik 3.1).



Grafik 3.1 Perkembangan Kredit Korporasi

Lebih lanjut, kredit investasi masih menjadi pasar kredit utama untuk korporasi di Provinsi Bengkulu yang mencakup 66,12% dari total kredit korporasi Provinsi Bengkulu, dilanjutkan oleh kredit modal kerja sebesar 28,02%.

Dari sisi kerentanan pembiayaan, rasio *non-performing loan* (NPL) kredit korporasi tercatat sebesar 0,44%, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 0,63% (Grafik 3.2). Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas kredit korporasi di Provinsi Bengkulu. Selain itu, tingkat NPL tersebut masih berada jauh di bawah ambang batas 5%, yang mengindikasikan bahwa kemampuan pembayaran korporasi tetap terjaga di tengah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu saat ini.

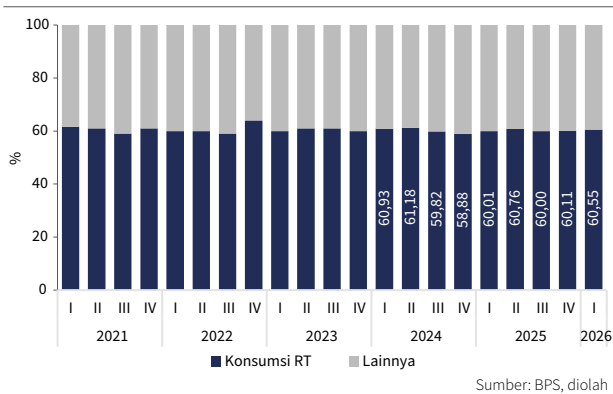
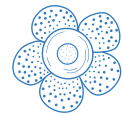


Grafik 3.2 Perkembangan NPL Korporasi

Kinerja dan Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Perekonomian Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada triwulan I 2026, kontribusi konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 60,55% terhadap total pertumbuhan ekonomi, sedikit meningkat jika dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 60,11% (Grafik 3.3). Tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas daya beli masyarakat dan libur hari raya Idulfitri.

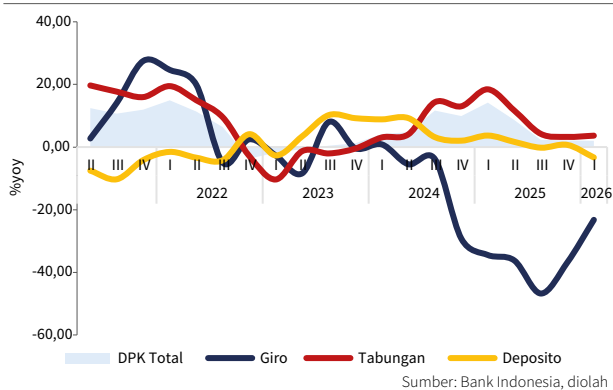




Grafik 3.3 Kontribusi Pertumbuhan Konsumsi RT

Eksposur Perbankan Terhadap Rumah Tangga

Perbankan Provinsi Bengkulu mendapatkan mayoritas sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) dari **Simpanan Rumah Tangga**. Simpanan rumah tangga tercatat memiliki pangsa 75,09% dari total simpanan perbankan, mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 79,55%. Sebaliknya, pangsa simpanan pemerintah meningkat dari 4,30% pada triwulan sebelumnya menjadi 8,01% pada triwulan laporan. Pada triwulan I tahun 2026, simpanan rumah tangga tumbuh sebesar 2,01% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 2,14% (yoy) (Grafik 3.4). Kondisi tersebut mencerminkan kecenderungan rumah tangga dalam menjaga tingkat likuiditas di tengah peningkatan konsumsi, serta mengindikasikan adanya potensi pengalihan sebagian dana ke instrumen keuangan di luar simpanan perbankan.

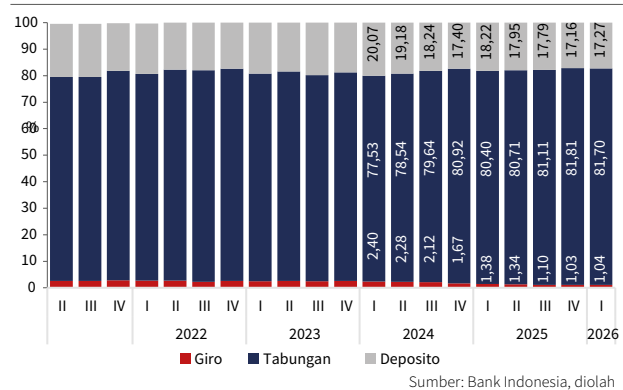


Grafik 3.4 Perkembangan DPK Rumah Tangga

Tabungan tetap menjadi jenis simpanan yang paling diminati oleh rumah tangga di Provinsi Bengkulu dengan

pangsa sebesar 81,70% (Grafik 3.5), meskipun sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 81,81%.

Secara umum, Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga pada triwulan I 2026 menunjukkan perbaikan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tabungan meningkat menjadi 3,64% (yoy) dari 3,25% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, deposito mengalami kontraksi sebesar -3,32% (yoy) setelah sebelumnya tumbuh 0,69% (yoy). Di sisi lain, giro masih mencatatkan kontraksi sejak triwulan II 2024, dengan penurunan sebesar 23,24% (yoy) pada triwulan I 2026, namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 36,83% (yoy). Perkembangan ini mencerminkan pola simpanan rumah tangga yang cenderung tertahan di tengah dinamika perekonomian Provinsi Bengkulu.

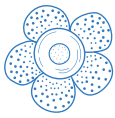


Grafik 3.5 Pangsa Jenis DPK Rumah Tangga

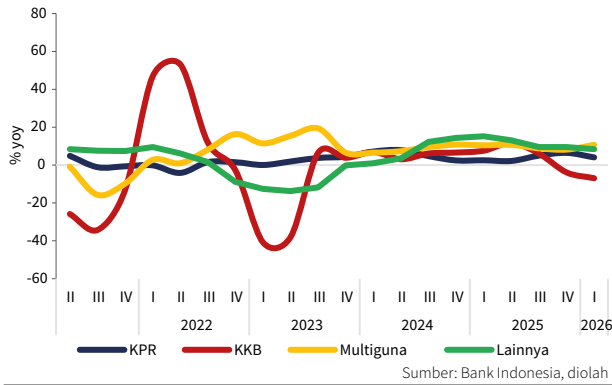
Dari sisi penyaluran kredit rumah tangga, pada triwulan I 2026 pertumbuhan terpantau menguat.

Penyaluran kredit rumah tangga (RT) pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 7,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,75% (yoy). Peningkatan ini terjadi di tengah perlambatan pertumbuhan kredit RT pada segmen Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR). Pertumbuhan KKB tercatat sebesar -6,94% (yoy), terkoreksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya -3,86% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan KPR tercatat sebesar 4,06% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,45% (yoy). Di sisi lain, kinerja kredit multiguna menunjukkan



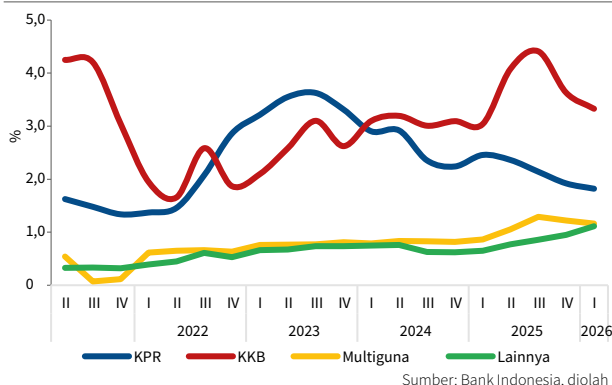


perbaikan, dengan pertumbuhan 10,70% (yoy) meningkat dari pada triwulan sebelumnya 8,19% (yoy), yang mengindikasikan penguatan permintaan pembiayaan berbagai kebutuhan pada periode laporan.



Grafik 3.6 Perkembangan Kredit Rumah Tangga

Menguatnya pertumbuhan kredit rumah tangga dibarengi dengan tingkat *non performing loan* di triwulan I 2026 yang cenderung stabil. Rasio NPL yang pada triwulan laporan tercatat tetap dibandingkan dengan triwulan I 2026 dengan kondisi yang sama sebesar 1,35% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kredit yang bermasalah relatif tertahan. Rasio tersebut masih berada di bawah level indikatif 5% yang menunjukkan kondisi kualitas kredit yang masih terjaga (Grafik 3.7).



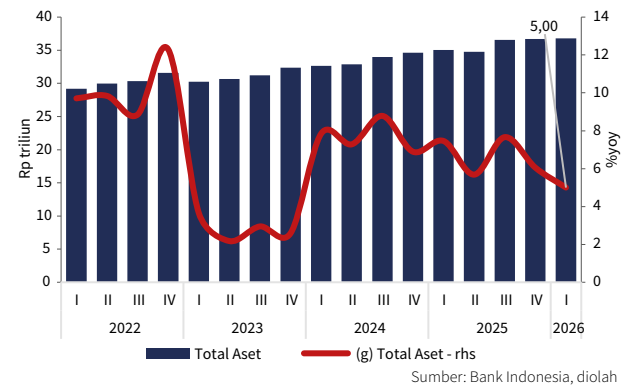
Grafik 3.7 Perkembangan NPL Rumah Tangga

3.3 PERKEMBANGAN BANK UMUM

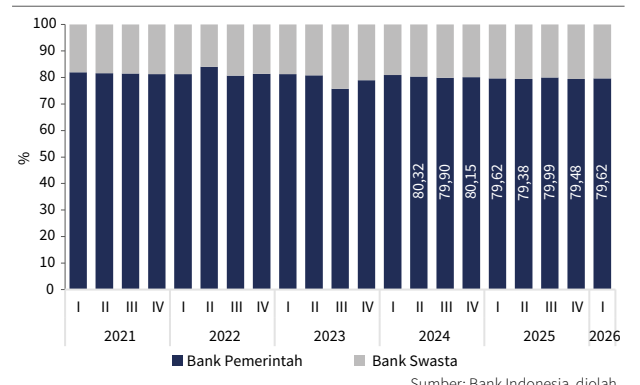
Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh pada triwulan I tahun 2026 sejalan dengan tetap terjaganya kinerja indikator perbankan. Aset bank umum di Provinsi Bengkulu pada triwulan laporan tercatat meningkat menjadi Rp37,01 triliun atau tumbuh sebesar 5,57% (yoy). Jumlah aset tersebut mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 36,72 triliun dengan pertumbuhan 6,05% (yoy) (Grafik 3.8).

Berdasarkan kepemilikannya, aset perbankan di Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh aset bank umum milik pemerintah, dengan pangsa mencapai 79,62% (Grafik 3.9). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 79,48%.

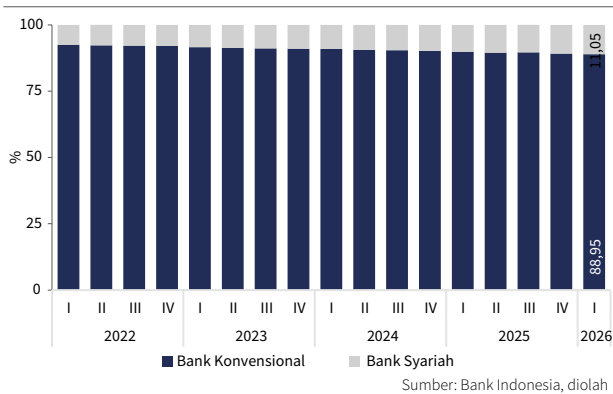
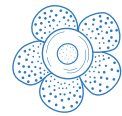


Grafik 3.8 Aset Bank Umum di Provinsi Bengkulu

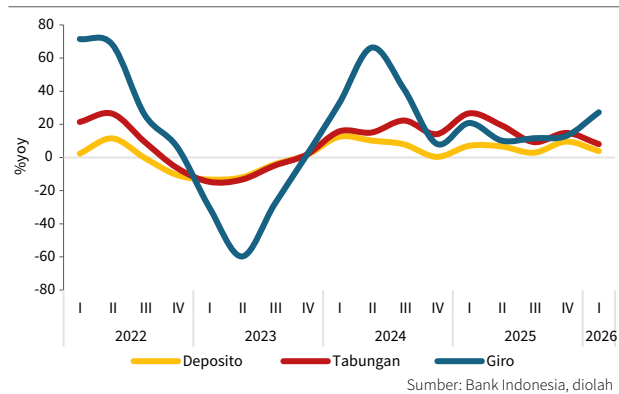


Grafik 3.9 Aset Bank Umum Berdasarkan Kepemilikan

Aset perbankan di Provinsi Bengkulu pada periode laporan masih didominasi oleh bank konvensional dengan pangsa sebesar 88,95% dari total aset. Porsi ini sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 89,14%. Di sisi lain, pangsa pasar bank syariah pada triwulan I 2026 mencapai 11,05%, meningkat secara moderat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 10,86% dari total aset. Relatif stabilnya pangsa aset bank syariah tersebut mencerminkan adanya peningkatan dan keberlanjutan minat masyarakat terhadap produk serta layanan perbankan syariah. (Grafik 3.10).



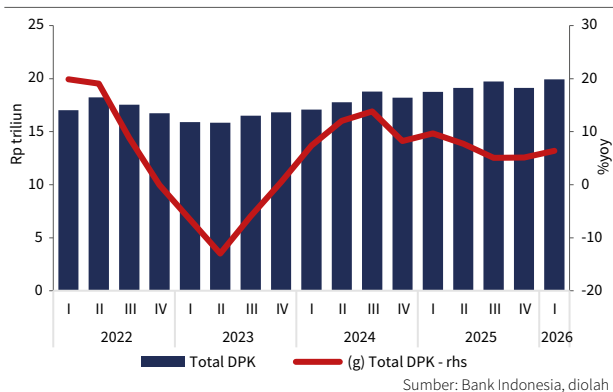
Grafik 3.10 Aset Bank Berdasarkan Sistem



Grafik 3.12 Pertumbuhan DPK Bank Umum

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Secara umum, pertumbuhan DPK pada Triwulan I 2026 secara tahunan (yoy) mengalami pertumbuhan sedikit meningkat. Total DPK pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp19,93 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 6,39% (yoy), tumbuh menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,12% (yoy) dengan posisi DPK sebesar Rp19,14 triliun (Grafik 3.11).

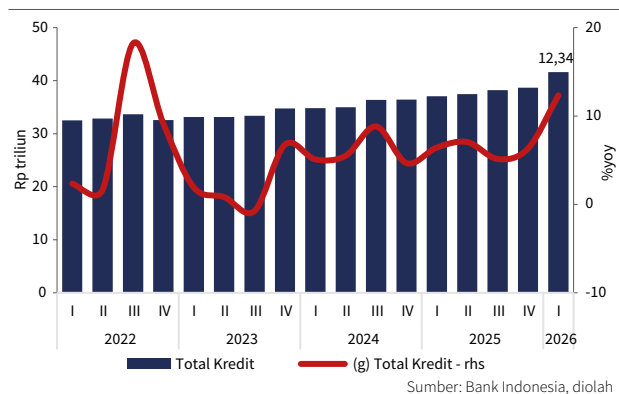


Grafik 3.11 Perkembangan Total DPK Bank Umum

Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Provinsi Bengkulu terdiri dari produk tabungan, giro, dan deposito dengan masing-masing bernilai sebesar Rp13,02 triliun, Rp3,36 triliun, dan Rp3,55 triliun. Pada triwulan I 2026, giro tumbuh meningkat signifikan mencapai 19,24% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -1,75% (yoy). Di sisi lain, tabungan tumbuh sebesar 4,18% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,22% (yoy). Begitu pula dengan deposito, tercatat tumbuh melambat menjadi 3,87% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,60% (yoy) (Grafik 3.12).

Perkembangan Penyaluran Kredit

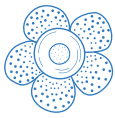
Kredit perbankan menunjukkan pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang menguat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Adapun penyaluran kredit pada periode laporan tercatat sebesar Rp41.64 triliun atau tumbuh sebesar 12,34 % (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 6,32 % (yoy) dengan total kredit Rp38,71 triliun. (Grafik 3.13).



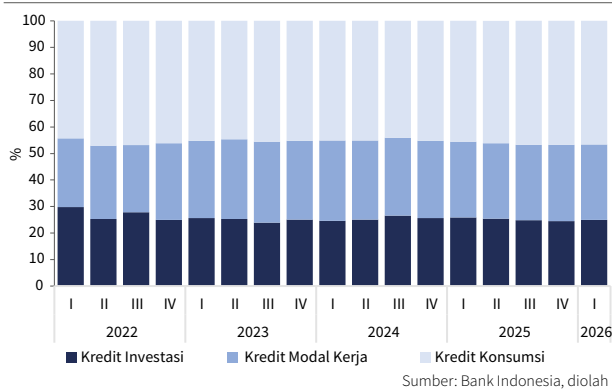
Grafik 3.13 Penyaluran Kredit Bank Umum

Kredit berdasarkan jenis penggunaannya dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Di Provinsi Bengkulu, kredit konsumsi masih menjadi penopang utama penyaluran kredit dengan pangsa sebesar 44,72% pada periode laporan. Porsi ini mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar 47,29%. Selanjutnya, jenis penggunaan kredit terbesar kedua adalah kredit investasi dengan pangsa 30,84%, kemudian diikuti oleh kredit modal kerja dengan pangsa 24,44% (Grafik 3.14).. Komposisi ini menunjukkan bahwa



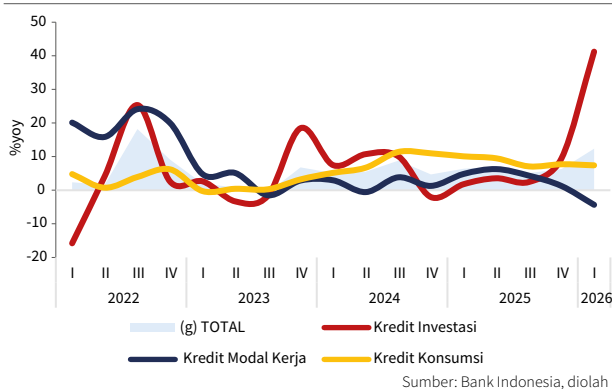


penyaluran kredit di Bengkulu masih didominasi oleh kebutuhan konsumtif, meskipun peran kredit produktif baik investasi maupun modal kerja tetap signifikan.



Grafik 3.14 Pangsa Kredit Bank Umum Jenis Penggunaan

Dari sisi pertumbuhan, kredit konsumsi tercatat tumbuh sebesar 7,41% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,73% (yoy). Di sisi lain, kredit investasi menunjukkan penguatan pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni mencapai 41,24% (yoy), meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya yang hanya tumbuh 9,47% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit modal kerja terpantau melandai dan berkontraksi sebesar -4,34% (yoy) pada periode laporan, setelah pada triwulan sebelumnya masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 1,27% (yoy) (Grafik 3.15).

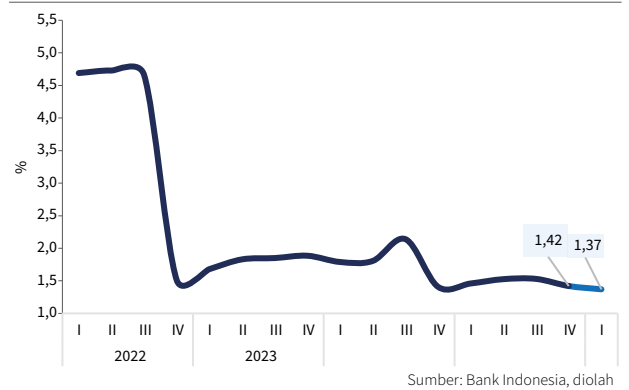


Grafik 3.15 Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan

Risiko Stabilitas Sistem Keuangan

Pada triwulan I 2026, risiko kredit tetap terjaga dengan nilai yang masih cukup rendah. Non performing loan kredit perbankan Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 1,36%, lebih rendah dibandingkan

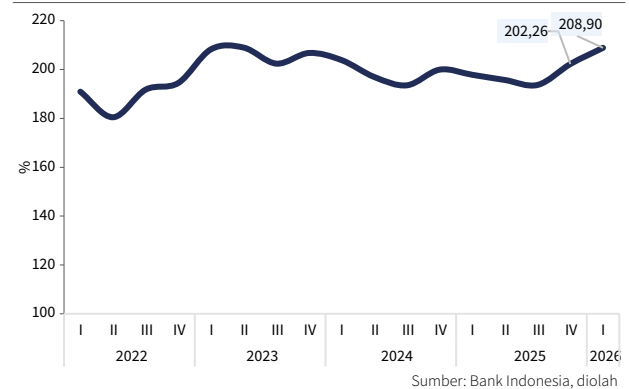
triwulan sebelumnya, yakni sebesar 1,42% dari (Grafik 3.16). Hal ini mencerminkan kualitas kredit yang kian baik di Provinsi Bengkulu. Angka NPL ini masih berada di bawah 5% yang menandakan jika kemampuan bayar pelaku usaha cukup baik di tengah perekonomian saat ini.



Grafik 3.16 NPL Bengkulu (Lokasi Proyek)

Kinerja intermediasi perbankan secara umum di Provinsi Bengkulu masih terjaga.

Intermediasi perbankan tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR), dimana pada triwulan laporan tercatat sebesar 208,90%. Kondisi ini meningkat dari triwulan IV 2025 dengan LDR sebesar 202,26%. (Grafik 3.17). Peningkatan rasio LDR ini menunjukkan bahwa tingkat penyaluran dana kredit lebih tinggi dibandingkan tingkat penghimpunan dana.



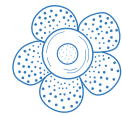
Grafik 3.17 LDR Bengkulu (Lokasi Proyek)

3.4 PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

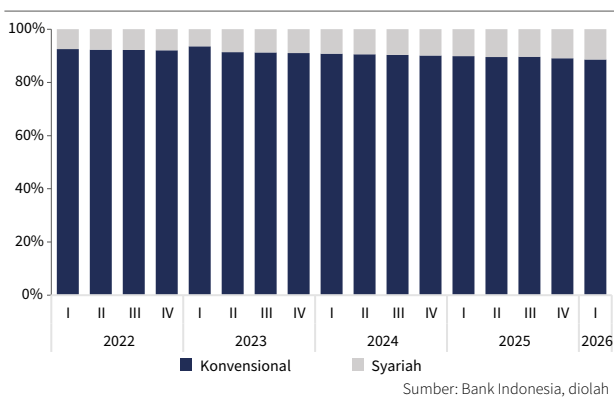
Perkembangan Aset Bank Syariah

Aset bank syariah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp4.165 triliun atau tumbuh sebesar 17,41% (yoy), angka tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian





pada triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 17,22% (yoy). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan total aset perbankan secara keseluruhan (konvensional dan syariah), aset bank syariah di Bengkulu saat ini memiliki pangsa pasar sebesar 11,31%, angka ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 10,86% (Grafik 3.18). Pangsa aset bank syariah di Bengkulu tercatat di atas rata-rata nasional yang berada sekitar 7,69% dari total aset perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perkembangan perbankan syariah cukup tinggi namun perlu terus dioptimalkan untuk mendorong akseptasi dan akses keuangan yang lebih luas.

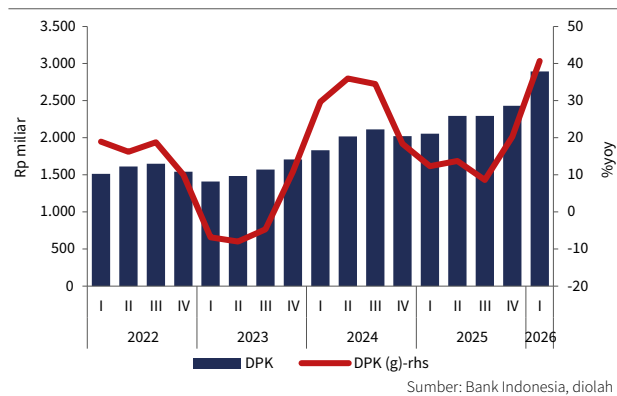


Grafik 3.18 Distribusi Aset Bank Syariah

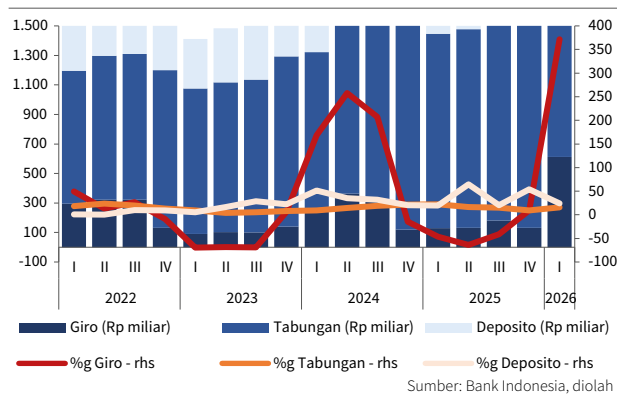
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah

DPK perbankan syariah mengalami peningkatan pada triwulan I 2026. DPK mengalami peningkatan pada triwulan laporan 2026 menjadi 40,71% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar 20,28% (yoy) (Grafik 3.19). Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar 12,30% (yoy).

Peningkatan jumlah DPK bersumber dari peningkatan komponen giro sebesar 371,63% (yoy) pada triwulan I 2026 dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 9,24% (yoy). Peningkatan juga dialami oleh komponen tabungan yang mengalami pertumbuhan sebesar 15,66% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 9,10% (yoy). Di sisi lain, komponen deposito mengalami penurunan yaitu sebesar 24,23% (yoy) jika dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 54,23% (yoy).



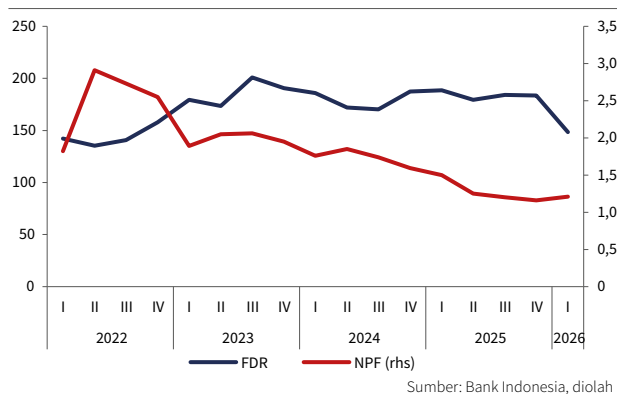
Grafik 3.19 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Grafik 3.20 Komponen DPK Bank Syariah

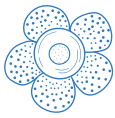
Risiko Stabilitas Sistem Keuangan Syariah

Dari sisi kualitas pembiayaan, terdapat peningkatan kualitas pembiayaan perbankan syariah pada triwulan I 2026. Peningkatan kualitas tercermin dari penurunan level *Non-Performing Financing* (NPF) pada triwulan I 2026 yang sebesar 1,21% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1,5% (yoy) (Grafik 3.21). Sementara itu, rasio intermediasi perbankan yang tercermin *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tercatat menurun pada triwulan I 2026 sebesar 148,32% dari triwulan sebelumnya sebesar 183,42%.



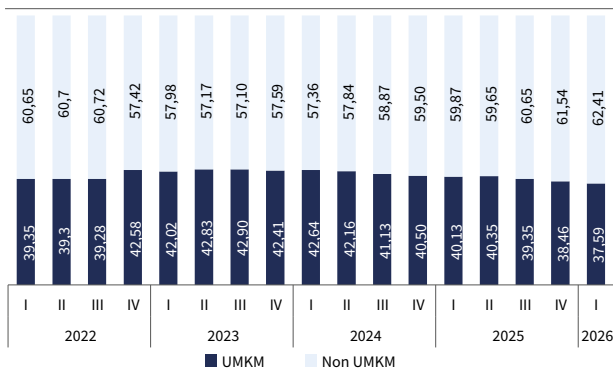
Grafik 3.21 NPF dan FDR Perbankan Syariah





3.5 SEKTOR UMKM

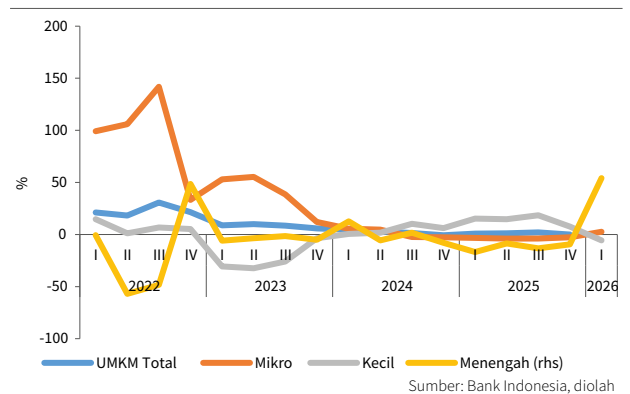
UMKM merupakan salah satu pilar pendukung ketahanan perekonomian bangsa. Secara historis, UMKM merupakan kelompok usaha yang dapat menjadi *buffer* perekonomian pada saat krisis. Oleh sebab itu, dukungan terhadap pengembangan UMKM perlu terus ditingkatkan. Salah satu indikator untuk melihat pengembangan UMKM adalah tingkat penyaluran kredit perbankan terhadap UMKM. Penyaluran kredit kepada UMKM memiliki porsi yang cukup signifikan terhadap total pangsa pasar kredit Provinsi Bengkulu. Pada triwulan I 2026, pangsa pasar kredit UMKM dari total penyaluran kredit melambat sebesar 37,59%, dari triwulan sebelumnya yaitu 38,46% (Grafik 3.22).



Grafik 3.22 Pangsa Kredit UMKM

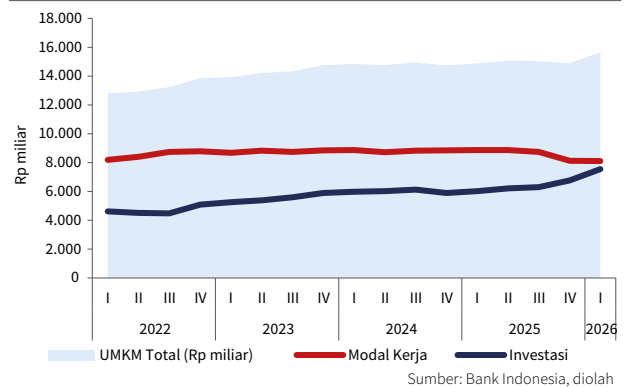
Penyaluran Kredit UMKM

Penyaluran kredit UMKM Provinsi Bengkulu meningkat yaitu sebesar 3,60% (yoy) pada triwulan I 2026, dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 0,08% (yoy). Peningkatan kredit UMKM disebabkan oleh meningkatnya penyaluran kredit kepada UMKM skala menengah secara signifikan pada triwulan I 2026 yaitu sebesar 54,12% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -9,59% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit UMKM skala mikro tumbuh menjadi 2,73% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -2,74% (yoy). Di sisi lain, penyaluran kredit pada usaha kecil pada triwulan I 2026 berkontraksi menjadi -5,70% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -7,51% (yoy) (Grafik 3.23).



Grafik 3.23 Penyaluran Kredit UMKM

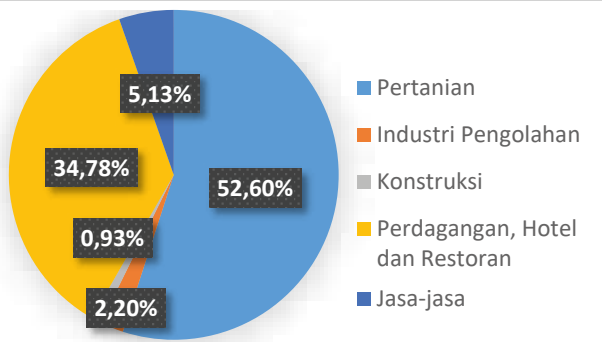
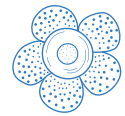
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM mayoritas disalurkan untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dengan pangsa pasar sebesar 51,78% dan sisanya disalurkan untuk Kredit Investasi (KI) sebesar 48,22%. KMK pada triwulan I 2026 melambat sebesar -8,53% (yoy), di sisi lain komponen Kredit Investasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 25,47% (yoy). Adapun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nominal kredit UMKM berdasarkan jenis penggunaannya mengalami pertumbuhan sebesar 5,22% dengan nominal Rp15,65 triliun (Grafik 3.24).



Grafik 3.24 Nominal Kredit UMKM Jenis Penggunaan

Berdasarkan sektor ekonomi, sektor pertanian dan perdagangan merupakan sektor dengan pangsa kredit UMKM terbesar yang mencapai 52,60% dan 34,78% dari total kredit UMKM di triwulan I 2026 (Grafik 3.25). Di sisi lain, pertumbuhan kredit lapangan usaha pertanian tumbuh pada triwulan laporan yaitu sebesar 17,31% (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV 2025 sebesar 8,60% (yoy). Tren tersebut juga berlangsung pada sektor konstruksi yang tumbuh sebesar -27,26% (yoy), dibandingkan periode sebelumnya -49,84% (yoy).





Sumber: Bank Indonesia, diolah

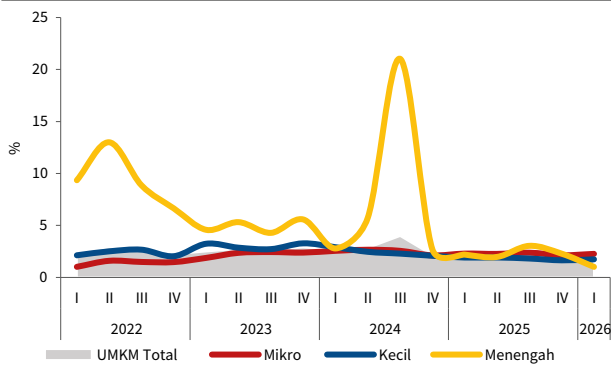
Grafik 3.25 Distribusi Penyaluran Kredit UMKM Lapangan Usaha

Sejalan dengan komposisi PDRB, penyaluran kredit UMKM didominasi oleh LU utama daerah. Pada triwulan I 2026, distribusi penyaluran kredit masih didominasi pada lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha perdagangan dengan pangsa lebih dari 85% total penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bengkulu (Grafik 3.25). Selanjutnya distribusi kredit UMKM disumbangkan dari sektor jasa, industri pengolahan, dan konstruksi.

Perkembangan Risiko Kredit UMKM

Berdasarkan risiko kredit, NPL kredit UMKM pada triwulan I 2026 relatif stagnan dibandingkan triwulan sebelumnya. NPL kredit UMKM triwulan I 2026 tercatat 1,98%, masih sama dengan triwulan IV 2025 sebesar 1,98% (Grafik 3.26).

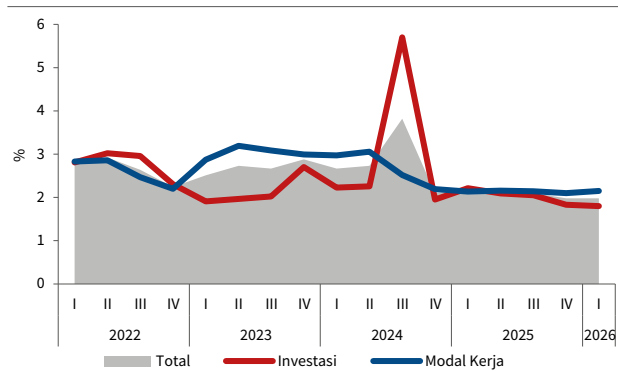
NPL kredit skala usaha menengah mengalami penurunan NPL signifikan pada posisi 1,02% dibandingkan triwulan sebelumnya 2,29%. Di sisi lain, Adapun NPL kredit UMKM skala kecil mengalami peningkatan menjadi 1,74%, dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,65%. Selanjutnya, NPL pada kredit skala mikro turut meningkat menjadi 2,27% dari triwulan sebelumnya sebesar 2,13%.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.26 NPL Kredit UMKM Skala Usaha

Berdasarkan jenis penggunaan, NPL UMKM triwulan I 2026 untuk Kredit Modal Kerja tercatat sebesar 2,15% (yoy), meningkat dari triwulan IV 2025 sebesar 2,10% (yoy). Selanjutnya, NPL UMKM untuk Kredit Investasi tercatat sebesar 1,80%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 1,83% (yoy). Sehingga, total NPL dari dua sektor tersebut pada triwulan I 2026 sebesar 1,98%, masih sama dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,98% (Grafik 3.27). Hal ini menunjukkan secara agregat masih dibawah batas aman NPL sebesar 5%.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.27 NPL Kredit UMKM Jenis Penggunaan





BAB 4



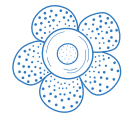
SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG RUPIAH

<p>Inflow Uang Kartal</p> <p>Rp 715M Tw IV 2025</p> <p>↑</p>	<p></p> <p>Rp 1,623M Tw I 2026</p>	<p>Outflow Uang Kartal</p> <p>Rp 1,9T Tw IV 2025</p> <p>↑</p>	<p></p> <p>Rp 2,1T Tw I 2026</p>	<p>Net Flow Uang Kartal</p> <p>Net Outflow Rp 1,2T Tw IV 2025</p> <p>↑</p>	<p></p> <p>Net Outflow Rp 534M Tw I 2026</p>
<p>Transaksi RTGS</p> <p>57,29% (yoy) Rp 4,86T Tw IV 2025</p> <p>↑</p>	<p></p> <p>108,76% (yoy) Rp 4,33T Tw I 2026</p>	<p>Pengguna QRIS</p> <p>10% (yoy) 272.144 Tw IV 2025</p> <p>↑</p>	<p></p> <p>14% 286.779 Tw I 2026</p>	<p>Transaksi SKNBI</p> <p>-21,68% (yoy) Rp 122,62M Tw IV 2025</p> <p>↑</p>	<p></p> <p>-8,23% (yoy) Rp 124,61 M Tw I 2026</p>

Aktivitas transaksi tunai di Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 cenderung mengalami *net outflow*. Transaksi nontunai SKNBI mengalami penurunan secara yoy, sedangkan APMK debit dan kredit, uang elektronik, dan QRIS menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perluasan ekosistem digital di Provinsi Bengkulu juga terakselerasi yang ditunjukkan oleh peningkatan pengguna dan volume QRIS maupun perluasan akuisisi *merchant*.

- Terjadi peningkatan aktivitas penarikan uang tunai dari perbankan terlihat dari aktivitas peredaran uang kartal di Provinsi Bengkulu yang mengalami *net outflow* sebesar Rp534 miliar.
- Pada triwulan I 2026, secara nominal, nilai transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp124,61 miliar atau berkontraksi 8,23% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
- Di sisi APMK, rata-rata jumlah kartu kredit mengalami peningkatan sebesar 3,76% (yoy) diiringi dengan peningkatan pertumbuhan transaksi, sejalan dengan jumlah kartu debit yang meningkat sebesar 1,53% (yoy). Sama halnya dengan rata-rata jumlah uang elektronik yang meningkat hingga 174,15% (yoy).
- Transaksi pembelian dan penjualan pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di triwulan I 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Lebih lanjut, valas yang paling banyak ditransaksikan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu berturut-turut adalah Dollar Amerika Serikat (USD), Dollar Singapura (SGD) dan Malaysian Ringgit (MYR) dari total mata uang yang diperjualbelikan.

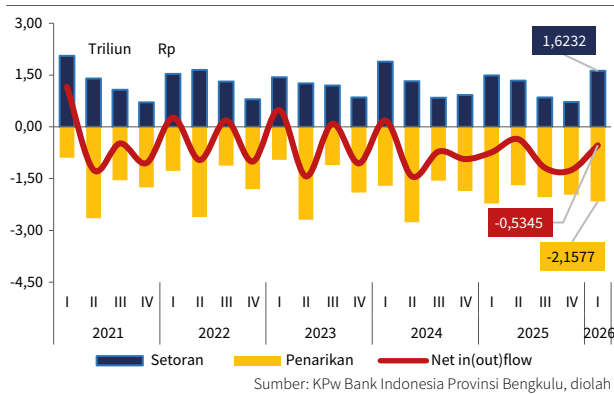




4.1 SISTEM PEMBAYARAN TUNAI DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

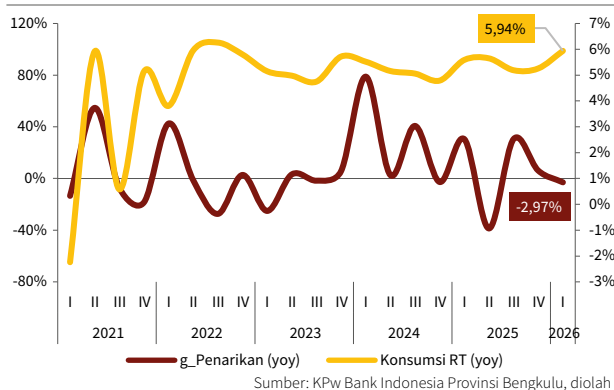
Pada triwulan I 2026, aktivitas peredaran uang kartal di Provinsi Bengkulu mengalami *net outflow*. Jumlah aliran uang kartal yang keluar lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang kartal yang masuk ke Kas Bank Indonesia Provinsi Bengkulu.

Adapun angka *net outflow* pada triwulan I 2026 adalah sebesar Rp534 miliar (Grafik 4.1). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada triwulan I 2026, penarikan dari perbankan lebih tinggi dibandingkan setoran, sejalan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,25 triliun.



Grafik 4.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Bengkulu Periode Triwulan I 2026

Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya penarikan bank pada triwulan I tahun 2026 tercatat meningkat sebesar 9,64% (qtq) dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Total penarikan bank pada periode laporan adalah sebesar Rp2,15 triliun, sedangkan pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp2,22 triliun. Di sisi lain, tingkat setoran bank mengalami peningkatan sebesar 126,9%, yakni dari Rp715 miliar pada triwulan IV 2025, menjadi Rp1,62 triliun di triwulan I 2026.



Grafik 4.2 Perkembangan Outflow dan Konsumsi RT

Sementara itu, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,94% (yoy), relatif lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan realisasi PDRB mencapai 4,72% (yoy).

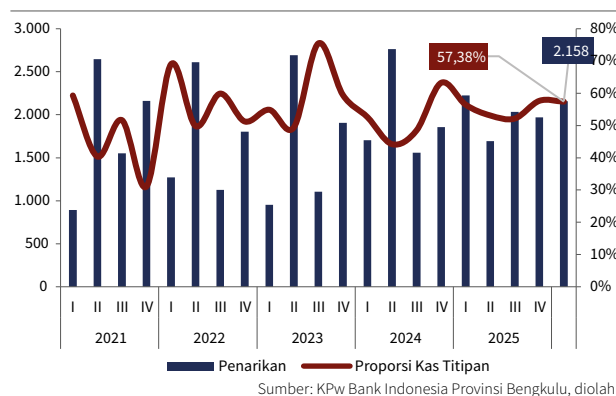
Tabel 4.1 Perkembangan Pembayaran Tunai

TRANSAKSI TUNAI	% (YOY)				
	TW-I 2025	TW-II 2025	TW-III 2025	TW-IV 2025	TW-I 2026
Penarikan	30,5%	-38,7%	30,6%	6,1%	-3,0%
Setoran	-21,2%	1,0%	0,9%	-22,3%	9,2%

Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

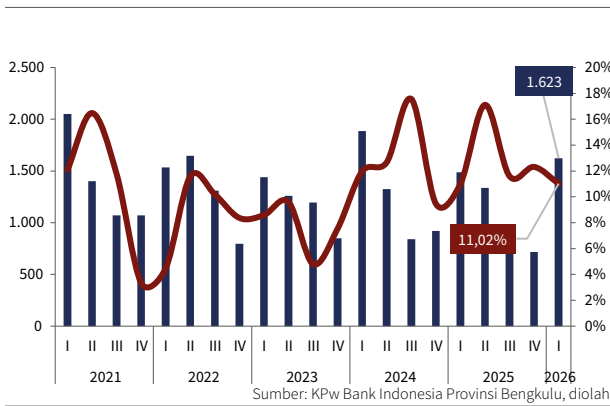
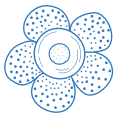
Pada triwulan I 2026, aktivitas penarikan dan penyetoran Kas Titipan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh dinamika dan mobilitas aktivitas ekonomi pada periode pelaporan di wilayah Kabupaten/Kota lokasi Kas Titipan.

Sebagai informasi, saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu melakukan pengelolaan uang melalui Kas Titipan yang berada di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Mukomuko. Secara keseluruhan, jumlah penarikan bank di wilayah Kas Titipan pada periode laporan sebesar Rp1,23 triliun, yang mencakup 57,38% dari seluruh aktivitas penarikan uang di wilayah Provinsi Bengkulu (Grafik 4.3). Dari sisi penyetoran, setoran bank di wilayah kas titipan pada periode laporan tercatat sebesar Rp178,89 miliar dengan proporsi mencakup 11,02% dari seluruh aktivitas penyetoran uang di wilayah Provinsi Bengkulu (Grafik 4.4).



Grafik 4.3 Aktivitas Penarikan Triwulan I 2026

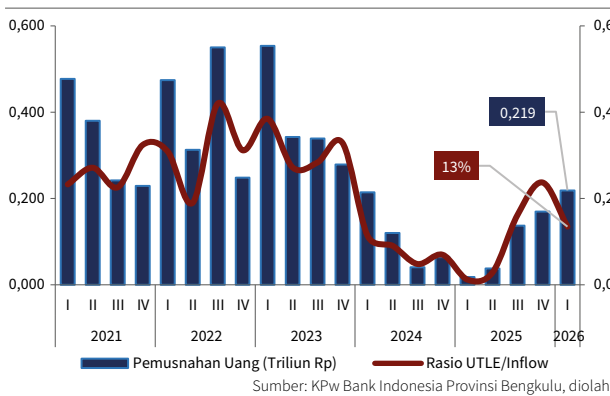




Grafik 4.4 Aktivitas Penyetoran Triwulan IV 2025

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu konsisten dalam mendukung pencapaian kebijakan *clean money policy* dengan memusnahkan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) sebanyak Rp219 miliar pada triwulan I 2026, angka ini lebih besar 28,97% dibandingkan triwulan IV 2025 dengan rasio terhadap *inflow* adalah 13% (Grafik 4.5).

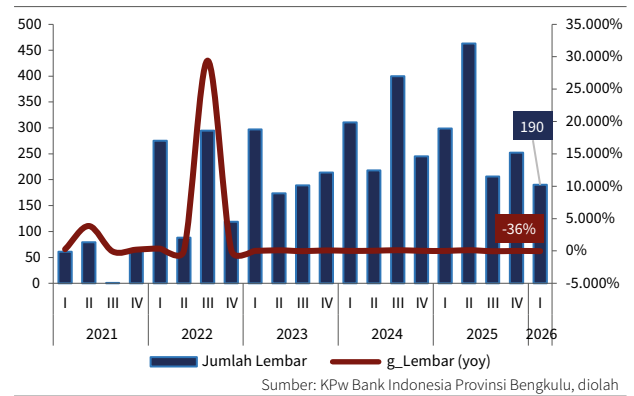
Pemusnahan UTLE menunjukkan besarnya kesadaran masyarakat terhadap Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang ditunjukkan dengan minat masyarakat untuk menukarkan Rupiah tidak layak edar yang nantinya akan dimusnahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu serta masifnya kegiatan strategis dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan kegiatan kas keliling.



Grafik 4.5 Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar di Bengkulu

Kemudian, pada triwulan I 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menerima dan mengklarifikasi 190 lembar temuan uang yang diragukan keasliannya. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan keamanan transaksi tunai. Dari jumlah tersebut, temuan uang palsu didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB), di antaranya adalah

73 lembar untuk pecahan Rp100.000,-, 79 lembar uang pecahan Rp50.000,-, 36 lembar uang pecahan Rp20.000,-, dan masing-masing 1 lembar uang pecahan Rp5.000,- dan Rp2.000,- (Grafik 4.5; Grafik 4.6 dan Tabel 4.2). Temuan uang yang diragukan keasliannya pada periode laporan menurun 36% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan temuan uang palsu sebanyak 190 lembar. Dalam upaya meningkatkan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap persebaran uang palsu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bengkulu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kampanye Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah pada berbagai kegiatan. Selain itu, pada triwulan I tahun 2026 juga telah dilakukan rangkaian kegiatan penukaran uang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam periode HBKN.

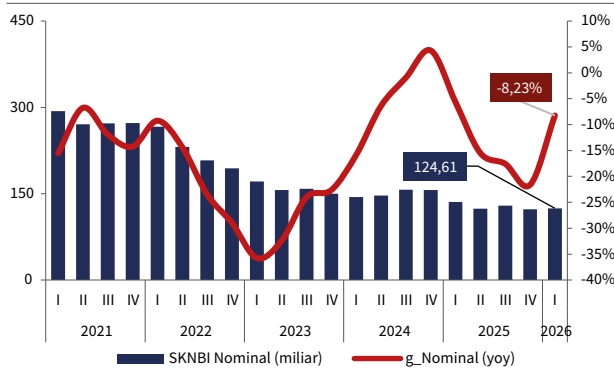
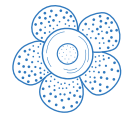


Grafik 4.6 Perkembangan Jumlah Lembar Temuan Uang Palsu

4.2 SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI

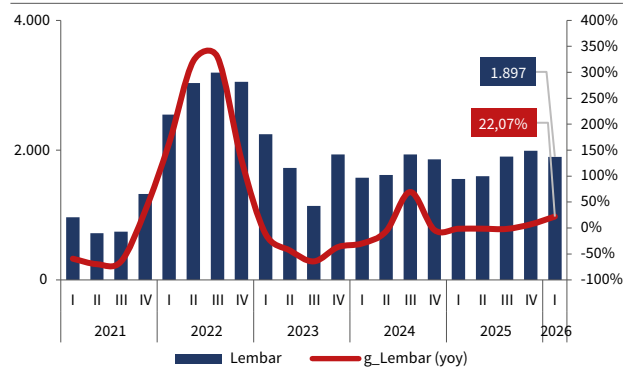
Nilai transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp124,61 miliar atau terkontraksi 8,63% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Grafik 4.7). Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 21,63% (yoy). Penurunan ini diperkirakan disebabkan oleh masyarakat yang mulai beralih menggunakan sistem layanan BI-FAST dalam kegiatan transfer dana antar bank. Sementara itu, dilihat berdasarkan volumenya, volume transaksi SKNBI pada triwulan I 2026 juga tercatat terkontraksi sebesar 18,95% (yoy) dengan total transaksi sebanyak 2.066 atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, yaitu sebesar 2.549 (Grafik 4.8).





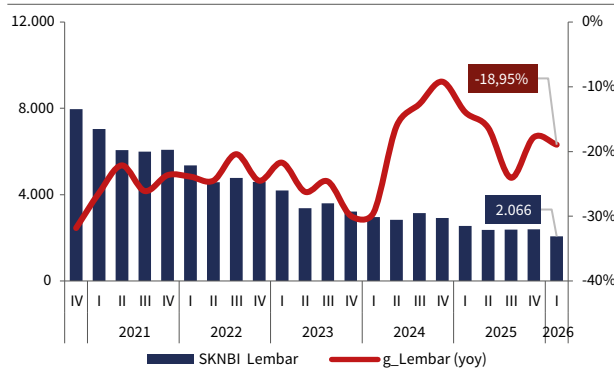
Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 4.7 Perkembangan Jumlah Nominal SKNBI Bengkulu



Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 4.10 Perkembangan Jumlah Lembar RTGS Bengkulu

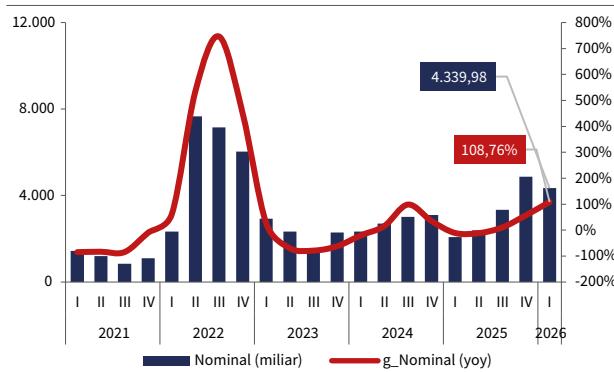


Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 4.8 Perkembangan Jumlah Lembar Warkat SKNBI Bengkulu

Sementara itu, pada triwulan I 2026 untuk nilai transaksi **BI-Real Time Gross Settlement (RTGS)** menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Nilai transaksi BI-RTGS pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp4,33 triliun, atau tumbuh sebesar 108,7% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama (Grafik 4.9). Di sisi lain, volume transaksi juga menunjukkan peningkatan pada angka 1.897 lembar atau meningkat sebesar 22,07% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama (Grafik 4.10). Sementara itu, nilai transaksi RTGS triwulan I 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka pada triwulan IV 2025



Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, diolah

Grafik 4.9 Perkembangan Jumlah Nominal RTGS Bengkulu

yang tercatat sebesar Rp4,86 triliun. Secara umum, nilai transaksi dan volume RTGS cenderung mengalami tren peningkatan.

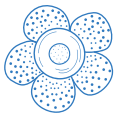
Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) pada triwulan I 2026 menunjukkan tren peningkatan pada penggunaan kartu kredit dan kartu debit jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari jumlah rerata pemilik kartu kredit pada triwulan I 2026 sebesar 31.5608 atau mengalami peningkatan sebesar 3,76% (yoy) dengan total volume terbesar terjadi pada Januari 2025 dengan rerata jumlah kartu 31.714. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah kepemilikan kartu kredit sedikit menurun sebesar 0,2%.

Lebih lanjut, angka *outstanding* kartu kredit tercatat mengalami peningkatan di Provinsi Bengkulu sebesar 64,82% (yoy).

Berdasarkan volume transaksi, masyarakat Provinsi Bengkulu paling banyak menggunakan kartu kredit untuk melakukan transaksi belanja. Hal ini dapat dilihat pada triwulan I 2026 yang jumlah transaksi belanja mencapai 27.860 rerata transaksi/bulan, jika dibandingkan tahun sebelumnya angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 25% (yoy) dengan proporsi terhadap total volume transaksi adalah 98%. Selanjutnya, pada periode laporan, kartu kredit juga digunakan untuk transaksi tunai dan pembayaran tagihan rata-rata masing-masing mencapai 311 transaksi/bulan dan 130 transaksi/bulan.

Secara nominal, penggunaan transaksi kartu kredit terbesar adalah untuk keperluan belanja yang mencapai Rp21,2 miliar/bulan pada triwulan I 2026, meningkat sebesar 31% (yoy). Selanjutnya, transaksi tunai

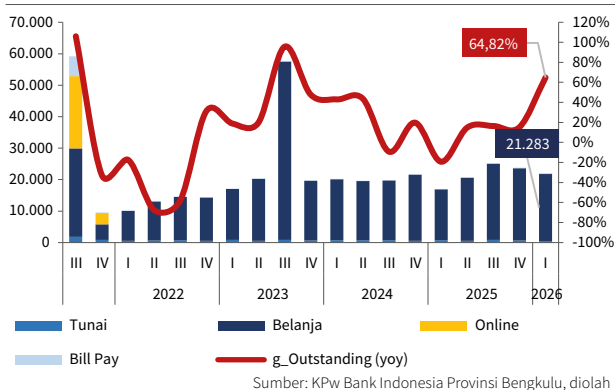




mengalami penurunan pada angka Rp475 juta atau turun sebesar 33,5% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya (Grafik 4.12). Diprakirakan masyarakat akan terus meningkatkan transaksi secara nontunai. Secara keseluruhan, total nilai transaksi kartu kredit di Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 adalah sebesar Rp22,05 miliar atau menurun sebesar 7,53% (qoq).



Grafik 4.11 Perkembangan Jumlah Volume Transaksi Kartu Kredit Bengkulu



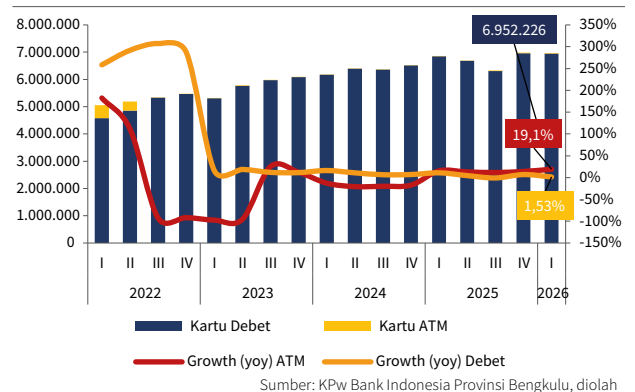
Grafik 4.12 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit (Rp miliar) Bengkulu

Penggunaan kartu ATM/Debit secara nominal dan volume transaksi di Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan pada triwulan I 2026. Jumlah kartu ATM dan debit yang beredar di Provinsi Bengkulu berturut-turut meningkat 19,1% (yoy) dan 1,53% (yoy) dari 6,84 juta kartu pada triwulan I tahun 2025 menjadi 6,95 juta kartu pada triwulan I 2026 (Grafik 4.13). Jumlah penggunaan kartu debit di Provinsi Bengkulu mencapai 6.952.226, sementara penggunaan kartu ATM mencapai 14.783 kartu.

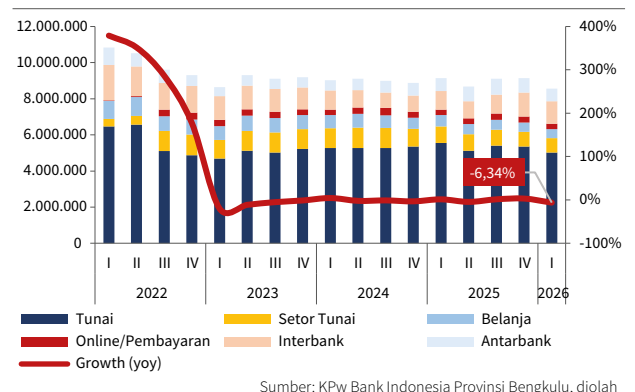
Volume transaksi APMK pada kartu ATM/Debit di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 8.554.836 transaksi selama triwulan I 2026, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 9.145.584 transaksi per bulan atau mengalami penurunan sebesar 6,46% (yoy) (Grafik 4.14). Penurunan transaksi menggunakan kartu

ATM/Debit pada triwulan I 2026 terutama disebabkan oleh penurunan volume transaksi tunai yang menurun 9,39%, dan volume transaksi interbank dan antarbank yang berturut-turut meningkat sebesar 20,8% (yoy) dan menurun sebesar 1,6% (yoy). Lebih lanjut, Hal ini menunjukkan terdapat penurunan minat masyarakat dalam melakukan transaksi secara non tunai dengan menggunakan kartu debit.

Tren yang sama terjadi pada nilai nominal transaksi kartu ATM/Debit, dimana terdapat penurunan total nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat perbedaan tren perubahan antar sektor. Secara keseluruhan nilai transaksi kartu ATM/Debit di Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 mencapai Rp11,6 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 0,81% (yoy) (Grafik 4.15). Secara proporsi, transaksi tersebut terdiri dari transaksi tarik tunai sebesar Rp 4,3 triliun atau turun sebesar 6,16% (yoy), transaksi setor tunai sebesar Rp2,07 triliun yang mana mengalami penurunan sebesar 1,8% (yoy), transaksi belanja sebesar Rp212,2 miliar atau menurun sebesar 35,3% (yoy), transaksi *online* sebesar Rp92,3 miliar, transaksi interbank sebesar Rp3,3 triliun, dan transaksi antarbank sebesar Rp1,5 triliun.

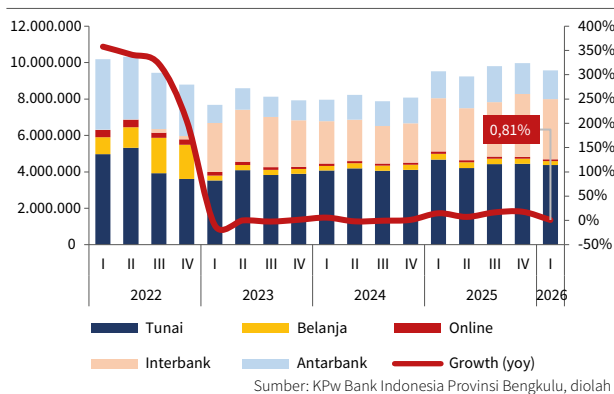
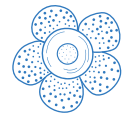


Grafik 4.13 Perkembangan Jumlah Kartu ATM/Debit Bengkulu

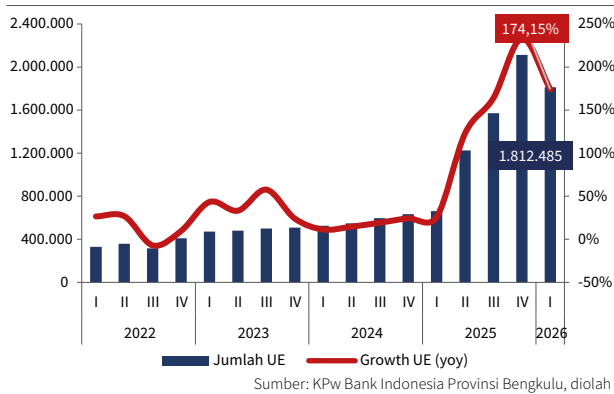


Grafik 4.14 Perkembangan Jumlah Volume Transaksi Kartu ATM/Debit



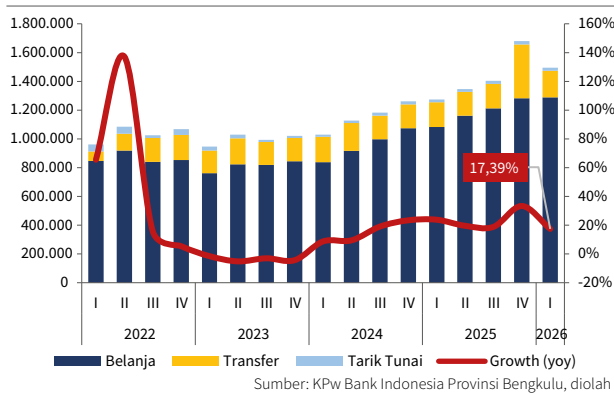


Grafik 4.15 Perkembangan Nominal Transaksi (Juta Rp) Kartu ATM/Debet



Grafik 4.16 Perkembangan Jumlah Uang Elektronik Provinsi Bengkulu

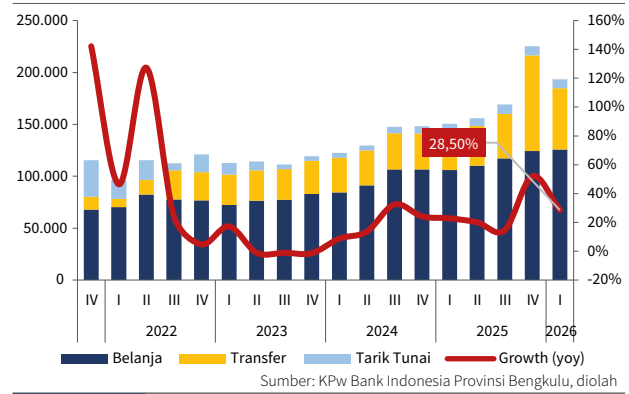
Penggunaan uang elektronik di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan pada triwulan I tahun 2025. Jumlah uang elektronik di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan sebesar 174,1% (yoy) (Grafik 4.16). Tren yang sama terjadi pada angka nominal dan volume transaksi uang elektronik.



Grafik 4.17 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Transaksi

Jumlah transaksi dan nominal uang elektronik mengalami peningkatan, dengan jumlah transaksi meningkat sebesar 17,3% (yoy) dan angka nominal juga meningkat sebesar 28,5% (yoy) (Grafik 4.18). Jumlah

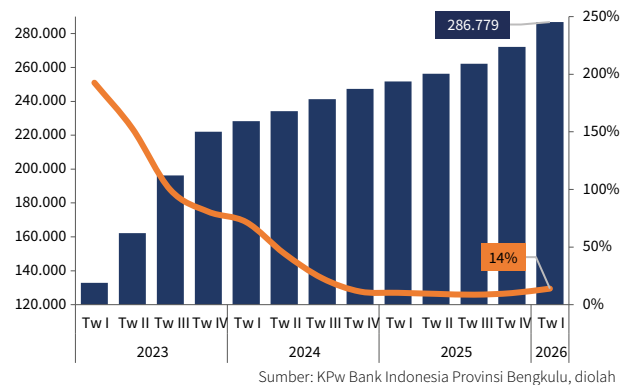
transaksi uang elektronik di Provinsi Bengkulu mencapai 1.495.736 transaksi dengan total nilai nominal transaksi mencapai Rp193.280 miliar (Grafik 4.18). Di sisi lain, saat ini total dana *float* uang elektronik di Provinsi Bengkulu pada triwulan I tahun 2026 tercatat sebesar Rp20,1 miliar atau meningkat sebesar 16,9% (yoy).



Grafik 4.18 Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Transaksi

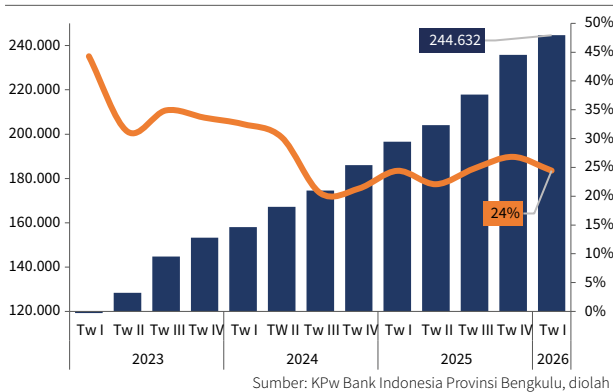
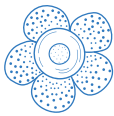
Pada triwulan I 2026 jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi Bengkulu terus mengalami pertumbuhan. Saat ini jumlah pengguna QRIS pada periode pelaporan telah mencapai 286.779 pengguna, meningkat 14% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 4.19). Jumlah *merchant* meningkat hingga 244.632 *merchant* atau tumbuh 24% (yoy) (Grafik 4.20).

Peningkatan jumlah *merchant* QRIS sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna. Peningkatan tersebut diiringi oleh berbagai upaya seperti pelaksanaan *event* strategis seperti QRIS Banking Race 2026, Digitalisasi Kawasan Wisata dan Transaksi Pemerintah Daerah serta berbagai kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait untuk perluasan implementasi QRIS.



Grafik 4.19 Pertumbuhan Pengguna QRIS di Provinsi Bengkulu Triwulan I 2026



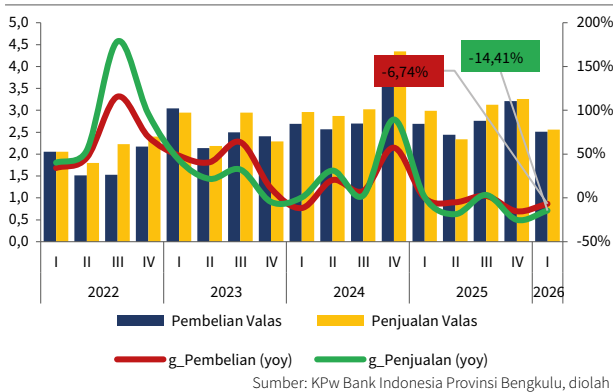


Grafik 4.20 Pertumbuhan Merchant QRIS di Provinsi Bengkulu Triwulan I 2026

4.3 KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) BERIZIN

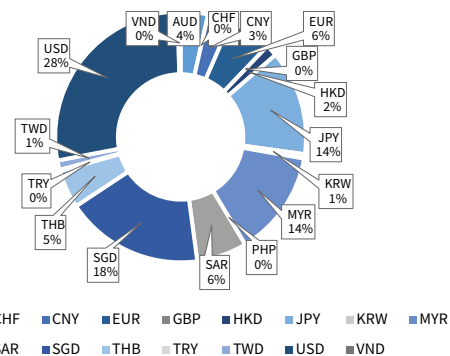
Pada triwulan I 2026, transaksi pembelian dan penjualan pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Transaksi pembelian valas relatif menurun sebesar 6,74% (yoy), sementara penjualan valas juga menurun sebesar 14,4% (yoy) (Grafik 4.21). Total nilai transaksi jual beli valuta asing di KUPVA BB pada triwulan I 2026 sebesar Rp5,07 miliar, dengan komposisi pembelian valas Rp2,51 miliar dan penjualan valas Rp2,56 miliar. Nominal tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya.

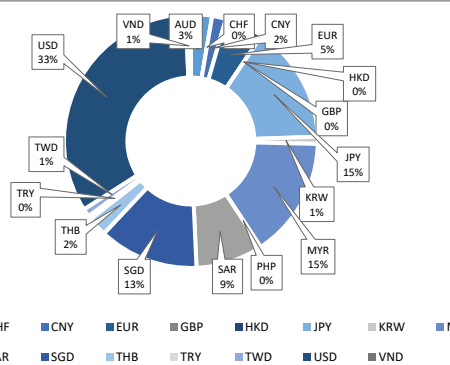


Grafik 4.21 Perkembangan Transaksi Valas Bengkulu (Miliar Rp)

Data transaksi KUPVA BB menunjukkan jenis valuta asing yang paling banyak ditransaksikan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu berturut-turut adalah Dollar Amerika Serikat (USD), Dollar Singapura (SGD) dan Malaysian Ringgit (MYR) dari total mata uang yang diperjualbelikan. KUPVA BB paling banyak melakukan pembelian valuta asing dari masyarakat untuk mata uang Dollar Amerika Serikat/USD (28%), Dollar Singapura/SGD (18%) dan Malaysian Ringgit/MYR (14%) (Grafik 4.22). Dari sisi permintaan valuta asing, KUPVA BB paling banyak melakukan penjualan valuta asing untuk mata uang mata uang Dollar Amerika Serikat/USD (35%), Malaysian Ringgit/MYR (15%), dan Dollar Singapura/SGD (13%) (Grafik 4.23).



Grafik 4.22 Jenis Mata Uang Pembelian Valas Triwulan I 2026



Grafik 4.23 Jenis Mata Uang Penjualan Valas Triwulan I 2026



BOKS 4

Tingkatkan Akseptasi Transaksi Digital di Kawasan Wisata dan Penguatan Melalui Digitalisasi Wisata Pantai Panjang

Dalam rangka mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan memperkuat ekosistem pembayaran digital di Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan instansi perbankan terus mendorong berbagai program strategis seperti implementasi kawasan wisata digital, edukasi QRIS serta optimalisasi layanan publik berbasis transaksi *non-tunai* melalui penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Provinsi Bengkulu. Berbagai kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan transformasi digital daerah yang lebih inklusif. Sejalan dengan komitmen tersebut, telah diselenggarakan kegiatan *Road To Kawasan Digital Pantai Panjang (Workshop Smart Code Summit)* yang diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Bapak Rudy Sitorus dan dihadiri oleh Pimpinan Perbankan, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Ibu Yulistri Yenni, S.T, dan Pimpinan Dehasen Ibu Vethy Oktaviani, M. I.Kom, serta diikuti oleh 186 UMKM yang berada di sepanjang kawasan Pantai Panjang. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia mendorong penguatan digitalisasi sistem pembayaran melalui pengakuisisian *merchant* QRIS sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata digital Pantai Panjang. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memperluas akseptasi transaksi *non-tunai* sekaligus mempercepat terbentuknya ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar B4.1 Road To Kawasan Wisata Digital Pantai Panjang (*Workshop Smart Code Summit*)

Dalam pelaksanaannya, dilakukan sosialisasi terkait retorika dalam bisnis, literasi QRIS dan PeKa, strategi pengembangan sektor pariwisata berbasis digital, hingga sosialisasi *personal branding* oleh influencer Theresia Devi. Selain itu, terdapat simbolis penyerahan QRIS oleh perbankan kepada *merchant* sebagai bentuk perluasan akseptasi transaksi *non-tunai*. Dari kegiatan tersebut terdapat laporan keberhasilan pengakuisisian QRIS sebanyak 176 *merchant* oleh perbankan mitra yang menunjukkan kontribusi yang solid dan merata. Program ini diharapkan dapat meningkatkan modernisasi sistem pembayaran, memperkuat *branding* wisata di Provinsi Bengkulu, serta mendorong peningkatan transaksi digital di kawasan wisata.

Sejalan dengan komitmen tersebut, penguatan implementasi digitalisasi daerah juga dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan *High Level Meeting* (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026 pada tanggal 10 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Bengkulu bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Bengkulu serta OPD terkait.

Pada kegiatan tersebut dilakukan pembahasan terkait perkembangan implementasi ETPD, tantangan digitalisasi daerah, serta penguatan sinergi dalam mendorong pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan *launching* beberapa inovasi digitalisasi daerah, antara lain Samsat Keliling Digital, Kawasan Digital *Belungguk Point* Kota Bengkulu, dan Kawasan Digital Maroba Berbinar Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai bentuk percepatan akseptasi QRIS dan digitalisasi layanan publik, khususnya pada sektor pembayaran pajak dan retribusi secara *non-tunai*. Selain itu, terdapat pembahasan terkait rencana penguatan implementasi ETPD tahun 2026 melalui pelaksanaan program *QRISperience: Gebyar TP2DD dan Festival Digital*, pengembangan Kawasan Wisata Digital Pantai Panjang, penguatan literasi pembayaran digital, serta optimalisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan perbankan juga menyepakati beberapa tindak lanjut strategis, seperti penyusunan *roadmap* TP2DD 2026–2030, penerbitan regulasi terkait implementasi kanal pembayaran digital di seluruh OPD, serta penguatan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan QRIS dan pembayaran *non-tunai*.

Berbagai tantangan implementasi ETPD juga dibahas, seperti keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah, antara lain di daerah Seluma, Kaur, dan Mukomuko yang masih mengalami *blankspot*, belum meratanya kanal pembayaran digital, kendala teknis integrasi transaksi ke SPID, serta dukungan kebijakan dan anggaran digitalisasi yang masih terbatas. Dengan kondisi tersebut, percepatan penyusunan *roadmap* ETPD 2026-2030 dan penerbitan regulasi implementasi KKPD menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen



Gambar B4.2 High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Provinsi Bengkulu

dan memastikan transformasi digital keuangan daerah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada tingkat kabupaten, penguatan implementasi TP2DD dilakukan melalui pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TP2DD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 pada tanggal 27 Februari 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Mukomuko, Bapak Choirul Huda, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Mukomuko, Sekda Kabupaten Mukomuko, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Direktur Utama Bank Bengkulu, serta seluruh OPD terkait.

Selain Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga menyelenggarakan *High Level Meeting* (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2026 pada tanggal 28 April 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara dan dihadiri oleh Bank Indonesia, OPD terkait, unsur Forkopimda, serta industri perbankan.

Pelaksanaan HLM ini bertujuan memperkuat sinergi dalam mendukung percepatan implementasi ETPD dan optimalisasi penggunaan transaksi *non-tunai* pada layanan pemerintah daerah. Hasil evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD). Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperkuat, khususnya terkait optimalisasi



Gambar B4.3 High Level Meeting TP2DD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026

penggunaan QRIS dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada seluruh OPD. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kab. Mukomuko dan Kab. Bengkulu Utara menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat digitalisasi pemerintah daerah melalui implementasi pembayaran digital, optimalisasi penerimaan daerah berbasis QRIS, serta penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia menyepakati beberapa langkah strategis, seperti penguatan kolaborasi antar *stakeholder*, penyusunan *roadmap* digitalisasi daerah, serta pemberian insentif kepada masyarakat yang melakukan pembayaran pajak melalui QRIS dan kanal digital lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja TP2DD serta memperkuat ekosistem pembayaran digital di Kabupaten Bengkulu Utara.

Di sisi lain, sebagai upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk digitalisasi pembayaran berkelanjutan, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu juga menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* TP2DD se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 13-14 April 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Herwan Antoni, dan turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Bapak Wahyu



Gambar B4.4 High Level Meeting TP2DD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2026

Yuwana Hidayat, diikuti oleh seluruh anggota TP2DD se-Provinsi Bengkulu, OPD terkait, serta perwakilan perbankan daerah. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah guna mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang lebih optimal, terarah, dan berkelanjutan.

Kegiatan *Capacity Building* ini difokuskan pada penguatan pemahaman teknis pemerintah daerah terkait indikator penilaian Championship TP2DD, mekanisme pengisian evaluasi kinerja, serta strategi penguatan implementasi ETPD di masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaannya, peserta tidak hanya memperoleh pemaparan materi secara konseptual, tetapi juga mendapatkan pendampingan teknis secara langsung melalui sesi *hands-on* bersama narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pendekatan tersebut bertujuan meminimalisir kesalahan penginputan data sekaligus meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan akurasi pengisian evaluasi kinerja TP2DD oleh pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga diberikan pemahaman mengenai optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara *non-tunai*, pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) secara berkala, penguatan literasi digital masyarakat, serta



Gambar B4.5 High Level Meeting TP2DD se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026

pengembangan program unggulan daerah berbasis pembayaran digital. Selain itu, disampaikan pula bahwa aspek proses dalam penilaian Championship TP2DD masih menjadi tantangan utama bagi sebagian pemerintah daerah, khususnya terkait dokumentasi kegiatan, pelaksanaan HLM, aktivitas sosialisasi kepada masyarakat, dan pengembangan inovasi digitalisasi daerah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah didorong untuk lebih aktif mengembangkan program unggulan serta meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi di daerah masing-masing.

CBP Rupiah dan penggunaan sistem pembayaran digital secara aman dan bertanggung jawab. Kegiatan ditutup dengan semangat kolaboratif dan respons positif dari seluruh peserta, sebagai wujud penguatan literasi ekonomi dan keuangan di kalangan generasi muda Bengkulu.

BAB 5



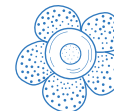
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN



Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu secara umum masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tetap berada pada level rendah, perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menguat dibandingkan triwulan sebelumnya, serta penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, dinamika struktur ketenagakerjaan dan tekanan biaya pada sektor tertentu tetap perlu dicermati guna menjaga keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat ke depan.

- TPT Provinsi Bengkulu terjaga rendah sebesar 3,23% pada Februari 2026, walau sedikit meningkat dari 3,24% pada Februari 2025. Kondisi ini menunjukkan mayoritas angkatan kerja masih terserap oleh lapangan pekerjaan, dengan proporsi pengangguran yang sedikit meningkat. Namun demikian, menurunnya porsi pekerja penuh waktu yang disertai pergeseran komposisi ke tenaga kerja berpendidikan lebih rendah, perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kualitas penyerapan tenaga kerja.
- Nilai Tukar Petani (NTP) juga melanjutkan tren peningkatan dari periode sebelumnya. NTP Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 208,32, atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 201,59. Selanjutnya, pada Maret 2026 NTP Provinsi Bengkulu meningkat ke level 205,92. Capaian ini mengindikasikan daya beli petani yang relatif terjaga.
- Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada periode September 2025 berada pada angka 11,88% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada September 2024 yang tercatat sebesar 12,25%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi daerah.





Tabel 5.1 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu

KOMODITAS	SATUAN	PERIODE				
		2024 AGUSTUS	2025 FEBRUARI	2025 AGUSTUS	2025 NOVEMBER	2026 FEBRUARI
PENDUDUK USIA KERJA	ORANG	1.585,001	1.597,188	1.608.738	1.614.573	1.620.437
ANGKATAN KERJA	ORANG	1.136.573	1.142.038	1.154.698	1.162.760	1.137.098
-BEKERJA	ORANG	1.101.234	1.105.046	1.115.334	1.123.612	1.100.350
-PENGANGGURAN	ORANG	35,34	36,99	39,36	39,148	36.748
PERSENTASE TPAK (%)	(%)	71,71	71,50	71,78	72,02	70,17
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	(%)	3,11	3,24	3,41	3,37	3,23

Sumber: BPS, diolah

5.1 KETENAGAKERJAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penurunan TPT dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah angkatan kerja, bukan karena peningkatan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut, tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu masih berada pada level yang relatif rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bengkulu menunjukkan penurunan dari 3,24% pada Februari 2025, menjadi 3,23% pada Februari 2026 (BPS Provinsi Bengkulu, 2026). Jumlah pengangguran terbuka Provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 36.748 orang, atau menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 36.992 orang (*Tabel 5.1*). Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor menurunnya jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu. Jumlah pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran yang masing-masing meningkat menjadi sebesar 358.073 orang dan 108.018 orang. Di sisi lain, jumlah pekerja penuh berkurang menjadi sebesar 634.259 orang

Sepanjang periode Februari 2025 hingga Februari 2026, tidak terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bengkulu. Jumlah penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 4.696 orang, seiring dengan berkurangnya jumlah angkatan kerja sebesar 4.940 orang atau tumbuh negatif -0,43% (yoy). Angkatan kerja di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 1.137.098 orang, menurun jika dibandingkan dengan posisi pada periode Februari 2025 yakni sebanyak 1.142.038 orang.

Terdapat tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja dengan pangsa terbesar meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 46,61%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,44%; dan Jasa Pendidikan sebesar 6,11% (*Tabel 5.2*).

Tabel 5.2 Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	PORSI (%)			
	FEB-25	AGT-25	NOV-25	FEB-26
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	44,27	44,48	43,93	46,61
Perdagangan Besar & Eceran	16,45	16,73	15,15	15,44
Industri Pengolahan	6,52	6,42	5,15	6,11
Konstruksi	6,64	6,22	6,47	6,01
Jasa Pendidikan	4,85	4,9	6,80	4,82
Administrasi Pemerintahan	3,84	4,36	4,91	4,46
Lainnya	17,43	16,89	17,59	16,55

Sumber: BPS, diolah

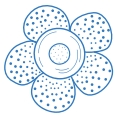
Lebih lanjut, terdapat 36,17% penduduk bekerja pada kegiatan formal, atau tercatat turun sebesar 1,05% dibanding Februari 2025. Penurunan ini didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status berusaha sendiri. Berdasarkan jenis pekerjaannya, tenaga buruh/karyawan cukup mendominasi sebesar 30,91% dan memiliki pangsa yang meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kategori pekerjaan lain yang memiliki porsi relatif besar dengan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya ialah kategori berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 18,48%, serta pekerja bebas di nonpertanian sebesar 4,09%. Sementara itu, kategori tenaga kerja berusaha sendiri cenderung mengalami penurunan dari 28,76% pada Februari 2025, menjadi 17,98% pada Februari 2026. (*Tabel 5.3*).

Tabel 5.3 Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Utama

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	PORSI (%)			
	FEB-25	AGT-25	NOV-25	FEB-26
Buruh/Karyawan/Pegawai	31,64	30,27	31,62	30,91
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	17,74	18,01	18,04	18,49
Berusaha Sendiri	18,88	19,43	14,63	17,98
Pekerja bebas di pertanian	6,94	7,32	7,77	7,36
Pekerja bebas non pertanian	3,62	3,99	5,01	4,09
Berusaha dibantu buruh tetap	5,57	4,56	5,26	5,25
Pekerja keluarga/tak dibayar	15,60	16,41	17,77	15,93

Sumber: BPS, diolah





Berdasarkan jenjang pendidikan, terjadi peningkatan komposisi jumlah tenaga kerja yang menyelesaikan pendidikan SD kebawah, SMP, dan Diploma I/II/III. Dibandingkan dengan Februari 2025, porsi tenaga kerja dengan ketiga latar pendidikan tersebut masing-masing ialah sebesar 32,87%, 17,27%, dan 2,29% pada Februari 2026. Di sisi lain, penurunan komposisi tenaga kerja justru terjadi pada kelompok tenaga kerja SMA, SMK, dan Universitas, dengan masing-masing sebesar 24,52%, 8,93%, dan 13,93%. Kondisi ini menunjukkan walau angkatan kerja meningkat, penyerapan tenaga kerja pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi masih menjadi tantangan di Provinsi Bengkulu (Tabel 5.4).

Tabel 5.4 Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendidikan

BERDASARKAN PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	PORSI (%)			
	FEB-25	AGT-25	NOV-25	FEB-26
SD kebawah	33,13	32,75	30,87	32,87
SMP	15,87	16,11	17,27	17,46
SMA	22,11	23,78	25,17	24,52
SMK		9,27	10,07	8,93
Diploma I/II/III	2,77	2,12	1,73	2,29
Universitas	15,96	15,97	14,89	13,93

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan jumlah jam kerja per minggu, porsi pekerja penuh Provinsi Bengkulu untuk Februari 2026 tercatat sebesar 57,64% atau menurun sebesar 4,30% dibanding Februari 2025. Sementara itu, pekerja paruh waktu dan setengah penganggur cenderung memiliki komposisi yang meningkat masing-masing menjadi sebesar 32,54% dan 9,82%, atau dengan kata lain meningkat 3,19% dan 1,11% dibandingkan Februari 2025. Pergeseran struktur ketenagakerjaan dalam periode yang relatif singkat

tersebut mengindikasikan adanya penurunan intensitas jam kerja serta potensi pelemahan kualitas penyerapan tenaga kerja, sehingga perlu menjadi perhatian ke depan. (Tabel 5.5).

Tabel 5.5 Ketenagakerjaan Berdasarkan Jam Kerja

BERDASARKAN JUMLAH JAM KERJA PER MINGGU	PORSI (%)			
	FEB-25	AGT-25	NOV-25	FEB-26
Setengah Penganggur	8,71	9,71	13,23	9,82
Pekerja Paruh Waktu	29,35	30,41	31,27	32,54
Pekerja Penuh	61,94	59,87	55,5	57,64
Jumlah	100	100	100	100

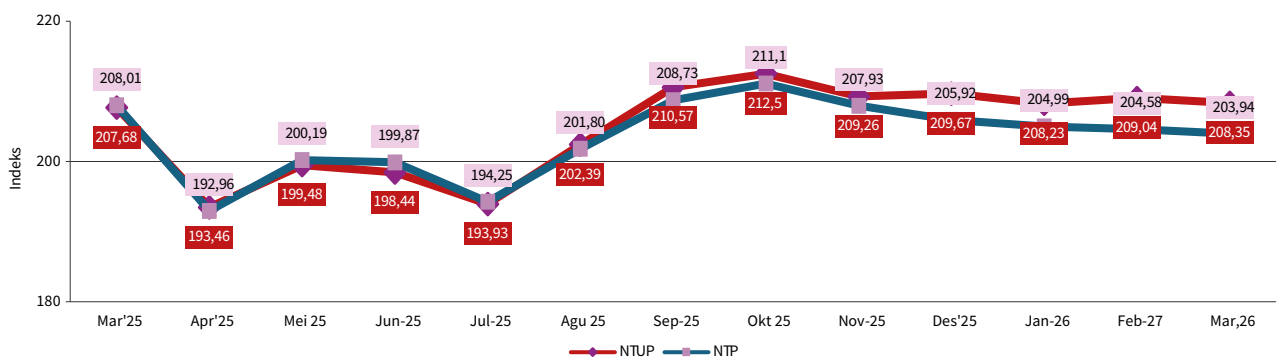
Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani (NTP)

Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tetap tumbuh walau melambat, sejalan dengan menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP) dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan I¹ 2026, NTP Provinsi Bengkulu tercatat berada pada level 204,50 atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 208,32.

NTP di Provinsi Bengkulu terutama dibentuk oleh Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebagai kontributor dengan nilai indeks tertinggi, diikuti oleh NTP Tanaman Hortikultura (NTPH). Dari sisi perkembangan, kenaikan pada subsektor perikanan, peternakan, dan tanaman pangan belum mampu menahan penurunan pada NTPR dan hortikultura, sehingga NTP secara umum mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.

Tren pergerakan NTP secara bulanan sejalan dengan tren pergerakan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) (Grafik 5.1). Level NTP dan NTUP masyarakat Provinsi Bengkulu

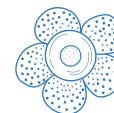


Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.1 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian

1 NTP TW I 2026 adalah rata-rata NTP Januari-Maret 2026





Tabel 5.6 Nilai Tukar Petani

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	NILAI TUKAR PETANI															
	TW II 2025				TW III 2025				TW IV 2025				TW I 2026			
	APR	MEI	JUN	TW II	JUL	AGT	SEP	TW III	OKT	NOV	DES	TW IV	JAN	FEB	MAR	TW I
UMUM	192,96	200,19	199,87	197,67	194,25	201,80	208,73	201,59	211,10	207,93	205,92	208,32	204,99	204,58	203,94	204,50
TANAMAN PANGAN	110,42	115,82	116,01	114,08	114,14	115,02	116,23	115,13	114,90	115,84	115,39	115,38	116,34	115,41	115,24	115,66
HORTIKULTURA	127,78	142,43	134,2	134,8	143,16	135,00	160,35	146,17	135,22	143,63	144,41	141,09	135,65	157,18	111,98	134,94
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT	218,51	223,53	222,65	221,56	218,46	228,73	236,12	227,77	240,97	236,13	233,55	236,88	232,58	230,75	232,6	231,98
PETERNAKAN	97,02	104,25	103,57	101,61	98,87	98,07	98,03	98,32	98,44	98,30	98,50	98,41	99,61	102,31	103,77	101,90
PERIKANAN	106,53	110,85	109,47	108,95	105,68	104,14	103,17	104,33	104,10	105,37	106,70	104,00	109,89	112,75	114,78	112,47

Sumber: BPS, diolah

tetap konsisten berada di atas 100 menunjukkan rasio indeks harga yang diterima petani di atas indeks harga untuk biaya produksi, kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain, sehingga mencerminkan kesejahteraan petani yang saat ini masih berada dalam kondisi yang baik.

NTP pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2026 secara berturut-turut tercatat sebesar 204,99; 204,58; dan 203,94. Sub sektor dengan nilai NTP terbesar pada bulan Januari 2026 meliputi tanaman perkebunan rakyat sebesar 232,58; hortikultura sebesar 135,65; tanaman pangan sebesar 116,34, serta sub sektor perikanan sebesar 109,89. Lebih lanjut, NTP untuk sub sektor peternakan menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya, walau masih berada di bawah angka 100, yakni 98,61 pada Januari 2026. Kondisi ini mengindikasikan harga yang diterima peternak di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah dibandingkan kenaikan harga yang harus mereka bayar.

5.2 KEMISKINAN

Tingkat Kemiskinan

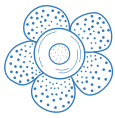
Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh membaiknya aktivitas dan kinerja ekonomi daerah.

Berdasarkan data BPS pada periode September 2025, persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 11,88%, atau menurun dibandingkan dengan periode September 2024 yang sebesar 12,25%. Walau secara persentase membaik, persentase penduduk miskin di Bengkulu masih menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera, dan masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin nasional yang tercatat sebesar 8,25% pada periode ini.

Penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu terjadi di daerah pedesaan, sementara itu jumlah penduduk miskin di perkotaan cenderung meningkat. Lebih lanjut, total penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebanyak 250,19 ribu jiwa atau turun sebanyak 10,96 ribu jiwa dibandingkan dengan periode September 2024 yang tercatat sebanyak 261,15 ribu jiwa (Tabel 5.7).

Dalam hal pengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin, saat ini BPS telah menggunakan indikator garis kemiskinan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang rata-rata memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Pada periode September 2025 terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 4,12% dibandingkan periode September 2024 yaitu dari Rp672.816,-/kapita/bulan menjadi sebesar Rp712.003,-/kapita/bulan. Berdasarkan komponennya, Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2025, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,73 persen terhadap Garis Kemiskinan sedangkan komoditi bukan makanan menyumbang 26,27 persen. Lebih dalam, beberapa komoditas makanan yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan meliputi beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan tongkol/tuna/cakalang. Sementara komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik di perkotaan maupun di perdesaan masing-masing perumahan, bensin, listrik



**Tabel 5.7** Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Bengkulu 2022-2025

KETERANGAN	2022		2023	2024		2025	
	MAR	SEPT	SEPT	MARET	SEPT	MARET	SEPTEMBER
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	297,23	292,93	288,46	281,36	261,15	252,97	250,19
Persentase Penduduk Miskin (%)	14,62	14,34	14,04	13,56	12,25	12,08	11,88
- Kota	14,88	14,53	14,21	13,56	12,32	12,34	13,23
- Desa	14,49	14,24	13,96	13,56	12,63	11,95	11,19
Garis Kemiskinan (Rp)	590.754	625.650	637.142	671.095	672.816	683.820	712.003
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,43	2,17	2,14	2,11	1,84	1,83	1,67
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,58	0,47	0,52	0,49	0,37	0,38	0,32

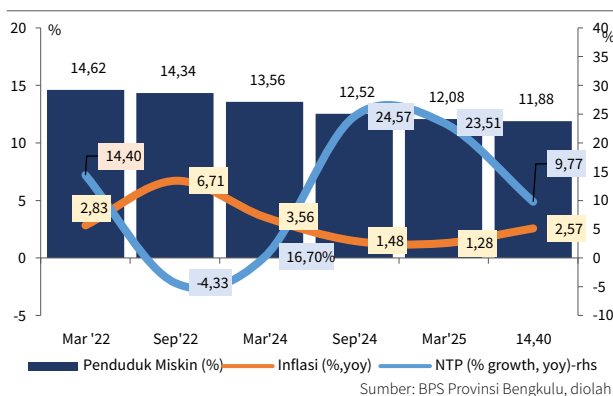
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, diolah

dan pendidikan. Meski mengalami peningkatan garis kemiskinan, adanya program pasar murah, Bantuan Sosial Non Tunai berupa Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pemerintah berhasil menahan kenaikan lebih jauh.

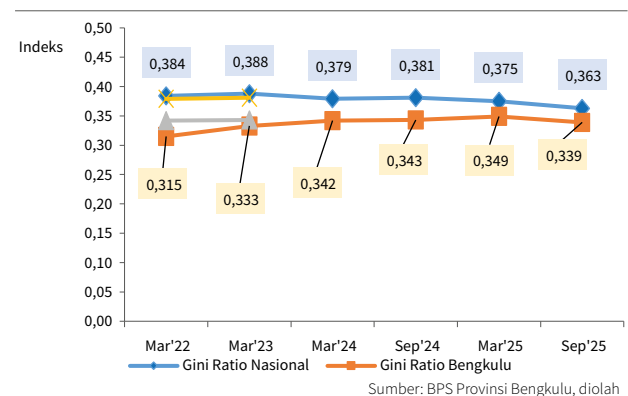
Dari sisi kedalaman dan keparahan, yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada kedua indeks jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya terdapat sedikit penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 1,84 pada September 2024 menjadi 1,67 pada September 2025. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga relatif menurun dari 0,37 pada September 2024 menjadi 0,32 pada September 2025. Penurunan indeks P1 dapat diartikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berada pada level 1,67. Menurunnya kondisi ini disebabkan penurunan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi pada momen yang

sama. Sementara penurunan indeks P2 menandakan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dapat mendorong peningkatan pendapatan, sehingga pada akhirnya mendorong penurunan angka kemiskinan.

Tingkat kesejahteraan suatu daerah tidak hanya mengacu pada angka kemiskinan, namun juga tercermin oleh tingkat ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan melalui indikator rasio gini. Pada September 2025, tingkat rasio gini di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 0,339, cenderung meningkat dibandingkan periode September 2024 yang tercatat sebesar 0,343. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bengkulu. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu senantiasa melakukan kolaborasi dan sinergi kebijakan dengan seluruh *stakeholder* dalam rangka mendorong kinerja ekonomi di daerah.

**Grafik 5.2**

Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu

**Grafik 5.3**

Perkembangan Gini Ratio Bengkulu & Nasional



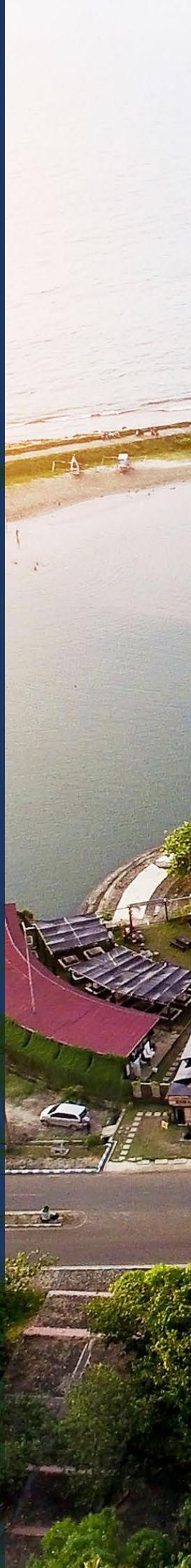
BAB 6



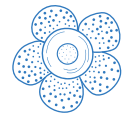
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2026 diperkirakan mampu tumbuh positif pada rentang 4,60 - 5,20% (yoy). Prakiraan tersebut ditopang Konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi pemerintah dan PMTB/Investasi.

- Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi diperkirakan tetap ditopang oleh konsumsi RT seiring kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN secara bertahap, pembayaran THR pada momentum HBKN Ramadhan dan Idulfitri, ekspektasi pencairan gaji ke-13, serta berlanjutnya bantuan sosial. Konsumsi pemerintah diperkirakan terakselerasi, didorong oleh realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti MBG. Sementara itu, PMTB/investasi diperkirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan berlanjutnya aktivitas konstruksi, preservasi jalan, pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya realisasi PMDN. Di sisi lain, ekspor diperkirakan masih tertahan akibat terbatasnya produksi dan pengapalan komoditas utama, khususnya batu bara dan karet, meskipun perbaikan harga komoditas global berpotensi menahan perlambatan lebih dalam.
- Dari sisi Lapangan Usaha (LU), akselerasi pertumbuhan ekonomi Bengkulu tahun 2026 bersumber dari kinerja LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Transportasi. Namun tertahan oleh kinerja LU Industri Pengolahan yang diperkirakan akan tumbuh terbatas.
- Secara tahunan, inflasi Provinsi Bengkulu tahun 2026 diperkirakan bias bawah dibandingkan 2025 namun tetap berada dalam sasaran inflasi nasional $2,5\pm 1\%$. Penurunan terutama dipengaruhi oleh pola musiman konsumsi pada paruh kedua tahun dan risiko pasokan hortikultura selama fase tanam. Sementara itu, berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) diperkirakan mampu menjaga inflasi dalam sasaran nasional.







6.1 PROSPEK MAKROEKONOMI

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2026 diperkirakan tumbuh di rentang 4,61-5,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan terutama didorong oleh akselerasi Konsumsi Rumah Tangga selama periode *peak season*, yang menopang peningkatan permintaan domestik. Selain itu, perbaikan produktivitas LU pertanian serta penguatan industri pengolahan CPO turut menjadi faktor pendukung, seiring dengan penyelesaian permasalahan pencatatan ekspor komoditas CPO dan pengembangan Terminal Curah Cair (TCC) yang terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Pulau Baai yang saat ini dalam proses penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di sisi lain, kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh lebih terbatas, seiring dengan kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dan efisiensi belanja, sehingga berpotensi menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi secara lebih lanjut.

Sisi Pengeluaran

Pada tahun 2026, Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan akan tetap tumbuh positif. Perbaikan konsumsi rumah tangga terutama didorong oleh tren peningkatan pendapatan masyarakat pasca kenaikan harga komoditas utama, yaitu CPO dan batubara, penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP), serta pencairan THR, dan Gaji ke-13 dan tunjangan profesi guru. Selain itu, pelaksanaan berbagai program strategis Pemerintah turut memperkuat daya beli masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan produktivitas sektor pertanian juga menjadi faktor pendukung konsumsi. Hal ini didorong oleh berlanjutnya program *replanting* kelapa sawit, perluasan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), program cetak sawah, implementasi program Satu Desa Satu Hektar (SaDeSaHe) serta pemupukan yang optimal pada tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas tersebut menopang pendapatan rumah tangga petani dan berpotensi mendorong konsumsi lebih lanjut.

Namun demikian, tingkat optimisme konsumen menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencatat rata-rata sepanjang tahun 2025 sebesar 117,64 menurun sebesar 5,22% (yoy) dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya yang sebesar 124,10. Perkembangan ini mengindikasikan adanya kehati-hatian konsumen dalam melakukan pengeluaran, meskipun fundamental pendapatan menunjukkan perbaikan.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan ditopang konsumsi pemerintah yang mengalami akselerasi.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian struktur belanja pemerintah yang lebih diarahkan pada belanja barang dan jasa operasional, serta peran fiskal pemerintah yang tetap dijaga untuk menopang aktivitas ekonomi daerah.

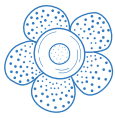
Selain itu, peningkatan konsumsi pemerintah juga didukung oleh kebutuhan pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk dukungan terhadap layanan publik dan program strategis nasional di daerah, seperti semakin masifnya program MBG dan KDKMP.

Di sisi lain, peningkatan masih tertahan akibat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan, menyebabkan Pemerintah Daerah diperkirakan tetap melakukan penyesuaian prioritas belanja agar fungsi pelayanan dasar dan program strategis tetap berjalan. Penyesuaian tersebut mendorong konsumsi pemerintah tetap tumbuh, terutama melalui optimalisasi belanja operasional yang bersifat produktif dan mendukung aktivitas ekonomi. Dengan demikian, konsumsi pemerintah diperkirakan menjadi salah satu komponen penyeimbang pada 2026, seiring moderasi konsumsi rumah tangga dan terbatasnya ruang fiskal daerah akibat penurunan TKD.

Pada tahun 2026, PMTB/ investasi diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan dengan normalisasi belanja modal pemerintah setelah akselerasi pada awal tahun. Perlambatan tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD)





dari pemerintah pusat, yang berdampak pada lebih terbatasnya ruang fiskal Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan fisik dan infrastruktur.

Selain itu, adanya penyesuaian prioritas serta *refocusing* anggaran turut menahan akselerasi realisasi proyek baru, sehingga aktivitas investasi pada tahun berjalan diperkirakan lebih banyak ditopang oleh penyelesaian proyek yang telah berjalan dibandingkan ekspansi investasi baru.

Namun, perlambatan PMTB/investasi diprakirakan tertahan oleh mulai berjalannya sejumlah kegiatan konstruksi, antara lain pembangunan jalan dan jembatan, revitalisasi sekolah, pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pembangunan dapur MBG. Kegiatan tersebut berpotensi menjaga aktivitas investasi fisik di daerah, meskipun ruang akselerasi belanja modal pemerintah cenderung lebih terbatas akibat penurunan TKD dan penyesuaian prioritas anggaran.

Dari sektor pertanian, berlanjutnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mendorong peningkatan luas Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), serta perluasan cetak sawah, turut mendukung pembentukan investasi riil melalui peningkatan kapasitas produksi jangka menengah. Selain itu, pembangunan Terminal Curah Cair (TCC) dan berlanjutnya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai tahap III yang ditargetkan mencapai kedalaman 12 meter menjadi faktor pendorong tambahan bagi PMTB, terutama dalam mendukung efisiensi logistik, aktivitas bongkar muat, serta penguatan konektivitas perdagangan komoditas utama Bengkulu.

Ekspor di tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih baik didorong oleh normalisasi infrastruktur logistik seiring penyelesaian revitalisasi alur Pelabuhan Pulau Baai tahap III yang ditargetkan mencapai kedalaman 12 meter. Perbaikan kapasitas dan kelancaran operasional pelabuhan tersebut meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan antar wilayah maupun ekspor luar negeri. Selain itu, optimalisasi alternatif pelabuhan lain turut mendukung kelancaran rantai pasok komoditas unggulan, khususnya batu bara dan karet. Prospek ini

juga diperkuat oleh peningkatan produktivitas komoditas utama serta stabilisasi permintaan dari mitra dagang utama.

Namun, kinerja ekspor tetap perlu menjadi perhatian meskipun harga komoditas pertambangan menunjukkan perbaikan. Tingginya ketergantungan ekspor Bengkulu pada komoditas primer, khususnya batu bara, menyebabkan kinerja ekspor masih sensitif terhadap perkembangan volume produksi dan kebijakan nasional. Pemangkasan target produksi batu bara nasional serta peningkatan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau *Domestic Market Obligation* (DMO) dari 25% menjadi 30% berpotensi membatasi volume batu bara yang dapat dialokasikan untuk pasar ekspor, sehingga kenaikan harga global belum sepenuhnya mampu mendorong akselerasi ekspor daerah.

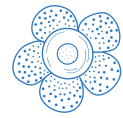
Selain itu, fluktuasi harga global dan dinamika permintaan dari negara mitra dagang utama masih menjadi faktor risiko yang perlu dicermati. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat serta meningkatnya tensi perdagangan global berpotensi memengaruhi permintaan ekspor secara tidak langsung melalui perubahan arus perdagangan, pelemahan aktivitas industri negara mitra, dan volatilitas harga komoditas. Dengan demikian, meskipun terdapat dorongan dari perbaikan harga, akselerasi ekspor Bengkulu masih berisiko tertahan oleh keterbatasan produksi, kewajiban pemenuhan domestik, serta ketidakpastian permintaan eksternal.

Sisi Lapangan Usaha

Pada tahun 2026 kinerja LU Pertanian, LU Perdagangan, LU Pertambangan, LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan mengalami akselerasi dibandingkan 2025.

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diperkirakan tumbuh akseleratif, didorong oleh penguatan produktivitas pertanian dan perkebunan serta perbaikan harga sejumlah komoditas utama. Dari sisi tanaman pangan, peningkatan kinerja ditopang oleh prakiraan kenaikan produksi padi seiring bertambahnya luas panen, keberlanjutan program SaDeSaHe, serta





dukungan pemerintah melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian, antara lain hand tractor, alat tanam padi, mesin penggiling padi, pupuk subsidi, dan herbisida untuk pengendalian gulma. Selain itu, rencana penyediaan jalur khusus distribusi pupuk ke Pulau Enggano juga diperkirakan mendukung kelancaran pasokan input pertanian, sehingga dapat menjaga kesinambungan aktivitas produksi di wilayah kepulauan.

Dari subsektor perkebunan, perbaikan kinerja LU Pertanian diperkirakan turut ditopang oleh harga CPO dan komoditas turunan kelapa sawit yang relatif membaik, serta mulai berproduksinya tanaman hasil program peremajaan sawit rakyat/*replanting*. Kualitas tanaman yang lebih baik, didukung oleh pemupukan yang memadai pada tahun sebelumnya, diperkirakan meningkatkan produktivitas kebun dan menjaga pasokan TBS bagi industri pengolahan. Selain sawit, kenaikan harga kopi global juga berpotensi mendorong harga kopi lokal, sehingga memberikan insentif produksi bagi petani, terutama di sentra kopi seperti Kabupaten Kepahiang.

Namun, akselerasi LU Pertanian masih menghadapi sejumlah faktor penahan dari sisi cuaca dan siklus produksi. Masuknya musim trek pada subsektor perkebunan berpotensi membatasi produksi sawit pada periode tertentu, sementara tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu yang berada pada kisaran sedang dapat memengaruhi aktivitas tangkap nelayan. Selain itu, potensi berkembangnya fenomena El Nino pada semester II 2026 perlu dicermati karena dapat meningkatkan risiko kemarau yang lebih kering, penurunan ketersediaan air, serta gangguan pola tanam dan produktivitas pertanian, khususnya pada komoditas tanaman pangan dan perkebunan. Meski demikian, potensi hujan ekstrem secara lokal tetap perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi kualitas hasil panen, distribusi input pertanian, serta kelancaran aktivitas produksi di wilayah sentra. Dengan demikian, faktor cuaca menjadi risiko utama yang dapat membatasi capaian pertumbuhan LU Pertanian secara lebih optimal pada paruh kedua 2026.

LU Perdagangan diperkirakan turut mengalami akselerasi pertumbuhan. Menguatnya pertumbuhan pada LU perdagangan sejalan dengan semakin masifnya

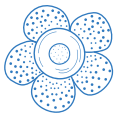
proyek strategis MBG. Selain itu, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu sebesar 5,8% serta adanya insentif lain, seperti tunjangan profesi guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN, turut mendorong peningkatan tingkat konsumsi masyarakat. Selain itu, perbaikan alur logistik Pelabuhan Pulau Baai dapat mendorong aktivitas perdagangan antar wilayah. Akselerasi pada kinerja lapangan usaha LU pertanian dan industri pengolahan diperkirakan turut mendorong peningkatan kinerja LU perdagangan.

Sejalan dengan itu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diperkirakan tetap tumbuh positif, ditopang oleh mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Namun demikian, akselerasinya berpotensi tertahan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya frekuensi kegiatan MICE, perjalanan dinas, serta penggunaan jasa akomodasi penginapan. Dengan demikian, pertumbuhan sektor ini diperkirakan tetap berlanjut, namun tidak setinggi periode dengan dukungan kegiatan pemerintahan dan event berskala besar.

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan tetap tumbuh solid, didukung oleh perbaikan fasilitas transportasi dan logistik, baik melalui pembangunan jalan, jembatan, maupun revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai. Dorongan tambahan juga berasal dari mulai beroperasinya layanan *drop tank* curah cair di Pelabuhan Pulau Baai pada Mei 2026 untuk pemuatan PFAD, yang berpotensi meningkatkan efisiensi logistik produk turunan sawit. Kehadiran layanan tersebut memperkuat fungsi Pelabuhan Pulau Baai sebagai simpul distribusi komoditas utama daerah, sekaligus mendukung aktivitas bongkar muat dan jasa pergudangan.

Namun, akselerasi LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan tertahan oleh kebijakan efisiensi perjalanan dinas serta penerapan pola kerja yang lebih fleksibel, termasuk WFH/rapat daring pada sebagian instansi dan pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi frekuensi perjalanan dinas, mobilitas aparatur, serta permintaan terhadap angkutan penumpang, khususnya angkutan udara dan perjalanan antardaerah. Dengan demikian, pertumbuhan LU Transportasi dan





Pergudangan pada 2026 diperkirakan lebih banyak ditopang oleh aktivitas logistik dan distribusi barang, sementara dorongan dari mobilitas penumpang cenderung lebih terbatas.

LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh melandai pada tahun 2026, terutama dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas produksi pasca *peak season* sehingga volume produksi cenderung kembali ke level normal. Selain itu, volatilitas harga komoditas global juga mendorong pelaku industri untuk lebih berhati-hati dalam meningkatkan kapasitas produksi, khususnya pada industri pengolahan berbasis kelapa sawit/CPO yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pergerakan harga komoditas dan ketersediaan bahan baku.

Meski demikian, perlambatan LU Industri Pengolahan diperkirakan tertahan oleh perbaikan kinerja LU Pertanian serta peningkatan produksi bahan baku pada awal tahun. Akselerasi pada sebagian aktivitas pengolahan juga didukung oleh meningkatnya pasokan TBS kelapa sawit dari petani, serta mulai beroperasinya 2 pabrik CPO baru di Kabupaten Seluma yang berpotensi meningkatkan kapasitas serapan TBS dan mendorong aktivitas produksi industri pengolahan sawit di daerah.

Namun, risiko penahan tetap perlu dicermati, terutama dari potensi terbatasnya pasokan bahan baku industri sawit akibat menurunnya produktivitas kebun sawit rakyat yang mulai memasuki usia tua, khususnya di sentra produksi seperti Kabupaten Mukomuko. Meskipun Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus didorong dengan target *replanting* Bengkulu seluas 3.500 hektare pada 2026, termasuk 750 hektare di Mukomuko, dampaknya terhadap peningkatan produksi CPO diperkirakan belum optimal pada tahun berjalan karena proses peremajaan berlangsung bertahap dan baru memberikan hasil dalam jangka menengah.

6.2 PROSPEK INFLASI

Tekanan Inflasi 2026

Provinsi Bengkulu diperkirakan mengalami tekanan inflasi yang relatif stabil pada triwulan II 2026 dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan inflasi IHK berada pada kisaran 2,70 – 3,20% (yoy).

Prospek inflasi Provinsi Bengkulu pada Triwulan II 2026 diperkirakan relatif stabil dibandingkan Triwulan I 2026. Pada Triwulan I 2026, inflasi sempat meningkat pada Februari seiring tekanan harga pangan menjelang Ramadan, kemudian melandai pada Maret 2026 menjadi 2,85% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga pada akhir triwulan mulai kembali terkendali, terutama didukung koreksi harga beberapa komoditas hortikultura dan transportasi.

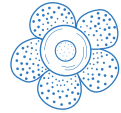
Memasuki Triwulan II 2026, stabilitas inflasi diperkirakan ditopang oleh mulai masuknya periode panen beberapa komoditas pangan utama, terutama beras dan sebagian hortikultura. Peningkatan pasokan tersebut berpotensi menahan tekanan volatile food, sehingga inflasi tidak meningkat signifikan dibandingkan Triwulan I. Selain itu, normalisasi permintaan pasca-HBKN Ramadan dan Idul Fitri turut menjadi faktor penahan, khususnya pada komoditas pangan yang sebelumnya mengalami kenaikan permintaan musiman.

Meski demikian, tekanan inflasi tetap perlu dicermati, terutama dari komoditas pangan yang sensitif terhadap cuaca dan distribusi, seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, serta beberapa komoditas perikanan. Permintaan pada periode Idul Adha dan libur sekolah juga dapat memberikan tekanan terbatas terhadap komoditas protein hewani dan transportasi. Namun, dengan pasokan yang lebih baik dan berlanjutnya program stabilisasi harga, risiko tersebut diperkirakan masih dapat dikelola.

Dari sisi administered prices, tekanan pada Triwulan II diperkirakan relatif terbatas seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia yang berpotensi untuk mendorong kenaikan/penurunan harga BBM. Sementara itu, inflasi inti diperkirakan tetap terjaga, meskipun perkembangan harga emas perhiasan masih perlu diwaspadai seiring dinamika harga emas global.

Secara keseluruhan, inflasi Triwulan II 2026 diperkirakan stabil dengan kecenderungan bias bawah dibandingkan Triwulan I 2026. Faktor penahan utama berasal dari masuknya masa panen, normalisasi permintaan pasca-HBKN, serta keberlanjutan program stabilisasi harga.





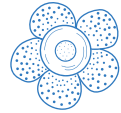
Pengendalian inflasi tetap perlu difokuskan pada penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi harga yang tepat waktu, serta komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat. Konsistensi implementasi strategi 4K menjadi kunci agar inflasi Bengkulu tetap terkendali dalam rentang sasaran.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bengkulu tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan 2025 namun tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1%.

Peningkatan terutama dipengaruhi oleh pola musiman konsumsi pada paruh kedua tahun, risiko cuaca *el nino* yang mempengaruhi panen pasokan hortikultura, serta ketidakpastian global yang tercermin pada harga emas dan sejumlah input biaya pangan. Di sisi lain, prospek inflasi tertahan oleh penguatan langkah GPIPS/TPID (dorongan realisasi beras SPHP, intensifikasi GPM/OP, serta Kerja Sama Antardaerah/KAD untuk kelancaran pasokan dari dalam dan luar provinsi). Adapun dari sisi harga diatur pemerintah, terdapat potensi penurunan tarif angkutan udara seiring insentif diskon harga tiket pesawat pada periode libur akhir yang akan diberikan oleh pemerintah untuk mendorong perputaran ekonomi antar daerah.

Dengan sinergi kebijakan 4K dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, inflasi Bengkulu sepanjang 2026 diperkirakan terkendali dan sejalan dengan sasaran pengendalian inflasi.





Daftar Istilah

Administered Price (AP)	Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bank Pemerintah	Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik Pemerintah (persero) yaitu terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI. Dalam buku ini bank Pemerintah Daerah (Bank Bengkulu) juga dikelompokkan dalam bank pemerintah.
Bobot Inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Cash Inflows	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dan penukaran uang masyarakat dalam periode tertentu.
Cash Outflows	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dan penukaran uang masyarakat dalam periode tertentu.
Clean Money Policy	Merupakan kebijakan untuk menyediakan uang layak edar.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Ekspor	Keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Dengan skala 1-100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persisten).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflasi Inti	Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen Volatile Foods dan Administered Price.
Impor	Keseluruhan barang yang masuk dari suatu wilayah /daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah.
Kredit	Adalah penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan <i>Note Purchase Agreement (NPA)</i> 2. Pengembalian tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.





Daftar Istilah

Kualitas Kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
Liaison Bank Indonesia	Salah satu kegiatan rutin untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi aktual sektor riil/usaha beserta prospeknya melalui wawancara langsung antara Bank Indonesia dengan pelaku usaha/sumber data.
MTM/mtm	Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Net Cashflows	Selisih bersih antara jumlah <i>cash inflows</i> dan <i>cash outflows</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>Netcash Outflows</i> bila terjadi <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan <i>cash inflows</i> , dan <i>Netcash Inflows</i> bila terjadi sebaliknya.
Non Performing Loans (NPL)	Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau non-lancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi Kurang lancar, Diragukan, dan Macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.
Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).
Porsi Ekonomi	Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)	Merupakan perhitungan PDRB dengan menggunakan harga di periode tersebut sebagai dasar perhitungan.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)	Merupakan perhitungan PDRB dengan menggunakan harga pada satu waktu tertentu sebagai dasar perhitungan.
Produk Domestik Regional Bruto Satu Tahun	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah dalam satu tahun.
Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah dalam satu triwulan tertentu.
QTQ/qtq	Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)	Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs, gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ybs. Terminologi NPL untuk bank konvensional, sedangkan NPF untuk bank syariah.
Rasio Non Performing Loans (NPLs) – NET	Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit.
Sektor Ekonomi Dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Surat berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang.
Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)	Sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah dan sistem moneter.
Uang Gartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPKN dan bank umum.
Volatile Foods (VF)	Komponen inflasi IHK yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat fluktuatif.
YOY/yoy	Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.





Halaman ini sengaja dikosongkan



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BENGKULU**

Jl. A. Yani No.1, Kebun Keling, Kec. Tlk. Segara,

Kota Bengkulu Bengkulu 38116

www.bi.go.id

